



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU
TAHUN 2024**





Ir. Arif Gunadi, M.Si
PENJABAT WALI KOTA BENGKULU



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT pemilik alam semesta dan berkuasa atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Tiada sesuatupun berlaku kecuali atas kehendak dan izin-Nya.

Penyampaian Laporan mengenai hasil Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap aturan dalam rangka mewujudkan azas pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan ini disusun dan telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sistematika yang berlaku, dengan harapan dapat memberikan gambaran yang se-objektif mungkin tentang pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Bengkulu.

Demikian laporan ini disusun semoga dapat menjadi bahan dan informasi bagi semua pihak sebagai salah satu bahan evaluasi demi kemajuan pelaksanaan pembangunan Kota Bengkulu yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wasalammu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Bengkulu, Maret 2024

Pj. WALI KOTA BENGKULU


ARIF GUNADI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1. Penjelasan Umum	1
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	7
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	64
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
PEMERINTAH DAERAH.....	67
2.1 Capaian Kinerja Makro	67
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	67
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	68
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS	
PEMBANTUAN	98
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR	
PELAYANAN MINIMAL	99
4.1 Bidang Pendidikan	99
4.2 Bidang Kesehatan	101
4.3 Bidang Pekerjaan Umum	107
4.4 Bidang Perumahan Rakyat.....	113
4.5 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	116
4.6 Bidang Sosial	126
BAB V PENUTUP	130
PELAPORAN IKK KOTA BENGKULU	131



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (jiwa) Kota Bengkulu Tahun 2023	5
Tabel 1.2 Kecamatan dan Kelurahan Kota Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2023	6
Tabel 1.3 Jumlah Perangkat Daerah Kota Bengkulu	6
Tabel 1.4 Jumlah PNS Kota Bengkulu Menurut Golongan dan Jenis Kelamin.....	7
Tabel 1.5 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.....	7
Tabel 1.6 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bengkulu Tahun 2019-2023	10
Tabel 2.1 Capaian Kinerja Makro	67
Tabel 2.2 Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2023	69
Tabel 2.3 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1	71
Tabel 2.4 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2	76
Tabel 2.5 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3	79
Tabel 2.6 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 4	80
Tabel 2.7 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 5	81
Tabel 2.8 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 6	81
Tabel 2.9 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 7	83
Tabel 2.10 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 7	83
Tabel 2.11 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 8	84
Tabel 2.12 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 9	85
Tabel 2.13 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 10	86
Tabel 2.14 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 11	88
Tabel 2.15 Realisasi Anggaran Tahun 2023	89
Tabel 4.1. Target, Realisasi dan Alokasi Anggaran Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	100



Tabel 4.2 Jumlah Personil Pendukung Penerapan SPM Bidang Pendidikan	
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	101
Tabel 4.3 Jumlah Personil Pendukung Penerapan SPM Bidang Pendidikan	
Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional	101
Tabel 4.4 Target Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan..	103
Tabel 4.5 Realisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang	
Kesehatan	104
Tabel 4.6 Alokasi Anggaran dan Realisasi Penerapan	
SPM Bidang Kesehatan Realisasi Anggaran 2023	105
Tabel 4.7 Jumlah Personil Pendukung Penerapan SPM Bidang Kesehatan	
Berdasarkan Tingkat Pendidikan	106
Tabel 4.8 Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum	108
Tabel 4.9 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum	110
Tabel 4.10 Penerima Pengelolaan Air Minum (SPAM)	110
Tabel 4.11 Rumah Penerima Pengelolaan Air Limbah.....	111
Tabel 4.12 Alokasi dan Realisasi Anggaran Penerapan SPM Bidang	
Pekerjaan Umum.....	111
Tabel 4.13 Jumlah Personil Pendukung Penerapan SPM Bidang Pekerjaan	
Umum Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	112
Tabel 4.14 Jumlah Personil Pendukung Penerapan SPM Bidang Pekerjaan	
Umum Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional	112
Tabel 4.15 Jumlah Personil Pendukung Penerapan SPM Bidang Perumahan	
Rakyat Berdasarkan Pendidikan	115
Tabel 4.16 Target, Indikator dan OPD Pelaksana SPM Bidang	
Trantibumlinmas	117
Tabel 4.17 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas.....	118
Tabel 4.18 Alokasi dan Realisasi Anggaran SPM Bidang Trantibumlinmas ..	120
Tabel 4.19 Personil Pendukung Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas	
pada Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Pendidikan.....	122
Tabel 4.20 Personil Pendukung Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas	
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	123



Tabel 4.21 Personil Pendukung Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Pendidikan.....	124
Tabel 4.22 Target Pencapaian SPM Bidang Sosial.....	127
Tabel 4.23 RealisasiPencapaian SPM Bidang Sosial.....	127
Tabel 4.24 Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan SPM Bidang Sosial	128
Tabel 4.25 Jumlah Personil Pendukung Penerapan SPM Bidang Sosial Berdasarkan Pendidikan.....	128
Tabel 4.26 Jumlah Personil Pendukung Penerapan SPM Bidang Sosial Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional	129



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1. Penjelasan Umum

A. Undang-undang Pembentukan Daerah

Berdirinya Kota Bengkulu melalui beberapa tahapan yang dimulai dari sebuah Kota kecil yang merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, kronologis sejarah berdirinya Provinsi Bengkulu umumnya dan Kota Bengkulu khususnya dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kota Kecil Bengkulu, dibawah pemerintahan Sumatera Bagian Selatan dengan luas wilayah 17,6 Km² merubah Kota Kecil Bengkulu menjadi Kota Praja yang meliputi 4 (empat) wilayah kedadukan dengan membawahi 28 Kepangkuan yaitu :
 - a. Kedadukan Wilayah I terdiri dari 7 Kepemangkuan;
 - b. Kedadukan Wilayah II terdiri dari 7 Kepemangkuan;
 - c. Kedadukan Wilayah III terdiri dari 7 Kepemangkuan;
 - d. Kedadukan Wilayah IV terdiri dari 7 Kepemangkuan;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Jo. PP Nomor 20 Tahun 1968 menetapkan bahwa Kota Bengkulu sebagai Ibu kota Provinsi Bengkulu.
3. Undang-undang Nomor 05 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, merubah sebutan Kota Praja dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, merubah sebutan Kotamadya Daerah Tk.II Bengkulu menjadi sebutan Kota Bengkulu.
4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Bengkulu Nomor 821.27.039 tanggal 22 Januari 1981 tentang Kotamadya Dati II Bengkulu di bagi menjadi 2 Wilayah setingkat Kecamatan yaitu :
 - a. Wilayah Kecamatan Teluk Segara;
 - b. Wilayah Kecamatan Gading Cempaka.



5. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Bengkulu Nomor 440/1981 dan Nomor 444/1981 dan dikuatkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bengkulu Nomor 141/1982 tanggal 1 Oktober 1982, menghapus Wilayah Kedadukan dan Kepemangkuan menjadi Kelurahan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42/1982 dalam Wilayah Kotamadya Dati II Bengkulu terbagi 2 (dua) Wilayah Kecamatan definitif dan membawahi 38 Kelurahan yang terdiri dari :
 - a. Kecamatan Teluk Segara membawahi 17 Kelurahan;
 - b. Kecamatan Gading Cempaka membawahi 21 Kelurahan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46/1986 mengatur tentang Wilayah Kotamadya Dati II Bengkulu perubahan batas dan perluasan dari 17,6 Km² menjadi 144,52 Km² terdiri dari 4 (empat) Wilayah Kecamatan 38 Kelurahan dan 17 Desa masing-masing :
 - a. Kecamatan Gading Cempaka;
 - b. Kecamatan Teluk Segara;
 - c. Kecamatan Selebar;
 - d. Kecamatan Muara Bangkahulu.
8. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 1991 tentang Hari Jadi dan Motto Kotamadya Dati II Bengkulu. Menetapkan tanggal 17 Maret 1719 dijadikan Hari Jadi Kotamadya Bengkulu diambil dari Peristiwa Penyerbuan Rakyat terhadap Benteng Marlborough, Motto Kotamadya Bengkulu adalah “ **SEIYO SEKATO KITO BANGUN BUMI PUTRI GADING CEMPAKA MENJADI KOTA SEMARAK**”. Seiyo Sekato mempunyai arti Musyawarah dan Mufakat sedangkan Semarak adalah singkatan dari SEJUK, MERIAH, AMAN RAPI DAN KENANGAN.
9. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Bengkulu merubah wilayah Kota Bengkulu menjadi 8 (delapan) kecamatan dan 66 kelurahan.

10. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Bengkulu. Dengan peraturan daerah tersebut merubah wilayah Kota Bengkulu menjadi 9 (Sembilan) kecamatan dan 67 kelurahan.

B. Kondisi Geografis Daerah

1.1. Geografi

Kota Bengkulu merupakan Ibukota Provinsi Bengkulu yang terletak di pesisir pantai Samudera Indonesia (Pantai Barat Pulau Sumatera), yang berada diantara $102^{\circ} 14' - 102^{\circ} 22'$ Bujur Timur dan $3^{\circ} 45' - 3^{\circ} 59'$ Lintang Selatan dengan luas $539,3 \text{ Km}^2$ atau 53.930 Ha. Terdiri dari daratan seluas $151,70 \text{ Km}^2$ dan lautan seluas $387,6 \text{ Km}^2$.

1.2. Batas Administrasi Daerah

Secara administrasi Kota Bengkulu memiliki batas sebagai berikut :

- a. Di sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma;
- c. Di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

1.3. Luas Wilayah

Secara administratif Kota Bengkulu terdiri dari 9 (Sembilan) Kecamatan, 67 (Enam puluh tujuh) Kelurahan, dengan luas $539,3 \text{ Km}^2$, yang terdiri dari luas darat $151,7 \text{ Km}^2$, dan luas laut $387,6 \text{ Km}^2$ (sumber data Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional).

1.4. Topografis

Topografi Kota Bengkulu memiliki relief permukaan tanah yang bergelombang, terdiri dari dataran pantai dan daerah berbukit-bukit serta di beberapa tempat terdapat cekungan alur sungai kecil, terutama di wilayah pantai dengan ketinggian berkisar antara 0 – 10 meter dari permukaan laut, sedangkan dibagian Timur ketinggiannya berkisar

antara 25-50 meter dari permukaan laut dengan keadaan topografi 70% datar dan 30 % berbukit kecil dan rawa-rawa.

1.5. Klimatologi

Wilayah Kota Bengkulu terletak antara 3°45' - 3°59' dari garis equator atau 2°48' sebelah selatan garis khatulistiwa. Sebagaimana umumnya daerah-daerah yang berada dalam posisi tersebut, keadaan iklim Kota Bengkulu memperlihatkan ciri klimatologis daerah tropis.

a. Suhu dan Kelembaban.

Temperatur rata-rata Kota Bengkulu dapat dikatakan kecil fluktuasinya, namun antara temperatur minimum cukup menyolok perbedaannya yaitu sekitar 10°C. Menurut data beberapa tahun terakhir, suhu rata-rata Kota Bengkulu antara 23,1°C – 31,9°C, lama penyinaran matahari berkisar antara 54 – 85 %, sedangkan kelembaban udara rata-rata berkisar antara 81 – 87 %.

b. Curah Hujan.

Menurut Schmidt Ferguson, curah hujan di daerah Bengkulu termasuk Type A, curah hujan yang tinggi jatuh pada bulan Oktober–Januari. Data 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa rata-rata curah hujan tahunan sebesar 3838 mm (219-3838 mm) rata-rata curah hujan bulanan sebesar 319 mm. Data 3 (tiga) tahun terakhir musim hujan pada umumnya terjadi bulan November sampai dengan April dan musim kemarau bulan Mei sampai dengan Oktober dengan hari-hari paling basah antara Desember dan Januari.

c. Angin.

Kota Bengkulu berada dalam pengaruh angin tenggara. Angin umumnya bertiup dari arah pantai yaitu dari Barat, Barat Laut dan Barat Daya Selatan, Menurut stasiun Klimatologi Bengkulu kelembaban udara di Kota Bengkulu pada tahun 2016 berkisar antara 82-85 persen. Sementara itu rata-rata kecepatan angin berkisar antara 3,3-5,5 km/jam dengan kecepatan angin maksimum terjadi pada bulan september yakni sebesar 5,5 km/jam. Pada hari-hari tertentu pada musim kemarau angin bertiup dari arah Barat

dengan kecepatan antara 40 – 80 km/jam, menyebabkan gelombang besar di pantai yang menghambat kegiatan nelayan, musim ini biasa dinamakan musim GELORO.

C. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kota Bengkulu sampai dengan Agustus 2023 sebanyak 390.060 jiwa dan untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini :

Tabel 1. 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (jiwa)
Kota Bengkulu Tahun 2023

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki (Lk)	Perempuan (Pr)	
Teluk Segara	11.002	11.191	22.193
Gading Cempaka	19.295	19.276	38.571
Selebar	43.513	42.590	86.103
Muara Bangkahulu	27.177	26.498	53.675
Sungai Serut	12.837	12.882	25.719
Ratu Agung	26.023	25.930	51.953
Ratu Samban	10.946	11.029	21.975
Kampung Melayu	24.718	24.179	48.897
Singaran Pati	20.514	20.460	40.974
Total	196.025	194.035	390.060

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, 2023

D. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Kota Bengkulu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan dalam Wilayah Kota Bengkulu, Kota Bengkulu terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan dan 67 Kelurahan dan untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 1.2 di bawah ini :

Tabel 1.2
Kecamatan dan Kelurahan Kota Bengkulu Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1	Teluk Segara	13
2	Gading Cempaka	5
3	Selebar	6
4	Muara Bangkahulu	7
5	Sungai Serut	7
6	Ratu Agung	8
7	Ratu Samban	9
8	Kampung Melayu	6
9	Singaran Pati	6
Total		67

Sumber : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, 2023

E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu, Jumlah Perangkat Daerah Kota Bengkulu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 3
Jumlah Perangkat Daerah Kota Bengkulu

Perangkat Daerah	Jumlah
Sekretariat Daerah	1
Sekretariat DPRD	1
Inspektorat Daerah	1
Satuan Polisi Pamong Praja	1
Dinas	20
Badan	6
Kecamatan	9
Total	39

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bengkulu, 2023

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2023 sebanyak 4.068 Orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4
Jumlah PNS Kota Bengkulu Menurut Golongan dan Jenis Kelamin

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan I	4	0	4
2	Golongan II	118	55	173
3	Golongan III	882	1790	2672
4	Golongan IV	284	935	1219
	Total	1.288	2.780	4.068

Sumber : Olah Data SAPK Badan Kepegawaian Negara

F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 1.5
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
1	Pendapatan Daerah	1.266.527.517.553	1.179.628.328.035	86.899.189.518,00
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	290.198.819.118	210.466.954.210	79.731.864.908,00
3	Belanja Daerah	1.271.679.023.193	1.147.461.661.082,08	124.217.362.110,92
4	Belanja Operasi	1.003.473.701.287	920.657.960.193,99	82.815.741.093,01
5	Belanja Modal	266.955.321.906	226.439.568.888,09	40.515.753.017,91
6	Belanja Tidak Terduga	1.250.000.000	364.132.000	885.868.000,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu, 2023

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Secara umum, perencanaan pembangunan daerah tidak menemui kendala. Namun, dengan keterbatasan anggaran mengakibatkan tidak semua program dan kegiatan Pemerintah Kota Bengkulu dapat dilaksanakan secara maksimal.

Akan tetapi bukan berarti, Pemerintah Kota Bengkulu mengenyampingkan program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Visi dan Misi Wali Kota Bengkulu

1. Visi Kota Bengkulu

Visi adalah cara pandang jauh ke depan, kemana organisasi harus dibawa, agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif serta merupakan suatu gambaran yang menantang tentang suatu keadaan masa depan yang diinginkan dan ingin dicapai. Rumusan Visi Kota Bengkulu akan memberikan gambaran apa yang ingin dicapai oleh masyarakat Kota Bengkulu selama 5 (lima) tahun kedepan, memberikan arah serta fokus strategi pembangunan, sebagai pemersatu berbagai gagasan strategis, memiliki orientasi masa depan, menumbuhkan komitmen bersama seluruh lapisan masyarakat serta menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Visi Pemerintah Kota Bengkulu 5 (lima) tahun kedepan dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Kota Bengkulu yang Bahagia dan Religius, APBD untuk Rakyat “

Maksud dan arti dari pada Visi Pemerintah Kota Bengkulu dapat dijelaskan. Masyarakat Bengkulu yang Bahagia mengandung makna sejahtera dan bermantabat dengan indikator terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui peningkatan pembangunan ekonomi, pariwisata, yang memberdayakan, kearifan lokal masyarakat, lingkungan layak huni terbebas dari kekumuhan dan peningkatan indeks pembangunan manusia.

Masyarakat yang **Religius** bermakna bahwa masyarakat Kota Bengkulu menjalankan kehidupannya dalam iman dan takwa, akhlak, keluhuran budi pekerti, produktif dalam bekerja dalam tatanan kehidupan kota yang madani.

“APBD untuk Rakyat” bermakna Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan lebih ditekankan pada program dan kegiatan yang dirasakan langsung oleh rakyat/masyarakat sehingga pencapaian Bengkulu yang Bahagia dan Religius dapat dicapai serta pembangunan yang dilakukan di harapkan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Misi Kota Bengkulu

Misi merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Guna mewujudkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Bengkulu 2019-2023, misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance* dan *clean governance*)
2. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan
3. Mewujudkan masyarakat cerdas, sehat dan berakhlak mulia
4. Membangkitkan ekonomi kreatif dan iklim usaha yang kondusif.

Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Misi merupakan upaya yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Penjabaran misi dilakukan agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan sesuai dengan target. Pernyataan misi dimaksudkan agar di seluruh sistem dalam organisasi, pihak-pihak yang berkepentingan dan seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui dan mengerti sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Visi tersebut akan dapat dicapai dengan merumuskan 4 (empat) Misi yang saling terkait satu dengan lainnya. Perumusan misi dilakukan dengan memperhatikan kondisi internal, eksternal dan kepentingan masyarakat. Misi Pemerintah Kota Bengkulu dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Misi Pertama : Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance* dan *Clean Goverment*).
2. Misi Kedua : Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan
3. Misi Ketiga : Mewujudkan Masyarakatcerdas, sehat dan berakhlak mulia.
4. Misi Keempat : Membangkitkan ekonomi Kreatif dan iklim usaha yang kondusif.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang target pencapaiannya ditentukan setiap tahun, dan akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat terukur.

Misi, tujuan, sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Bengkulu selama kurun waktu 2019–2023 adalah sebagai berikut :

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Tabel 1.6
Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bengkulu Tahun 2019-2023

No	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja
1	Program Perencanaan pembangunan daerah	Nilai sub Komponen Perencanaan Kinerja pada penilaian SAKIP
		Nilai sub Komponen pengukuran Kinerja pada penilaian SAKIP
		Persentase capaian Program daerah di RKPD dengan predikat kinerja tinggi dan sangat tinggi
		Persentase keselarasan muatan antara dokumen RKP,RPJMD,RKPD Provinsi dengan RKPD Kota
2	Program perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Persentase OPD Bidang Perencanaan Ekonomi dengan hasil Renja Predikat Kinerja Baik
		Persentase kesesuaian program antara RKPD dengan KUA PPAS Bidang Perencanaan Ekonomi
		Persentase kesesuaian program antara KUA-PPAS dengan APBD Bidang Perencanaan Ekonomi
		Persentase hasil musrenbang Bidang Perencanaan Ekonomi yang ditindaklanjuti
3	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase OPD Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan hasil Renja Predikat Kinerja Baik



No	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja
		Persentase kesesuaian program antara RKPD dengan KUA PPAS Bidang Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
		Persentase kesesuaian program antara KUA-PPAS dengan APBD Bidang Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
		Persentase hasil musrenbang Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang ditindaklanjuti
4	Program perencanaan Sosial Budaya	Persentase OPD Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dengan hasil Renja Predikat Kinerja Baik
		Persentase kesesuaian program antara RKPD dengan KUA PPAS Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia
		Persentase kesesuaian program antara KUA-PPAS dengan APBD Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia
		Persentase hasil musrenbang Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia yang ditindaklanjuti
5	Program Pengembangan inovasi Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah
6	Program Penelitian Pembangunan daerah	Persentase Implementasi rencana kelitbangan
7	Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase kelengkapan data sistem informasi pembangunan daerah
8	Program Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase OPD yang berkinerja baik
9	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase ASN yang mengikuti diklat penjenjangan
		Persentase Auditor/P2UPD yang mendapatkan sertifikasi sesuai dengan jenjang jabatan
		Persentase auditor/P2UPD yang memenuhi angka kredit
10	Program pengembangan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan	Persentase OPD yang memiliki nilai SAKIP minimal "BB"
11	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan	Persentase perangkat daerah yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP



No	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja
	keuangan daerah	Penetapan APBD
		Persentase aset daerah yang terinventarisasi
		Proporsi belanja modal dan belanja operasional
		Persentase peningkatan realisasi pajak dan retribusi daerah
		Persentase peningkatan hasil BUMD
12	Program Pencegahan dan pemberantasan korupsi	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan:
		a) LHP BPK RI
		b) LHP Inspektorat Provinsi
		c) LHP Inspektorat Kota
		Ketaatan para wajib LHKPN dalam menyampaikan laporan harta kekayaan
		Persentase capaian tindak lanjut
13	Program Peningkatan Kualitas kelembagaan pelayanan publik	Persentase perangkat daerah yang telah menjalankan SOP dan SPP
		Persentase OPD yang mendapatkan nilai pelayanan baik
14	Program Penataan administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki e-KTP
		Persentase kepemilikan akte kelahiran usia 0-tak terhingga
		Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran usia 0-18 Tahun
		Persentase penduduk yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)
15	Program Pengembangan komunikasi, informasi, dan media masa	Persentase OPD yang menerapkan aplikasi e-government
		Persentase data pembangunan daerah yang terpublikasi
16	Program Kerjasama Informasi dan media massa	Persentase proses pengadaan barang dan jasa tepat waktu (elektronik)
17	Program Pengembangan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat pada Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan yg diselesaikan
		Persentase pelayanan publik berbasis teknologi informasi pada proses perizinan dan non perizinan



No	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja
18	Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase OPD yang mengelola arsip secara baku
19	Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase arsip yang telah diduplikasi dalam e-katalog
20	Program Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase arsip yang tersimpan dengan baik
21	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase pelayanan informasi arsip
22	Program Peningkatan Pengembangan kapasitas kecamatan dan kelurahan	Persentase kecamatan yang berkinerja prima Persentase kelurahan yang berkinerja prima
23	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif Persentase kelurahan yang menerapkan TTG
24	Program Kerjasama pembangunan	Persentase perusahaan yang telah menyalurkan CSR tepat sasaran Persentase BUMD dengan kinerja baik Persentase kerjasama antar daerah yang ditindaklanjuti
25	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase peningkatan tertib pertanahan
26	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pejabat struktural yang telah diklat pim sesuai syarat jabatan Persentase aparatur yang telah lulus diklat fungsional Persentase aparatur yang telah lulus diklat teknis sesuai kebutuhan
27	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase pejabat struktural yang memenuhi syarat kompetensi dan kualifikasi Persentase pelayanan kenaikan pangkat dan gaji berkala tepat waktu
28	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase ASN mendapatkan Pendidikan Kedinasan
29	Program Fasilitasi pindah tugas / purna tugas ASN	Jumlah ASN terfasilitasi
30	Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tingkat kepuasan layanan pada DPRD Persentase fasilitasi rapat/reses DPRD tepat waktu



No	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja
		Persentase kelengkapan bahan-bahan penyusunan Raperda
		Persentase perda yang terpublikasi
31	Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Indeks (survey) kepuasan pimpinan (melalui ajudan) dan tamu daerah
32	Program Penataan peraturan perundang-undangan	Persentase raperda yang disahkan
		Persentase permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan
33	Program Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase ketercapaian target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah
34	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase pelanggaran k3 yang ditangani
35	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase LSM/Ormas yang aktif dalam pembangunan
36	Program Pendidikan politik masyarakat	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum
37	Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan patroli Satpol PP
38	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan LSM
39	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Cakupan petugas linmas per 1000 penduduk
		Persentase Poskamling aktif
		Persentase partisipasi masyarakat di FKDM dalam menjaga keamanan dan ketertiban
40	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat(Pekat)	Persentase kasus pekat yang ditangani
		Persentase Organisasi Kepemudaan yang menerima penyuluhan bahaya penggunaan dan peredaran Narkoba dan prekursor Narkotika serta aksi premanisme
41	Program Pengawasan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pelanggaran Perda yang ditindak
42	Program Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan	Persentase panjang jalan rusak yang diperbaiki/ditingkatkan
43	Program Rekonstruksi dan Pemeliharaan Jembatan	Persentase jembatan rusak yang diperbaiki/ditingkatkan
44	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase alat berat dalam kondisi baik



No	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja
45	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase pusat pariwisata terhubung jaringan jalan dalam kondisi baik
46	Program pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan	Persentase jalan yang memiliki papan nama dan status Persentase peningkatan ketersediaan database
47	Program peningkatan sarana pendukung jaringan jalan	Rasio panjang trotoar terhadap panjang jalan Rasio panjang drainase terhadap panjang jalan Persentase ruas jalan yang ramah disabilitas
48	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah	Persentase RT memiliki MCK memadai Persentase MCK terlayani IPAL memadai
49	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Persentase Penduduk yang terlayani Sistem Jaringan Drainase Skala Kota sehingga tidak terjadi genangan
50	Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi/rawa dan pengairan lainnya	Persentase jaringan irigasi terpelihara
51	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Volume air tersalurkan Persentase RT yang terlayani akses air minum
52	Program Pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh	Persentase perencanaan kawasan strategis yang ditindaklanjuti
53	Program Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan Lingkungan	Persentase jalan lingkungan tidak sesuai standar yang ditingkatkan Persentase jalan lingkungan rusak yang diperbaiki
54	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase ketersediaan fasilitas perhubungan
55	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Arus orang/barang melalui terminal
56	Program Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Utama (LPJU)	Persentase ketersediaan LPJU
57	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase fasilitas keselamatan perhubungan dalam kondisi baik Persentase terminal dengan fasilitas baik
58	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan lolos uji KIR
59	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase angkutan yang dibina Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum yang ditindaklanjuti



No	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja
60	Peningkatan Pelayanan perhubungan	Persentase pelayanan perhubungan
61	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase rencana rekayasa lalu lintas yang terealisasi
		Persentase area parkir tertata
62	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah rusak diperbaiki
		Persentase rumah MBR rusak yang diperbaiki
		Backlog kepemilikan
63	Program Lingkungan sehat perumahan	Persentase Penanganan Kumuh yang terakomodir
64	Program Peningkatan Pengelolaan Bangunan	Persentase bangunan rusak diperbaiki
		Persentase bangunan gedung yang diawasi
		Persentase daerah rawan memiliki bangunan pengendali bencana memadai
65	Program Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase bangunan rusak diperbaiki
66	Program Pemberdayaan jasa konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi
67	Program Perencanaan tata ruang	Persentase dokumen perencanaan ruang yang dipatuhi
68	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase bangunan liar yang ditertibkan
		Persentase kecamatan memiliki RBTH layak anak
69	Program Pengembangan jaringan telekomunikasi dan internet	Persentase ruang publik terlayani internet memadai
		Persentase OPD terlayani internet memadai
70	Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Rasio jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 30-5.000 liter pada WMK terhadap jumlah/luas pemukiman
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran
		Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standard kualifikasi
		Persentase evakuasi bahaya kebakaran
71	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase kelurahan tangguh bencana
72	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase bangunan terdampak bencana yang direhabilitasi
73	Program Kedaruratan dan Logistik Bencana	Persentase penyediaan peralatan dan bahan pangan tepat waktu
74	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Cakupan air limbah yang terkelola
		Indeks Pencemaran Udara



No	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja
75	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase penambahan luas RTH
76	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase peningkatan fasilitas pengurangan sampah
77	Program Peningkatan kinerja pengelolaan kebersihan pemukiman dan Kawasan wisata	Persentase Kawasan pemukiman yang memiliki sistem pengelolaan persampahan aktif
		Persentase Kawasan wisata yang memiliki sistem pengelolaan persampahan aktif
		Persentase warisan budaya yang dilestarikan
78	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase pencapaian SPM Pendidikan (kategori kualitas pendidikan)
		Persentase guru bersertifikat
79	Program Pendidikan Non Formal	Persentase siswa PKBM yang lulus
80	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Komite Sekolah Aktif
81	Program Wajib Belajar pendidikan dasar 9 tahun	Persentase lulusan yang memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
82	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rasio RKB-Murid
		Persentase ketersediaan fasilitas pembelajaran
83	Program Pengelolaan Budaya	Persentase budaya lokal yang mendapat pembinaan
84	Program Pengembangan nilai budaya	Persentase budaya lokal yang dikelola dengan baik
85	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase jenis-jenis budaya lokal yang dipromosikan
86	Program pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah kemitraan dalam pengelolaan kebudayaan
87	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan sekolah yang mendapat pembinaan
		Jumlah Kecamatan yang mempunyai Pojok baca
88	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan
		Persentase Kunjungan Ibu Nifas (KF3)
		Persentase Deteksi Dini Ibu Hamil Resiko Tinggi Oleh Tenaga Kesehatan



No	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja
		Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
		Cakupan Penanganan Komplikasi Obstetri Maternal
		Cakupan Penanganan Komplikasi Pada Ibu Hamil
		Persentase Kunjungan Ibu Hamil minimal 4 kali (K4)
89	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan imunisasi dasar lengkap
		Cakupan kunjungan Neonatus Lengkap
		Cakupan Pelayanan Neonatal Komplikasi
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
		Cakupan Penjaringan Siswa Sekolah Dasar
		Cakupan Penjaringan Siswa Sekolah Menengah Pertama
90	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase kasus filariasis yang ditangani
		Persentase Kesembuhan TB
		Persentase Penemuan Kasus TB
		Persentase Penemuan Kasus TB Anak 0 - 14 Tahun
		Skrining HIV di Populasi Kunci
		Persentase Ibu Hamil yang di Skrining HIV, Malaria, Hepatitis B
91	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Cakupan pelayanan orang dengan Diabetes Melitus
		Persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM Terpadu
		Persentase Usia produktif mendapatkan pelayanan sesuai standar
		Persentase Sekolah melaksanakan Kawasan Tanpa rokok
		Prevalensi Hypertensi pada usia diatas 15 tahun
		Prevalensi Merokok pada penduduk usia dibawah 18 tahun
		Persentase penemuan penderita gangguan jiwa
		Persentase penemuan penderita gangguan jiwa berat



No	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja
92	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar
		Persentase SDM yang terlatih
		Persentase fasilitasi kesehatan yang memenuhi standart
93	Program obat dan perbekalan kesehatan	Cakupan ketersediaan obat dan perbekes pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar
		Cakupan ketersediaan obat dan perbekes pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
94	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan kunjungan Neonatal pertama
95	Program Jemput sehat Warga	Persentase pelayanan yang diberikan terhadap permintaan pelayanan Jemput sakit pulang sehat
96	Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Cakupan Pelayanan Kesehatan dasar Pasien Masyarakat Miskin
97	Program Jaminan Kesehatan Nasional	Persentase Cakupan Peserta JKN
98	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase TPM memenuhi syarat Kesehatan
99	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Desa/Kelurahan UCI
100	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan lansia	Persentase peningkatan pelayanan lansia
		Persentase lansia yang mendapatkan pelayanan
		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Lanjut Usia
101	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Gizi buruk yang mendapatkan perawatan
102	Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Posyandu Aktif
		Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS
103	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Kelurahan STBM
		Cakupan penduduk dengan Akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas
104	Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Rasio sarana prasarana pelayanan kesehatan puskesmas yang baik



No	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja
105	Program Peningkatn sarana dan prasarana rumah sakit	Jumlah Gedung, alat kesehatan dan obat-obatan yang diadakan
106	Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD
107	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase kelompok olahraga terbina
108	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase fasilitas olahraga
109	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Cakupan Pembinaan olahraga
110	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Persentase Pemuda yang berpotensi dikembangkan
111	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase kelompok Pemuda Yang Terbina
112	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Pemuda yang berwirausaha
113	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah Pemuda Terbina
114	Program Keluarga Berencana (KB)	Cakupan akseptor KB Aktif
115	Program pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga	Persentase keluarga yang terbina
116	Program bina keluarga lansia	Persentase lansia mandiri
117	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesos	Jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
118	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesos	Jumlah lembaga kesos yang diberdayakan
119	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma	Jumlah Penyandang Disabilitas yang terbina
120	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah PMKS yang tertangani



No	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja
121	Program Pembinaan Eks Penyandang penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang terbina
122	Program Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah Anak terlantar yang dibina
123	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Jumlah TPU yang terkelola
124	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentasi kelurahan yang menerapkan TTG
		Persentasi LPM yang aktif
125	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Persentase OPD yang telah responsif gender
126	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan Anak	persentase lembaga yang ramah anak
127	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Cakupan kasus anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan
		Cakupan kasus perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan
128	Program Keserasian Kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	jumlah kebijakan tentang peningkatan kualitas anak dan perempuan yang disahkan
129	Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Persentase PKK aktif
130	Program Pemberdayaan Dharma Wanita dan GOW	Persentase DW aktif dalam pembangunan
		persentase GOW aktif dalam pembangunan
131	Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase peningkatan suplesi barang
		Persentase pedagang yang terlatih
132	Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase peningkatan pasar tertib ukur
133	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Persentase peningkatan kemudahan akses bantuan permodalan
		Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang dibina
134	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase pelaku IKM terlatih
135	Program Peningkatan kapasitas IPTEK	Persentase teknologi tepat guna yang diterapkan



No	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja
136	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif IKM	Persentase sentra IKM yang dikembangkan
137	Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase peningkatan kualitas manajemen produksi koperasi
138	Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Persentase peningkatan pemantauan koperasi dan UKM Persentase tenaga pendamping terlatih
139	Program Satu miliar satu kelurahan (Samisake)	Persentase peningkatan akses bantuan permodalan Samisake
140	Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM	Persentase sarana pemasaran UKM yang ber kondisi baik
141	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Persentase produk unggulan UKM yang dikembangkan
142	Program Pengembangan destinasi pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dikembangkan
143	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan media promosi wisata Jumlah penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
144	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase peningkatan mitra kerjasama pengembangan dan pemasaran wisata
145	Program Pengembangan perikanan tangkap	Persentase armada/kapal penangkap ikan yang ber kondisi baik Persentase sarana dan prasarana perikanan tangkap yang ber kondisi baik Persentase peningkatan SDM kelautan dan perikanan yang terampil Persentase Koperasi nelayan/KUB yang dapat di monitor (Berbadan Hukum) Persentase sarana prasarana TPI (tempat pelelangan ikan) yang ber kondisi Baik Persentase sarana prasarana pengawasan kelautan dan perikanan yang ber kondisi baik
146	Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang terampil Persentase SPDN (Solar Packet Dealer Nelayan)
147	Program Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pengendalian dan pendayagunaan sumber daya laut	Persentase wilayah terumbu karang yang dilindungi Persentase alat tangkap yang ber standar SNI Persentase kapal yang memiliki dokumen sesuai aturan



No	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja
		Persentase koperasi nelayan/KUB yang dapat di monitor
		Persentasi pelaku usaha kelautan dan perikanan yang paham terhadap peraturan perundang-undangan
148	Program Pengembangan budidaya perikanan	Persentase sarana dan prasarana BBI (Balai Benih Ikan) yang berkondisi baik
		Persentase sarana dan prasarana budidaya ikan yang berkondisi baik
		Persentase peningkatan akses bantuan permodalan
		Persentase budidaya ikan keramba yang berkembang
		Persentase pembudidaya ikan/UPR yang terampil
149	Program Pengembangan sistem penyuluhan kelautan dan perikanan	Persentase penyuluh perikanan bersertifikat
		Persentase sarana dan prasarana penyuluh perikanan
150	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Persentase pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang terampil
		Persentase inovasi strategi pengolahan dan pemasaran yang diterapkan
		Persentase peningkatan produksi olahan ikan
		Persentase sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran pasca panen hasil perikanan yang berkondisi baik
		Persentase Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memiliki izin produksi
151	Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Persentase peningkatan nilai investasi
152	Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Persentase peningkatan investor
153	Program Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Produksi padi
		Produksi ubi kayu
		Produksi jagung
		Produksi Ubi Jalar
		Penurunan tingkat serangan OPT
		Rehab jaringan irigasi tersier
		Fasilitasi permodalan usaha sektor pertanian
		Kelompok tani penggunaan alsintan pra panen sektor pertanian
		Kelompok tani pengguna pupuk bersubsidi



No	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja
154	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase standarisasi produk hasil olahan hasil pertanian
155	Program Peningkatan produksi hasil	Produksi daging sapi
		Produksi daging kambing
		Produksi daging ayam
156	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Persentase sertifikasi unit usaha
157	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase peningkatan pencegahan dan penanggulangan ternak
158	Program Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	Peningkatan kemampuan kelas kelompok tani kelas "lanjut"
159	Program Peningkatan ketahanan pangan	Ketersediaan pangan utama
		Stabilisasi harga pangan
		Peningkatan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat (Skor PPH Konsumsi)
		Persentase sertifikasi produk pangan segar asal tumbuhan
160	Program Peningkatan kesempatan kerja	Persentase peningkatan wirausaha di bidang pariwisata, industri dan jasa
161	Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja terlatih
		Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama
		Persentase kepersertaan pekerja dalam program Jaminan sosial ketenagakerjaan

Sumber : RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2019-2023

D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Tabel 1.8
Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen RKPD Kota Bengkulu

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah sekolah PAUD yang mengikuti pengembangan penyelenggaraan dalam rangka peningkatan pendidikan anak usia dini
2	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Tenaga Pendidik PAUD



No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
3	Bantuan Operasional Penunjang Pendidikan PAUDNI	Jumlah Peserta Didik PAUD Menerima Bantuan Penunjang Operasional Pendidikan Bagi Sekolah
4	Penyelenggaraan Ujian SD, SMP dan Paket Kesetaraan	jumlah peserta ujian SD, SMP dan Paket kesetaraan
5	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Tercapainya Peningkatan Kompetensi dan kreatifitas Peserta Didik SD dan SMP
6	Pengembangan kurikulum SD dan SMP	Jumlah Sekolah yang mengikuti pengembangan kurikulum
7	Manajemen Pengelolaan Beasiswa Miskin Dana APBN	Tercapainya Pengelolaan Beasiswa Miskin dana APBN yang tertib transparan dan Akuntabel
8	Pendukung Operasional Pendidikan	Tersedianya Dana Pendukung Operasional Pendidikan bagi Sekolah
9	Pengadaan mebeluer sekolah	Jumlah Meubeler Sekolah yang Baik
10	Penerimaan Siswa Baru	Jumlah Sekolah Menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru
11	Beasiswa Reward Bintang Pelajar	Jumlah Peserta Didik menerima Reward dan Beasiswa
12	Pengembangan dan pembinaan kesetaraan	jumlah sekolah kesetaraan / pendidikan non formal
13	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan	jumlah tenaga pendidik dan kependidikan untuk peningkatan kompetensi
14	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	Jumlah Sertifikasi Pendidik yang tertib transparan dan Akuntabel
15	Satuan Pendidikan Non Formal/ Sanggar Kegiatan Belajar Kota Bengkulu	Jumlah data sanggar kegiatan belajar kota dan Perpustakaan sekolah
16	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	jumlah data pendidikan
17	Pembinaan Pegawai (Guru, Tenaga Kependidikan dan Pegawai)	Guru, Tenaga kependidikan dan Pegawai
18	Peningkatan Nilai-nilai Kebangsaan	Jumlah Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah
19	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	jumlah warisan budaya tak benda
20	Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno	jumlah cagar budaya yang dilindungi dilestarikan dan kembangan
21	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah Festival Kesenian dan Kebudayaan daerah Bengkulu
22	Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	Jumlah Kerjasama kemitraan kekayaan Budaya



No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
23	Diklat Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan	Jumlah Peserta Diklat Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan
24	Bimtek Retribusi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Bimtek Retribusi Pelayanan Kesehatan
25	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Formal	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis dan Pelatihan Formal
26	Pendataan Keberadaan dan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Kota Bengkulu Tahun 2021	Jumlah Pendataan Keberadaan dan Kebutuhan Tenaga Kesehatan
27	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, Renja Perubahan, LKJIP, Laporan Tahunan (CALK) RKA, RKAP
28	Pengadaan Obat-obatan, dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Obat, Reagen dan BMHP, Alat tes Urine
29	Pemusnahan Obat Kadaluwarsa	Jumlah Pemusnahan Obat Kadaluwarsa
30	Penyediaan Biaya Operasioanal dan Pemeliharaan UPTD Farmasi	Operasional UPTD Farmasi
31	Peningkatan fasilitas dan kapasitas laboratorium kesehatan	Jumlah Pelayanan Laboratorium
32	Peningkatan Kapasitas Palang Merah Indonesia Kota Bengkulu	Jumlah Pelayanan PMI
33	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	Jumlah penerima BOK
34	Pelacakan kasus kematian maternal, neonatal, bayi dan balita	Jumlah Pelacakan kasus kematian maternal, neonatal, bayi dan balita
35	Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan serta Pengelola Obat Teladan TK Kota Bengkulu	Jumlah Tenaga Kesehatan Teladan serta Pengelola Obat Teladan TK Kota Bengkulu
36	Pengawasan, Pembinaan Sarana dan Pelayanan Hatra	Jumlah Pengawasan, Pembinaan Sarana dan Pelayanan Hatra
37	Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit dan Klinik di Kota Bengkulu	Jumlah Rumah Sakit dan Klinik di Kota Bengkulu
38	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas dan Klinik Pratama	Jumlah Puskesmas dan Klinik Pratama
39	Pembinaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	Jumlah Pembinaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
40	Pengadaaan Peralatan Kesehatan Klinik Pratama	Pengadaaan Peralatan Kesehatan Klinik Pratama



No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
41	Workshop Keamanan dan Kesehatan Makanan Bagi pemilik IRTTP dalam rangka SPPIRT	Jumlah Pelatihan Keamanan Pangan Dalam Rangka SPP-IRT Bagi pemilik IRTTP
42	Pembinaan dan Pengawasan Produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTTP)	Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTTP)
43	Pengembangan Media Promosi Kesehatan	Jumlah Media Promosi Kesehatan
44	Lomba Posyandu Tingkat Kota	Jumlah Posyandu
45	Penanggulangan Kurang Energi Protein (Gizi Buruk dan Gizi Kurang) Anemi Gizi Besi, dan Kurang Energi	Menurunnya Status Gizi Bayi/Balita Gizi Buruk, Gizi Kurang dan Ibu Hamil KEK
46	Pertemuan Orientasi Surveilans Gizi	Jumlah pertemuan orientasi Surveilans Gizi
47	Pertemuan percepatan penurunan Stunting	Jumlah Pertemuan percepatan penurunan Stunting
48	Lomba Balita Sehat	Jumlah Pemenang Balita Sehat
49	Pengkajian dan Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah sarana air minum yang dilakukan pengawasan Jumlah Fasilitas pelayanan Kesehatan yang di sosialisasi tentang penanganan limbah medis
50	Sosialisasi dan Pembinaan Forum Kota Sehat	Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan Forum Kota Sehat
51	Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan Kerja dan Olahraga
52	Fogging dan Pembasmian Sarang Nyamuk	Jumlah Fogging dan Pembasmian Sarang Nyamuk
53	Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Jumlah penemuan kasus potensial KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi
54	Peningkatan Kapasitas Surveilans dan Imunisasi	Jumlah Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Surveilans dan
55	Pelayanan dan Pencegahan Penularan Penyakit HIV/AIDS	Jumlah Penderita yang Mendapatkan Penanganan HIV/AIDS Jumlah Skrining HIV di Populasi Kunci Jumlah Ibu Hamil yang diskiring HIV, malaria dan hepatitis B
56	Pelayanan Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Tuberculosis/ TB Paru	Jumlah Penderita TB ditangani
57	Pelayanan penanggulangan dan pencegahan penyakit kusta dan Frambusia	Jumlah kasus kusta dan frambusia



No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
58	Pelayanan Penanggulangan dan pencegahan penyakit Filariasis dan Kecacingan	Jumlah orang yang diberikan obat
59	Pelayanan Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Gigitan Hewan Tertular Rabies (GHTR)	Jumlah Penyakit Gigitan Hewan Tertular Rabies (GHTR)
60	Pelayanan Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit DBD	Jumlah Pelayanan Penderita DBD
61	Pelayanan Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)	Jumlah Penderita ISPA
62	Pelayanan Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Malaria dalam Rangka Eleminasi Malaria	Angka API (Anual Paracit Insiden)
63	Pertemuan Pelayanan Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan (Diare, Thypoid dan Hepatitis)	Jumlah Pertemuan Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan (Diare, Tifoid dan Hepatitis)
64	Pelayanan Kesehatan haji	Jumlah Jama'a haji mendapatkan Pelayanan Kesehatan haji
65	Monitoring dan Evaluasi perizinan pada usaha/ sarana pelayanan kesehatan (optikal, toko alkes, laboratorium klinik umum pratama)	Jumlah Sarpras Pelayanan Kesehatan (Apotik, Toko Obat, Optik, IPAL dan Toko Alkes) yang memiliki izin
66	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Laporan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas
67	Pemutahiran Data Dasar Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang data dasarnya Update
68	Penyusunan SPM bidang kesehatan	Jumlah SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang dibuat
69	Pemuktahiran Data SDM di Sarana Kesehatan	Jumlah Data SDM di Sarana Kesehatan yang dilakukan pemuktahiran
		Jumlah Pertemuan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan
70	Survey Kelayakan Rekomendasi Perizinan Tenaga Kesehatan	Jumlah Survei Kelayakan Rekomendasi Perizinan Tenaga Kesehatan
71	Workshop Dan Pendampingan serta Penilaian Puskesmas BLUD	Jumlah Workshop Dan Monitoring Pelaksanaan Pendampingan Puskesmas BLUD
72	Workshop Validasi Data Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK)	Jumlah Workshop Validasi Data Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK)



No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
73	Pemeliharaan , Perbaikan, dan Pengujian Alat Kesehatan	Jumlah Alat yang dilakukan Pemeliharaan, Perbaikan, dan Pengujian Alat Kesehatan
74	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
75	Pertemuan Peningkatan Kapasitas Pengelolah Program Anak Dalam pemanfaatan Kohort Bayi, anak, balita dan pra sekolah	Jumlah Pertemuan Peningkatan Kapasitas Pengelolah Program Anak Dalam pemanfaatan Kohort Bayi, anak, balita dan pra sekolah
76	Rapat Koordinasi Program UKS	Jumlah Rapat Koordinasi Program UKS
77	Monitoring dan Evaluasi Program Anak	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Program Anak
78	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Neonatal esensial	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Neonatal esensial
79	Koordinasi Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	Jumlah Pertemuan Koordinasi Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia
80	Pembentukan Puskesmas Ramah Usila	Jumlah pertemuan Pembentukan Puskesmas Ramah Usila
81	Pertemuan ANC Terpadu	Jumlah Pertemuan ANC Terpadu
82	Sosialisasi pendampingan ibu hamil resiko tinggi dalam penggunaan Buku KIA dan Pasca salin dengan pelayanan darah pada sektor eksternal	Jumlah sosialisasi deteksi dini ibu hamil Resiko Tinggi
83	Pertemuan Managemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	Jumlah Pelatihan Managemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja
84	Penguatan dan pemanfaatan Buku Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Monev Kesehatan Ibu dan Anak
85	Jemput Sakit Pulang Sehat (JSPS)	Jumlah pelayanan kesehatan Masyarakat (JSPS)
86	Fasilitasi jaminan kesehatan masyarakat dan Jaminan Persalinan	Jumlah Fasilitasi jaminan kesehatan masyarakat dan Jaminan Persalinan (JamKeskot)
87	Pertemuan Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas di Kota Bengkulu	jumlah Pertemuan Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas di Kota Bengkulu
88	Jaminan Kesehatan Masyarakat-BPJS	Jumlah Jiwa Jaminan Kesehatan Masyarakat-BPJS
89	Pertemuan Pengelolah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas di Kota Bengkulu	Jumlah Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kepada Lintas Sektor dan Lintas Program



No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
90	Rapat Koordinasi Program PPTM dan Kesehatan Jiwa	Jumlah Rapat Koordinasi Program PPTM dan Kesehatan Jiwa
		Jumlah PKM yang Melaksanakan PPTM dan Keswa
91	Screening faktor resiko Penyakit Tidak	Jumlah Screening faktor resiko Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
92	Pelacakan dan Penjaringan Kasus Gangguan Jiwa dan Nafza	Jumlah kasus gangguan jiwa yang terlacak
93	Kampanye cerdas Penyakit tidak Menular (PTM) di Sekolah Kota Bengkulu	Jumlah Kampanye cerdas Penyakit tidak Menular (PTM) di Sekolah Kota Bengkulu
94	Upaya Pengendalian berhenti merokok	Jumlah Pertemuan LP/LS Kegiatan Perda KTR (Kawasan Tanpa Rokok)
		Jumlah yang di periksa Kadar CO (Karbon dioksida)
92	Pemeriksaan Kanker Serviks dan Payudara Pada Usia Produktif	Jumlah yang diperiksa Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) dan Klinik Breast Education (CBE)
96	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehatan
97	Renovasi Gedung Eks DPRD menjadi Ruang ICU, ICCU, Kamar Operasi	Jumlah Gedung
98	Pembangunan Ruang Perawatan Isolasi, Ruang Perawatan Cerebrovaskular Disease dan Gedung Parkir (KDP)	Jumlah Gedung
99	Penyediaan jasa pendukung administrasi/keamanan/teknis perkantoran	Jumlah jasa yang terbayar
100	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Jenis ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
101	Fasilitasi Penilaian Akreditasi Pelayanan Kesehatan RS	Jumlah SDM yang terlatih
		Jumlah fasilitas kesehatan yang memenuhi standar
102	Pelayanan dan pendukung Pelayanan	Jumlah pelayanan pendukung BLUD
103	Pembangunan dan Pemeliharaan jalan pusat pariwisata	Panjang jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan
		Jumlah Flyover yang dibangun
104	Rehabilitasi dan Peningkatan Jembatan (box culvert)	jumlah jembatan yang direhab dan ditingkatkan
		tersedianya Box Culvert yang direhab dan ditingkatkan



No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
105	Pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan nama jalan/jembatan	jumlah papan nama dan status jalan
		jumlah papan nama jalan/jembatan yang akan dipelihara
106	Pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan	jumlah sistem informasi database jalan/jembatan yang dikelola dan ditingkatkan
107	Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan trotoar	jumlah panjang trotoar yang dibangun
		jumlah panjang trotoar yang direhab dan dipelihara
		panjang drainase jalan dalam kota yang dibangun
		Panjang drainase jalan dalam kota yang direhab
108	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Jumlah pemeliharaan jalan secara berkala (Km)
109	Peningkatan Jalan Dalam Kota	Jumlah panjang jalan yang direhab dan ditingkatkan
	Pengadaan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Berat	jumlah alat berat yang diadakan
		Jumlah alat berat yang direhab dan dipelihara
110	Pembangunan/peningkatan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang drainase yang dibangun/ditingkatkan Skala Kota
111	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Drainase	Panjang drainase yang dipelihara secara berkala
112	rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Panjang fungsi jaringan irigasi yang telah terbangun dan terpelihara
113	Pembangunan dan Rehabilitasi pipa distribusi sarana dan prasarana air minum	Panjang pipa distribusi sarana dan prasarana air minum yang dibangun
		Panjang pipa distribusi sarana dan prasarana air minum yang dipelihara
		Jumlah SR yang dipasang
114	Penunjang Kegiatan Peningkatan kualitas permukiman dan sanitasi masyarakat	jumlah kawasan yang didampingi
115	Pengembangan sarana dan prasarana sanitasi	jumlah sarana dan prasarana sanitasi yang dikembangkan
116	Perencanaan pengembangan infrastruktur	jumlah dokumen perencanaan yang disusun
		Jumlah dokumen Invenstasi jangka menengah, Air Minum dan sanitasi
117	Pembangunan dan Pemeliharaan jalan lingkungan P2P	Jumlah jalan lingkungan yang ditingkatkan
		jumlah jalan lingkungan yang terpelihara (km)
118	Satgas Unit Reaksi Cepat	jumlah laporan penanganan perbaikan cepat infrastruktur dengan konstruksi sederhana



No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		Jumlah laporan penanganan perbaikan cepat sarana dan fasilitas umum dan sosial
119	Pemberdayaan pengguna penyedia jasa konstruksi (instansi pemerintah, orang perseorangan, badan usaha)	jumlah tenaga kerja konstruksi yang mendapatkan pelatihan Jumlah sosialisasi/desiminasi peraturan jakon
120	Pengawasan Konstruksi	jumlah bangunan konstruksi diawasi
121	Penyusunan kebijakan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Tersusunnya dokumen RDTR Tersusunnya peraturan-peraturan walikota terkait tata ruang
122	Survey dan pemetaan	Survey dan pemetaan bangunan yang ber IMB
123	Pembangunan RBTH disetiap kecamatan	jumlah RBTH yang dibangun disetiap kecamatan
124	Pengawasan dan Penertiban Bangunan dalam wilayah kota bengkulu	Jumlah Bangunan Liar yang tidak sesuai RTRW/RDTR jumlah kecamatan yang tersosialisasi
125	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen data pencapaian luasan kawasan kumuh yang disusun, Jumlah koordinasi Pokja PKP Jumlah Dokumen SIAP yang disusun Jumlah Kelurahan yang mendapatkan sosialisasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Sehat
126	Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Kumuh	Jumlah sarana dan prasarana air minum, septic tank individual, Panjang Jalan lingkungan bagi masyarakat di Permukiman Kumuh
127	Koordinasi dan NSPM terkait Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan Jumlah NSPM yang disusun
128	Penunjang pelaksanaan Peningkatan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Jumlah Rapat, Jumlah Dokumen Jumlah Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu yang difasilitasi
129	Penunjang Operasional dan Pemeliharaan Rusunawa dan Rumah Khusus Nelayan	Jumlah Rusunawa yang beroperasi Jumlah Rusus Nelayan yang dipelihara
130	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Jumlah Laporan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
131	Pelatihan pendidikan pertolongan dan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Pelatihan pendidikan pertolongan dan pencegahan bahaya kebakaran Jumlah personil pendidikan kualifikasi pemadam
132	Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran	Jumlah Peserta penyuluhan
133	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	jenis sarana dan prasarana
134	Peningkatan kemampuan tenaga Balakar	Jumlah tenaga balakar
135	Kegiatan HUT Damkar	Jumlah personil yang mengikuti HUT Damkar Tingkat Nasional Jumlah personil yang mengikuti HUT Damkar Tingkat Provinsi Jumlah personil yang mengikuti HUT Damkar Tingkat Kota
136	Peningkatan pelayanan dan pengendalian bahaya kebakaran	Jumlah rekomendasi Alat pemadam kebakaran
137	Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran/ Rekondisi armada pemadam	Jumlah armada yang di rekondisikan
138	Penyusunan dan pengumpulan data statistic daerah	tersedianya buku statistik daerah
139	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik sosial	tersedianya buku statistik sosial
140	Penyusunan dan Pengumpulan data dan statistik produksi	tersedianya buku statistik produksi
141	Penyusunan dan Pengumpulan data dan statistik distribusi	tersedianya buku statistik distribusi
142	Rapat Koordinasi data statistik sektoral Kota Bengkulu	Terselenggaranya RAKOR data statistik sektoral Kota Bengkulu
143	Penyusunan neraca statistik, analisis lintas sektoral, integrasi pengolahan dan diseminasi statistik	Tersedianya data neraca statistik, analisis lintas sektoral, integrasi pengolahan dan diseminasi statistik
144	Pelaksanaan pembinaan pengamanan lanjutan dan pengawasan terhadap sektoral dan integrasi pengolahan dan diseminasi statistik	Terlaksananya pembinaan pengamanan lanjutan dan pengawasan terhadap sektoral dan integrasi pengolahan dan diseminasi statistik
145	Pengendalian kegiatan neraca statistik, analisis statistik lintas sektoral dan integrasi pengolahan dan diseminasi statistik	Terlaksananya kegiatan neraca statistik, analisis statistik lintas sektoral dan integrasi pengolahan dan diseminasi statistik
146	Pengendalian kebijakan dan pelaksanaan jaringan komunikasi data	Tersedianya Website Dinas Statistik



No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
147	Forum Group Discussion Penyelarasan Data Statistik, Sosial, Produksi dan Distribusi	FGD
148	Pengendalian kegiatan neraca statistik, analisis statistik lintas sektoral dan integrasi pengolahan dan diseminasi staistik	Terselenggaranya kegiatan
149	Koordinasi Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Terselenggaranya kegiatan
150	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen	Terselenggaranya kegiatan
151	Penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD	Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang RKPD dan Forum OPD Jumlah Dokumen RKPD
152	Koordinas Tim Percepatan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan
153	Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan DAK 2019	Jumlah Laporan Monev dan Koordinasi DAK
154	Pengendalian Renja PD Kot Bengkulu	Jumlah Laporan Pengendalian dan Monev RKPD
155	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Aplikasi yang dikelola
156	Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Jumlah Laporan hasil pengendalian Program Bidang Ekonomi Jumlah PD yang program dan Kegiatanya di Verifikasi dan di Evaluasi Jumlah Dokumen Data Bidang Ekonomi
157	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Bidang PPM Jumlah Laporan hasil pengendalian program PPM Jumlah PD yang program dan Kegiatannya diverifikasi dan dievaluasi Jumlah Dokumen data bidang PPM
158	Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah Laporan hasil Koordinasi TKPKD Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut penanggulangan kemiskinan
159	kajian Pembangunan Kota Bengkulu	Jumlah Kajian Penelitian dan Pengembangan (Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Sosial dan Pemerintahan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)
160	Pemilihan dan Pembangunan Kampung Tematik Kota Bengkulu	Jumlah Kampung Tetamatik yang terbentuk



No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		Jumlah Kampung Tematik yang terbina
161	Pengembangan Kemitraan Jaringan Penelitian (JARLIT)	Jumlah Kemitraan Jaringan Penelitian
162	Penyusunan Road Map Sistem Inovasi (SiDa)	Persentase Tahapan pelaksanaan SiDa
163	Koordinasi Perencanaan Pembangunan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah rapat koordinasi
		jumlah data bidang insfrastruktur
		Jumlah Program dan Kegiatan yang telah di evaluasi
164	Koordinasi Penetapan RTRW	Jumlah Dokumen Koordinasi penetapan RTRW
165	Pengelolaan Media center	Jumlah Media Centre yang dikelola
166	Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Layanan PPID Kota Bengkulu yang dikelola
		Jumlah Aplikasi LAPOR SP4N Kota Bengkulu yang dikelola
167	Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Produk Informasi yang dapat diakses masyarakat
		Jumlah Penyelenggaraan Desiminasi Pengelolaan Informasi Pemerintah Daerah
		Jumlah Sarana Penyebarluasan Informasi
168	Pembangunan, Pengelolaan dan Pengembangan pusat ruang kendali informasi Pemerintah Kota Bengkulu	Jumlah Ruang Kendali Informasi yang dikelola
		Jumlah Server utama yang dikelola
		Jumlah Ruang Server
		Jumlah titik CCTV
169	Pembangunan dan Pengelolaan Televisi dan Radio Pemerintah Kota Bengkulu	Jumlah Televisi dan radio Yang dikelola Pemerintah Kota Bengkulu
170	Penyelenggaraan Jaringan Persandian	Jumlah Penyelenggaraan Jaringan Komunikasi Persandian
		Jumlah Peserta Yang mengikuti Sosialisasi Sertifikat dan Tanda Tangan Elektronik
		Jumlah OPD yang menggunakan Sertifikat Elektronik
171	Penyediaan dan Pengembangan layanan Aplikasi Teknologi Informatika dan Komunikasi	Jumlah website kota yang terpelihara,
		Jumlah OPD yang mengajukan pembuatan Website baru
		Jumlah Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan
		Jumlah kecamatan yang terlayani internet, internet satu pintu
		Jumlah OPD yang terlayani
		Jumlah server dan perlengkapannya untuk layanan e goverment



No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		jumlah dokumen yang tersusun
		Jumlah Video trone yang dibangun dan dikelola
172	Pengadaan,Pemasangan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah RPPJ
		Jumlah Rambu Lalu Lintas
		Jumlah Paku Marka
		Jumlah Marka Jlna
		Jumlah Zoss
		Jumlah Delinator
		Jumlah Gapura
		Jumlah Halte
173	Pengadaan dan Pemeliharaan APILL,Warning Light dan Lampu Pendistrian	Jumlah Warning Light
		Jumlah APILL
		Jumlah Pendistrian
174	Pembangunan dan Pemeliharaan Terminal Tipe C	JumlahTerminal Tipe C yang di bangun dan terpelihara
175	pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor	Jumlah Kelengkapan kendaraan Lulus Uji
		Jumlah Alat Uji dan Timbangan Fortable sesuai dengan ketentuan
		Jumlah Alat Uji yang terpelihara, terkalibrasi dan terakreditasi
		Persentase Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Umum yang ditindak lanjuti
		Jumlah Kendaraan Operasional
176	Operasi Penertiban dan Pengawasan Angkutan	Jumlah Sopir Angkot yang dibina
		Jumlah Operasi Penertiban dan Pengawasan Angkutan yang dilaksanakan
177	Operasional Kapal Pelayaran Rakyat	Jumlah Kapal yang tersedia
178	Peningkatan Sistem Perparkiran	Terlaksananya Uji Petik Parkir
		Jumlah Alat Parkir Elektronik
		Jumlah Kelengkapan Petugas Parkir
		Jumlah Simda Parkir
		Persentase Rencana Rekayasa lalu lintas terealisasi
179	Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Rekayasa Lalu Lintas yang disusun
180	Pemeliharaan LPJU	Jumlah Titik LPJU Yang terpelihara
181	Pengadaan LPJU	Jumlah Titik LPJU Yang terpasang
182	Pengadaan dan Pemeliharaan lampu Hias dan Lampu Taman	Jumlah lampu Hias dan Lampu Taman terpelihara
		Jumlah lampu dan Lampu Taman Hias yang terpasang



No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
183	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan agar terpenuhinya pelayanan pengangkutan persampahan di Kota Bengkulu
184	Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan	Peningkatan operasional kendaraan persampahan
185	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan
186	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
187	Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	Terpantaunya Pemantauan Kualitas Lingkungan untuk mendapatkan data IPA dan ISPU
188	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Pengusaha dan Pemrakarsa melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
189	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Terbentuknya Sekolah Adiwiyata di Kota Bengkulu
190	Peningkatan Kinerja Laboratorium Lingkungan	Berjalannya fungsi laboratorium dengan baik dalam melakukan uji kualitas lingkungan dan tercapainya akreditasi parameter uji
191	Pengendalian dan Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Usaha/kegiatan	Meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha/kegiatan yang ada di Kota Bengkulu dalam mengelola dan mengendalikan dampak lingkungan hidup sesuai standart baku mutu yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku
192	Penyusunan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung (DDDTLH) Kota Bengkulu	Adanya laporan penyusunan dokumen daya dukung daya tampung (DDDTLH) Kota Bengkulu
193	Pelayanan Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa lingkungan	Terlaksananya Pelayanan Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
194	Pengkajian Dampak Lingkungan	Jumlah dokumen aturan tentang pengaturan penapisan rencana usaha dan kegiatan wajib dokumen lingkungan hidup



No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
195	Penataan Ruang Terbuka Hijau	Tertatanya taman yang bersih, rapi dan indah sehingga enak dipandang dan dapat meningkatkan keindahan dan kesejukan yang ada di taman dan median jalan
196	Pengembangan Taman Rekreasi	Bertambahnya taman bermain anak dan rekreasi dalam Kota Bengkulu
197	Pendataan dan Perhitungan Kawasan RTH Kota Bengkulu	Terukurnya luas ruang terbuka hijau dalam Kota Bengkulu
198	Pengelolaan Kebersihan Kawasan Pemukiman dan Kawasan wisata	Jumlah Pengelolaan Kebersihan Kawasan Pemukiman dan Kawasan wisata
199	Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Persampahan	Terlaksananya penarikan retribusi persampahan sebagai peningkatan PAD
200	Lomba Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Bengkulu BISA)	Terlaksananya Lomba Kebersihan dan Keindahan Lingkungan
201	Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah dokumen pelayanan bidang PIAK
202	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah dokumen pelayanan adminduk
203	Penataan dan Registrasi Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen pelayanan bidang pencapil
204	Penyisiran dan perekaman keliling KTP- el	Jumlah perekaman keliling KTP-el
205	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah dokumen IKM
206	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Jumlah blanko kependudukan dan pencapil, tinta khusus ktp-el dan KIA, rakor, bimtek
207	Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Jumlah PD yang memanfaatkan data dukcapil dan jumlah inovasi
208	Sosialisasi dan Pembinaan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk#GISA	Jumlah kelurahan yang tertib adminduk
209	Persiapan standarisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Berstandar Internasional (ISO 9001/2015)	Sertifikat Pelayanan Adminduk berstandar Internasional (ISO 9001/2015)
210	Penyediaan jasa surat menyurat	materai 6000 materai 3000
211	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah kebutuhan sarana komunikasi, sumber daya air dan internet : (1) jaringan telpon (2) jaringan listrik
212	Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki



No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
213	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah tenaga jasa pelayanan kebersihan
214	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	jumlah unit kendaraan dinas operasional yang terpelihara dan jumlah pejabat eselon yang mendapatkan bantuan BBM
215	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ASN yang diberikan honorarium
216	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis kebutuhan ATK
217	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah cetak dan penggandaan
218	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang digunakan
219	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang akan dipenuhi
220	Penyediaan bahan bacaan peraturan per Undang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia
221	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu
222	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan
223	Penyediaan jasa pendukung administrasi/keamanan/teknis perkantoran	jumlah jasa tenaga pendukung teknis/adm perkantoran
224	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang terpelihara
225	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	jumlah dokumen yang disusun
226	Verifikasi dan validasi data kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang terdata
227	Operasional Bencana	Jenis bencana yang ditangani
228	Operasional Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pendamping Operator PKH	jumlah tenaga pendampingan pada Keluarga Miskin yang mendapat Program Keluarga Harapan dan terlatih
229	Rehabilitas PMKS	Jumlah PMKS yang direhabilitasi
230	Penyediaan alat bantu penyandang disabilitas	jumlah penyandang disabilitas yang menerima alat bantu
231	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas	jumlah peserta penyandang disabilitas yang mendapatkan pelatihan
232	Penanganan dan Penyuluhan dampak buruk korban penyalahgunaan NAPZA	jumlah penyandang eks penyakit sosial yang mendapatkan penanganan dan penyuluhan



No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
233	Pelestarian terhadap nilai-nilai kepahlawanan	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan penguatan nilai-nilai kepahlawanan
		Jumlah peserta ziarah wisata
234	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	jumlah SDM kesejahteraan sosial yang mengikuti kegiatan peningkatan kualitas
235	Pembinaan dan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual, anak jalanan dan ABH	jumlah anak korban kekerasan seksual, anak jalanan dan ABH yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan
236	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah TPU
237	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Paskibra	Jumlah Peserta Diklat Kepemimpinan Paskibra
238	Seleksi dan Pengiriman Jambore Pemuda Daerah Kota Bengkulu	Jumlah Peserta Jambore Pemuda Daerah
239	Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Bengkulu	Jumlah Peserta Pemuda Pelopor
240	Kota Layak Pemuda Kota Bengkulu	Tingkat Prestasi lomba kota layak pemuda
241	Penyelenggaraan Jambore Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak dan Pandega	Jumlah Peserta Jambore Daerah
242	Diklat Satgas Pramuka Peduli	Jumlah peserta satgas
243	Pendataan dan temu wicara organisasi pemuda	Jumlah peserta pemuda dalam organisasi pemuda
244	Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba/HIV/AIDS bagi Pemuda	Persentase pemahaman pemuda tentang bahaya narkoba
245	Pembuatan Dokumen Perencanaan Pembangunan GOR Tipe B	Jumlah dokumen (AMDAL/UKL-UPL/SPPL), FS dan DED
246	Pembuatan Dokumen Master Plan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah dokumen
247	Penyelenggaraan Pekan olahraga	Jumlah cabang olahraga PORPROV-POPDA
248	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Jumlah peserta cabang olahraga
249	Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi	Jumlah Atlet cabang olahraga yang dibina
250	Pembinaan dan Seleksi Atlet disabilitas	Jumlah atlet disabilitas
251	Pembinaan dan Seleksi Atlet Pondok Pesantren Daerah (Pospeda)	Jumlah atlet pesantren
252	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi (senam bugar) antar OPD/organisasi/ masyarakat	Jumlah Peserta senam



No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
253	Penyelenggaraan lomba olahraga rekreasi dan tradisional	Jumlah Peserta Lomba (panahan, gerak jalan, sepatu roda, terompah, engrang, hadang, sumpit, dan Run 10 K dan 5 K)
254	Tour The Bencoolen (Pendampingan kegiatan Provinsi)	Jumlah Peserta Lomba
255	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
256	Penyusunan Perencanaan tenaga kerja	Jumlah data tenaga kerja
257	Penyusunan Profil OPD	Jumlah Informasi tentang Ketenagakerjaan
258	Penyiapan tenaga kerja siap pakai/pemagangan	Jumlah tenaga kerja siap pakai/pemagangan
259	Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri	Jumlah Tenaga Kerja Mandiri terlatih
260	Pembinaan Hubungan Industrial Pancasila (Penyelesaian kasus, kepersertaan Jamsostek, Pembinaan persyaratan kerja dan monitoring perusahaan)	Jumlah laporan
		Jumlah perusahaan yang dibina
		Jumlah penyelesaian perselisihan
		Jumlah kepesertaan pekerja
261	Peningkatan kapasitas Dewan Pengupahan Kota Bengkulu	Jumlah Pertemuan Dewan Pengupahan Kota Bengkulu
262	Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja PD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD (Dokumen/Laporan)
263	Memfasilitasi anggota koperasi dalam Pameran Tingkat Nasional	Terlaksanakannya pameran tingkat nasional
264	Memfasilitasi peningkatan Kemitraan bagi UMKM	Diwujudkannya peningkatan Kemitraan bagi UKM
265	Memfasilitasi peningkatan Kemitraan bagi Anggota Koperasi	Terciptanya kemitraan usaha antar koperasi dan BUMN
266	Pendataan dan sosialisasi UMKMI	Dilaksanakannya pendataan UMKM
267	Penyelenggaraan promosi produk KUKM (Bazar Idul Fitri, Tabot, HUT Kota BKL & Batik Besurek, Bonsai dan Kuliner)	Dilaksanakannya pameran dalam rangka (Bazar Idul Fitri, Tabot, HUT Kota BKL & Batik Besurek Bonsai dan Kuliner)
268	Pembinaan Super Visi serta Monitoring dan Evaluasi bagi Koperasi perkotaan yang sudah menerima Bantuan Dana bergulir Bagi Koperasi	Meningkatnya monitoring dan evaluasi bagi koperasi penerima bantuan dana bergulir
269	pelatihan dan Pengembangan kewirausahaan Produk Unggulan Daerah KUKM	Dilaksanakannya efektif dan efisien pelatihan kewirausahaan KUKM
270	Pembinaan, Pengawasan dan pemberian penghargaan Kepada	Dilaksanakannya pembinaan, pengawasan kelembagaan dan penilaian koperasi



No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
	Koperasi Berprestasi	berprestasi
271	Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	Tersedianya manajemen teknologi koperasi
272	Penguatan kapasitas kelembagaan koperasi dan manajemen usaha	Meningkatnya kompetensi dan komitmen SDM Dalam Kelembagaan koperasi untuk pengembangan kinerja manajerial yang profesional sebagai outcomes koperasi
273	Penilaian kesehatan KSP/USP	Terlaksananya penilaian kesehatan 100 KSP/USP
274	Pemberdayaan anggota koperasi Melalui penguatan kapasitas kelembagaan& manajemen Keuangan Usaha	Validasi data koperasi yang akurat
275	Penguatan kapasitas lembaga keuangan mikro (LKM) pengelola Dana Bergulir Samisake	Terciptanya akuntabilitas laporan keuangan LKM Samisake serta operasional UPTD Samisake
276	Peningkatan Ormas yang aktif dalam pembangunan	Jumlah peserta kegiatan Pembinaan Penguatan Peran Serta Ormas dalam Pembangunan
277	Peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur Pancasila dan wawasan kebangsaan	Jumlah peserta solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat
		Jumlah peserta kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur Pancasila
		Jumlah peserta Bela negara bagi masyarakat
		Jumlah Pelaksanaan Upacara
278	Pelatihan Manajemen Organisasi Masyarakat.	Jumlah Ormas yang mendapatkan pelatihan.
279	Fasilitasi Tim Koordinasi Pakem	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan Tim Koordinasi Pakem
280	Fasilitasi FKUB dan Dewan Penasehat FKUB	Jumlah anggota FKUB dan Dewan Penasehat FKUB yang terfasilitasi
281	Fasilitasi TIM Terpadu Pengawasan Ormas Kota Bengkulu	Jumlah Anggota Tim Terpadu Pengawasan Ormas
282	Sosialisasi pelaksanaan pemilu.	jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi
283	Forum diskusi politik	jumlah peserta yang mengikuti forum diskusi politik
284	Pembinaan Bantuan Keuangan Partai Politik	jumlah parpol yang terbina
285	Pemantauan Pilkada tahun 2020	jumlah Pemantauan Pilkada Tahun 2020
286	Fasilitasi Tim Terpadu P4GN dan PN	Jumlah Personil Tim Terpadu P4GN dan PN serta Pemuda Yang Mengikuti Penyuluhan



No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
287	Pelatihan penyelesaian konflik Sosial Bagi Anggota FKDM.	Jumlah Tokoh Masyarakat yang dilatih penanganan Konflik Sosial.
288	Pembinaan FKDM	Jumlah Anggota FKDM yang mengikuti rapat koordinasi
289	Identifikasi, monitoring dan evaluasi konflik	Jumlah Identifikasi / Monev yang dilaksanakan
290	Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)	Jumlah rapat FORKOPIMDA
291	Fasilitasi cipta kondisi ketertiban dan keamanan masyarakat dan teritorial	Jumlah fasilitasi cipta kondisi oleh polri dan TNI
292	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah penertiban Jumlah pemantauan
293	Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah razia
294	Kerja sama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/Polri dan kejaksanaan	Jumlah kegiatan kerjasama
395	Stabilitas keamanan selama pemilu dan antisipasi unjuk rasa	Jumlah pengamanan
396	Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan keamanan	Jumlah Satlinmas Jumlah pos kamling terbaik Jumlah anggota linmas yang dilatih
397	Penyuluhan perda bagi masyarakat dan badan usaha	Jumlah peserta penyuluhan perda
398	Penyuluhan Pencegahan berkembangnya penyakit masyarakat (pekat)	Jumlah peserta penyuluhan miras dan narkoba
399	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat PPNS
400	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas
401	Pengadaan pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
402	Pengadaan pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
403	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen
404	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai
405	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik	Jumlah bulan pemakaian listrik dan internet
406	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jenis pemeliharaan, jumlah bbm



No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
407	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan dan aset
408	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki
409	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis atk
410	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan
411	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Jenis alat listrik
412	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
413	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar
414	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis makanan dan minuman untuk tamu, rapat dan kegiatan
415	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas
416	Penyediaan jasa pendukung administrasi/keamanan/teknis perkantoran	Jumlah tenaga kontrak
417	Penyediaan jasa asuransi jiwa dan kecelakaan non PNS	Jumlah tenaga kontrak
418	Fasilitasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Bengkulu	Tersedianya Dokumen LKJIP, Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bengkulu dan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu dan terlaksananya Sosialisasi LKJIP
419	Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Bengkulu	Jumlah dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bengkulu
420	Penyusunan Laporan Capaian Program/Kegiatan sekretariat Daerah Kota Bengkulu	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja program dan kegiatan
421	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan
422	Penyusunan Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bengkulu (TEPRA)	Jumlah dokumen Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bengkulu
423	Monitoring capaian kinerja pemerintah Kota Bengkulu	Jumlah laporan monitoring capaian kinerja
424	Pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah Kota Bengkulu	Jumlah dokumen pengendalian pembangunan
425	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)



No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
426	Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kota Bengkulu
427	Penyelenggaraan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	jumlah paket pengadaan barang/jasa
428	Bimtek Pengadaan barang/jasa Pemerintah	Jumlah Peserta Bimtek
429	Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (LPSE)	Jumlah layanan pengadaan secara elektronik
430	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan kegiatan pimpinan daerah	Jumlah Kerjasama dengan media
431	Dokumentasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumentasi dan Naskah Pidato Pemerintah Daerah
432	Fasilitasi Kerja sama	Jumlah naskah kesepahaman MOU Jumlah naskah perjanjian
433	Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama pemerintah kota bengkulu	Jumlah pertemuan Apeksi Jumlah pertemuan Forsesdasi
434	Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	Jumlah dokumen koordinasi dan fasilitasi
435	Pembinaan dan fasilitasi pertumbuhan ekonomi	Jumlah pembinaan dan fasilitasi
436	Fasilitasi dan pembinaan BUMD di Kota bengkulu	Jumlah seleksi penerimaan dan evaluasi BUMD
437	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi
438	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu	Jumlah draf perwal penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu
439	Sosialisasi Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu	Jumlah Sosialisasi Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu
440	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelayanan publik
441	Sosialisasi Kebijakan Tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Sosialisasi Kebijakan Tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik
442	Perumusan Pelaksanaan Kegiatan PATEN (Penyelenggaraan Administrasi Terpadu di Kecamatan) dan monitoring evaluasi kecamatan Kota Bengkulu	Terlaksananya Tertib administrasi wilayah kelurahan dan kecamatan dalam Kota Bengkulu yang dituangkan dalam peta batas kelurahan dan kecamatan.
443	Fasilitasi usaha kesehatan sekolah	Jumlah fasilitasi



No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
	tingkat Tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK Se-Kota Bengkulu	
444	Pemberdayaan BAZNAS Kota Bengkulu	Jumlah pertemuan
445	Penyusunan standar pelayanan minimal	Jumlah laporan standar pelayanan minimal
446	Pelayanan dan Penyediaan Acara Bidang Keprotokolan	Jumlah Pelayanan Bidang Protokol
447	Pelatihan Keprotokolan	Jumlah Pelatihan Keprotokolan
448	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/Departemen /Lembaga Pemerintah non Departemen/luar negeri	Jumlah penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri
449	Pendampingan Kegiatan Rohani Kepala Daerah	Jumlah pendampingan kerohanian
450	MTQ Nasional	Lomba MTQ nasional
451	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah
452	Penyelenggaraan Kegiatan Hari-hari Besar Nasional dan Event Lainnya	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan
453	Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan KDH dan WKDH	Jumlah penyediaan jasa kebersihan rumah jabatan KDH dan WKDH
454	Pelayanan dan Penyediaan Kebutuhan tangga KDH dan WKDH	Jumlah pelayanan dan penyediaan kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH
455	Rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	Jumlah rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
456	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Jumlah koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
457	Penyusunan dan legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan
		Jumlah perda yang disahkan oleh DPRD
458	Pendampingan dan Bantuan Hukum Pemerintah Kota Bengkulu	jumlah pendampingan dan bantuan Hukum Pemkot Bengkulu
459	Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	Jumlah fasilitasi
460	Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Pembinaan Keluarga Sadar Hukum	Jumlah pembentukan dan pembinaan kadarkum
461	Penyuluhan Hukum	Jumlah peserta penyuluhan hukum



No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
462	Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Jumlah dokumen dan informasi hukum
463	Evaluasi dan Telaah Produk Hukum Daerah	Jumlah evaluasi dan produk hukum daerah
464	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta Bimtek
465	Pensertifikatan dan pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan dan Kepentingan Umum	Jumlah sertifikat
		Jumlah pengadaan
466	Penataan Batas Wilayah Kecamatan/Kelurahan dalam Kota	Jumlah peta batas wilayah
467	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Jumlah konflik pertanahan
468	Penguatan Personil/Organisasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah aparatur pengadaan barang dan jasa yang permanen/fungsional
469	Fasilitasi kegiatan keolahragaan	Jumlah Fasilitasi
470	Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Staf Ahli Setda Kota Bengkulu	Jumlah bimbingan teknis
471	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan
472	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Gas Rumah Jabatan KDH dan WKDH	jumlah jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
473	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan operasional
474	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa adminstasri keuangan
475	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan kantor
476	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Jumlah Perbaikan peralatan kerja
477	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK
478	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan
479	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi Listrik yang Memadai
480	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor
481	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah



No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
	dan Luar Negeri	
482	Penyediaan Jasa Pendukung Adminitrasi/Keamanan/Teknis Perkantoran	Jumlah honorer untuk administrasi/keamanan/teknis perkantoran
483	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas dan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas dan Gedung Kantor
484	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas dan Gedung Kantor	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas dan Gedung Kantor
485	Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah jabatan dan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
486	Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor	Jumlah jasa sewa gedung kantor
487	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas
488	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Tersedianya pakaian olah raga
489	Pengadaan Pakaian Batik Tradisional	Jumlah Pakaian Batik Tradisional
490	Pengadaan Pakaian Dinas Harian beserta atributnya	Jumlah Pakaian Dinas Harian beserta atributnya
491	Pengadaan Pakaian Sipil Lengkap	Jumlah Pakaian Sipil Lengkap
492	Pengadaan Pakaian Sipil Resmi	Jumlah Pakaian Sipil Resmi
493	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa surat menyurat
494	Penyediaan Jasa Komunikasi Air dan listrik	Jumlah Telpn 4 unit Spedy 7 unit kantor, 3 unit rumah dinas listrik 3 sambungan
495	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sewa Tempat, Kursi
496	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas
497	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi keuangan
498	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Peralatan kebersihan dan Pembersih
499	Penyediaan Jasa Perbaikan Kantor	Jumlah peralatan Kerja yang diperbaiki
450	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah alat tulis kantor
451	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan , jumlah buku
452	Penyediaan Jasa Komponen Listrik	JumlahAlat listrik
453	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan



No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
454	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Logistik kantor dan rumah dinas Pimpinan
455	Penyediaan Makan Minum	Jumlah makan minum
456	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
457	Penyediaan Jasa Pendukung Adminitrasi/Keamanan/Teknis perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung administrasi teknis perkantoran, Cleaning service Kantor dan Rumah Dinas ,Petugas Keamanan Kantor dan Rumah Dinas
458	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan non PNS	jumlah jaminan kesehatan Pimpinan dan anggota DPRD
459	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan rumah dinas
460	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor
461	Pemeliharaan Rutin	Jumlah rumah Dinas Pimpinan DPRD
462	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor
463	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlangkapan	Jumlah pakaian dinas
464	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundangan	Jumlah aparatur.pegawai mengikuti pelatihan Non Formal
465	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Jumlah Pelaksanaan
466	Penyusunan laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan laporan
467	Pembahasan Rancangan Peraturan-Daerah	Jumlah Raperda yang dihasilkan
468	Fasilitasi DPRD	Jumlah Fasilitasi DPRD
469	Kegiatan Reses	Jumlah kegiatan reses
470	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Bintek Pimpinan dan Anggota DPRD
471	Pendampingan dan Pelayanan Kegiatan DPRD	Jumlah pendampingan anggota DPRD
472	Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD Keluar Daearah	Terlaksananya masukan-masukan dari luar
473	Sosialisasi dan Publikasi	Jumlah Sosialisasi dan Publikasi
474	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Adanya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
475	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Adanya laporan keuangan akhir tahun
476	Penyusunan Sistem dan Prosedur keuangan daerah	Jumlah Sisdur Pengelolaan keuangan Daerah



No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
477	Penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD	Laporan (Neraca,LRA,Laporan Oprasional,Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Saldo Anggaran (LPSAL) Catatan atas Laporan Keuangan
478	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan daerah dan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Pengelolaan Keuangan Daerah yang Memiliki Kopetensi mengelola keuangan sasusi Regulasi
479	Pengembangan Sistem Manajemen Perbendaharaan Keuangan Daerah	Jumlah SP2D Belanja Langsung dan tidak langsung yang terbit
480	Implementasi SIMDA Keuangan (SKPKD) dan Pendampingan teknis komputerisasi SIMDA keuangan di OPD	Sistem Aplikasi dan pendampingan teknis implemntasi Simda keuangan
481	Pengembangan Sistem Simda Keuangan dan Pemuktakhiran data Gaji PN	616 daftar gaji dari 42 OPD
482	Pengelolaan Hibah Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan dan belanja tak terduga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Belanja Hibah,Belanja bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak terduga
483	Pengelolaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan pembayaran Daerah dan Satu Sistem Aplikasi Pembayaran Daerah
484	Rekonsiliasi laporan realisasi anggaran (LRA)	41 OPD yang melakukan rekon, 4 laporan realisasi anggaran OPD
485	Pengembangan Sistem manajemen kas daerah	Sinkronisasi kas di Bank dan di BUD Jumlah data dan Pengarsipan Bukti STS ke kas daerah dari 41 OPD,12 OPD yang Melakukan Rekon
486	Pengelolaan Sitem Perencanaan dan Penganggaran	Pelaksanaan sistem <i>e-budgeting</i> secara online
487	Peningkatan Kapasitas Daerah(SIMDA) atas SISTEM Implementasi Kaungan Anggaran	Aplikasi SIMDA Anggaran (41 OPD)
488	Penyusunan Rancangan APBD	Adanya rancangan peraturan daerah tentang APBD
489	Penyusunan Rancangan Perubahan APBD	Adanya rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
490	Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
491	Penyusunan Pedoman Penyusunan APBD dan standar biaya umum	Jumlah Dokumen pedoman penyusunan Anggaran



No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
492	Penyusunan laporan pengelolaan barang milik daerah	Jumlah laporan semesteran dan laporan tahunan BMD dan laporan tahunan BMD 41 OPD
493	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Standar Satuan Harga	41 OPD yang menyusun Laporan BMD tepat waktu dan Terverifikasi
494	Pelelangan/ Penghapusan barang-barang inventaris	OPD membuat usulan penghapusan barang-barang inventaris dari masing masing OPD
495	Pengelolaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Dilaksanakannya Pengelolaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran
496	Pelelangan/Penghapusan Barang-barang Inventaris	Dilaksanakan pelelangan/penghapusan barang-barang inventaris
497	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan paket pengiriman yang di belanjakan
498	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan : Jaringan listrik, internet, telepon, TV Kabel
499	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pembayaran STNK dan Pajak RD 4, RD 2, jumlah servis, penggantian suku cadang RD 4, RD 2
500	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah dan jenis honorarium yang dibayarkan
501	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan
502	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Printer, Laptop, PC, AC dan Meubeler yang di service
503	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang digunakan
504	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah/Jenis Cetakan dan Jumlah Penggandaan
505	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik yang dipergunakan
506	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan alat pembersih yang dibutuhkan, dan peralatan kantor yang dibutuhkan
507	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran dan majalah yang tersedia
508	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah dan jenis makan dan minuman dalam 1 tahun
509	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bidang yang melakukan perjalanan dinas dalam 1 tahun
510	Penyediaan jasa pendukung administrasi/keamanan/teknis perkantoran	Jumlah tenaga pendukung teknis/adm perkantoran
511	Penyediaan Jasa Promosi dan Publikasi	Jumlah Iklan Media Elektronik dan Media Cetak
512	Implementasi Sistem Informasi Pajak	Jumlah sistem aplikasi pajak daerah



No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
	Daerah	
513	Penagihan, Pembinaan dan Penertiban Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penagihan, pembinaan dan penertiban pajak daerah
514	Pendataan, Penerbitan dan Penyampaian Formulir Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pendataan, penerbitan dan penyampaian Formulir Pajak daerah
515	Pendataan, Penagihan dan Rekonsiliasi Retribusi Daerah	Jumlah dokumen hasil pendataan, penagihan dan Rekonsiliasi Retribusi
516	Pendampingan Dana Alokasi Khusus	Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan
517	Pendataan, Penagihan dan Monev Pendapatan lain-lain yang sah	Jumlah dokumen hasil pendataan, penagihan dan monev pendapatan lain-lain yang sah
518	Verifikasi, Penghapusan dan Pemutakhiran data obyek dan subyek PBB	Jumlah dokumen hasil Verifikasi, penghapusan dan Pemutakhiran data obyek dan subyek PBB
519	Pelaksanaan Pendistribusian SPPT dan Penagihan PBB dan BPHTB	Jumlah SPPT yang disampaikan, jumlah dokumen hasil penagihan PBB dan BPHTB, jumlah sosialisasi dan monev yang dilaksanakan
520	Implementasi Sismiop PBB dan BPHTB	Jumlah sistem aplikasi sismiop
521	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan OPD	Jumlah dokumen perencanaan OPD
		Jumlah Monev Anggaran
		Jumlah dok renstra/renja
		Jumlah dok SIPD
		Jumlah laporan LKJiP
		Jumlah laporan Keuangan
		Jumlah laporan Realisasi anggaran
		Jumlah laporan. RKA dan RKA
		Jumlah laporan Pergeseran anggaran
		Jumlah laporan LPPD
522	Penyusunan ikhtisar laporan hasil pemeriksaan APIP	jumlah LHP
523	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah LHP
		Jumlah LH Asistensi LK-OPD
		Jumlah LH Asistensi Pra LKPD
		Jumlah LH Bimtek Keuangan/barang BJ
		Jumlah LHP Audit Kinerja
		Jumlah LHP Audit Kepatuhan
		Jumlah LH Bimtek Dana BOS
		Jumlah LHP Audit Dana BOS
		Jumlah LHP Probity Audit
		Jumlah LH Bimtek dan Konsultasi BJ



No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		Jumlah LH Evaluasi
		Jumlah LH Pengawasan Lainnya
		Jumlah LH Bimtek/Workshop/FGD/Sosialisasi
524	Reviu Penyerapan anggaran dan Pengadaan barang dan Jasa dan Reviu DAK	Jumlah LH reviu Penyerapan Anggaran Pengadaan BJ
		Jumlah LH reviu DAK
525	Reviu RPJMD , Renstra -OPD dan RKPD/Renja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan LPPD	Jumlah laporan reviu
		Jumlah LHE SAKIP OPD
		Jumlah LHR LKJIP Kota
		Jumlah LHR RPJMD
		Jumlah LHR Renstra
		Jumlah LHR RKPD
		Jumlah LHR LPPD
		Jumlah LH Penilaian LPPD dan SAKIP Award
526	Koordinasi Fasilitasi Peningkatan SAKIP dan Asistensi LPPD daerah Kota Bengkulu	Jumlah LH Rakor dan TL Peningkatan SAKIP
		Jumlah LHA LKJIP Pemkot
		Jumlah LH Asistensi LPPD
527	Pemantauan Pelayanan Yang Bebas pungutan Liar	Jumlah Laporan
		Jumlah LH Sosialisasi
		Jumlah LH Evaluasi
		Jumlah LHP Pungli
528	Evaluasi dan penilaian kualitas Pelayanan Publik	Jumlah LHE Pelayanan Publik
		Jumlah LH Sosialisasi
529	Sistem Pengendalian dan Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah LHA RR
		Jumlah LHA SPIP
		Jumlah LHE SPIP
		a) LHP BPK RI.
		b) LHP Inspektorat Provinsi
		c) LHP Inspektorat Kota
		Ketaatan para Wajib LHKPN dalam menyampaikan laporan harta kekayaan
		Persentase Capaian MCP Renaksi KPK
530	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan dan Peningkatan SIMHP	Jumlah Laporan Hasil Tindak Lanjut
		Jumlah LHTL BPKRI
		Jumlah LHTL Itjen
		Jumlah LHTL Inspektorat Provinsi
		Jumlah LHTL Inspektorat Kota
		Jumlah LH Fasilitasi
		Jumlah LH SIMHP
531	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Penilaian Mandiri RB
		Jumlah LHA Pelaksanaan RB



No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		Jumlah LH Evaluasi RB
		Jumlah LH Monitoring LHKPN
		Jumlah LHM Zona Integritas
532	Reviu RKA OPD dan DPA pergeseran dan LKPD	Jumlah LHR RKAP 2020
		Jumlah LHR RKA 2021
		Jumlah LHR DPA Pergesiran
		Jumlah LHR LKPD
534	Penanganan kasus pengaduan dan koordinasi dengan APH	Jumlah Pengaduan yang di TL dan Rakor dengan APH
		Jumlah Kasus yang diperiksa
		Jumlah Rakor dengan APH
535	Sosialisasi Pencegahan KKN, Fasilitasi Renaksi KPK dan Pelaksanaan Survei Integritas	Jumlah LH Penyuluhan Hukum/LHR MCPKPK/ SPI KPK
		Jumlah LH Penyuluhan Hukum
		Jumlah LH Renaksi MCP KPK
		Jumlah Kegiatan SPI KPK
536	Peningkatan Kapabilitas APIP	Jumlah Laporan evaluasi dan monitoring
537	Pelatihan pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dan Penilaian Angka Kredit Jabatan fungsional P2UPD/ Auditor	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan PAK JFT
		Jumlah Diklat Substantif/Teknis
		Jumlah Diklat Pembentukan dan jenjang
		Jumlah PAK Jabatan Fungsional Tertentu
538	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, KORPRI, Khusus Hari- hari Tertentu dan olahraga	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
539	Peningkatan Budaya Kerja dan organisasi	Jumlah Pembinaan Budaya Kerja dan Organisasi
		Jumlah Pelaksanaan Pembentukan Karakter teladan
		Jumlah Pelaksanaan ceramah dhuha
		Jumlah Pelaksanaan senam pagi
		Jumlah ASN mengikuti <i>Outbond/Family Gathering</i>
540	Pembinaan Keagamaan di kecamatan	Jumlah pengajian BKMT di fasilitasi
		jumlah safari religi yang dilakukan,
		Jumlah lomba MTQ dan pawai mobil hias yang diikuti,
		jumlah guru ngaji, dai dan daiyah yang dibina
		Jumlah imam , khatib, bilal, gharim, rubiyah yang di bina,
		Jumlah pengurus masjid dan risma di bina
541	Pembinaan Kemasyarakatan dan Pembangunan di kecamatan	Jumlah Pembinaan GSI yang di selenggarakan,
		Jumlah Pembinaan Poskamling yang dilakukan,



No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		Jumlah lembaga Kemasyarakatan yang di bina
		jumlah pembinaan kota sehat Yang dilakukan
		jumlah sosialisasi yang di lakukan ke masyarakat
		jumlah BBGRM yang di selenggarakan
		Jumlah kegiatan penunjang yang dilaksanakan dalam penilaian Adipura
		JumlahPembinaan Lembaga Kemasyarakatan yang dibina
542	Penyelenggaraan Musrembang kecamatan	jumlah musrembang Kecamatan
543	Peningkatan dan pemberdayan TP-PKK	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina
544	Penyelenggaraan Administrasi pemerintahan kelurahan	Jumlah pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi pemerintahan kelurahan
545	pembinaan dan fasilitas LPM Kelurahan	Jumlah LPM yang di bina dan di fasilitasi
546	pemberdayaan Kesejahteraan keluarga kelurahan	Jumlah pelaksanaan Kegiatan operaasional TP- PKK
547	Pembinaan dan fasilitasi lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	jumlah LPM yang dibina dan difasilitasi kelurahan
548	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan dan Penambahan Daya
549	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat Kabar yang Tersedia setiap bulannya
550	Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia
551	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan
552	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Keamanan/Teknis Perkantoran	Jumlah Pegawai Tidak Tetap yang di Pekerjaan
553	Pemeliharaan Rutin Berkala Meubeler	Jumlah Meubeler yang terpelihara
554	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor Terpelihara
555	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional
556	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Aparatur/PTT yang mendapatkan seragam Batik
557	Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana	Jumlah Kelurahan tangguh bencana yang dibentuk
558	Peningkatan Layanan Informasi Kebencanaan Daerah	Jumlah Rambu, Informasi Kebencanaan yang disampaikan kepada masyarakat dan



No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		Peta Resiko Bencana yang dimukhtahirkan
559	Inventarisasi, verifikasi dan validasi data kerusakan akibat bencana	Jumlah Dokumen data kerusakan akibat bencana dan Jumlah Peserta bimtek penilaian kerusakan akibat bencana
560	Rehabilitasi bangunan yang terdampak bencana	Presentase bangunan yang terdampak bencana direhab/perbaiki
561	Pemulihan mental pasca bencana	Jumlah kegiatan Pemulihan mental pasca bencana yang dilakukan dan Jumlah Tenaga Rehabilitasi mental yang terlatih
562	Penguatan Satgas Penanggulangan Bencana	Jumlah Satgas Penanggulangan Bencana yang terlatih
563	Penguatan Pusdalops PB Kota	Jumlah Pusdalops PB Kota Bengkulu yang beroperasi
564	Pengadaan <i>Buffer Stock</i> dan Logistik bencana	Presentase Buffer Stock dan logistik Bencana yang tersedia
565	Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kebencanaan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kebencanaan yang tersedia dan dipelihara
566	Simulasi Bencana Kota Bengkulu	Jumlah Simulasi Bencana dilakukan
567	Sosialisasi pelayanan perizinan terpadu	Jumlah peserta sosialisasi
568	Penyusunan SKM	Nilai IKM
569	Pelayanan perizinan keliling	Jumlah lokasi dan gerai pelayanan perizinan dan non perizinan keliling
570	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah aplikasi perizinan
		Jumlah tenaga programmer
		Persentase pemenuhan sarana prasarana MPP
571	Pelaksanaan promosi investasi daerah	Jumlah pelaksanaan promosi investasi daerah
		Persentase pemenuhan sarana prasarana promosi
572	Pengembangan potensi unggulan daerah	Jumlah dokumen potensi unggulan daerah, perkembangan penanaman modal, potensi unggulan daerah
573	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PM	Jumlah kunjungan pemantauan Investor PMA dan PMDN
		Jumlah kemitraaan usaha
574	peringatan hari keluarga nasional	Terlaksananya peringatan hari keluarga nasional
575	pelayanan tim KB keliling melalui mobil pelayanan	Terlaksananya pelayanan tim KB keliling melalui mobil pelayanan
576	pertemuan pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi kepada PUS	jumlah peserta pertemuan pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi kepada PUS
577	pertemuan medis teknis	Meningkatnya pelayanan KB berkualitas



No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
578	pelayanan KIE	Terlaksananya pelayanan KIE KKBPK
579	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Terlaksananya kegiatan Keluarga Berencana
580	Pengadaan Sarana dan Prasarana Klinik Pelayanan KB	Pengadaan Sarana dan Prasarana Klinik Pelayanan KB
581	Pembinaan Keluarga berencana, Kampung KB dan Kampung Sejahtera	Terbinanya Keluarga berencana, Kampung KB dan Kampung Sejahtera
582	Sosialisasi dan desiminasi kebijakan dan strategi pengendalian penduduk	terlaksananya koordinasi kebijakan dan strategi pengendalian penduduk
583	penyusunan rencana aksi daerah grand ke penduduk	Tersusunanya rencana aksi daerah grand kependudukan
584	Rakorda Tk. Kota Bkl	Terlaksananya Rakorda Tk. Kota Bkl
585	Fasilitas pembinaan kelompok Masyarakat Peduli KB	Terfasilitasinya Pembentukan kelompok Masyarakat Peduli KB
587	fasilitasi Forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah	Tersedianya konselor sebaya kelompok PIK KRR di luar sekolah
588	Pelayanan tim KB keliling TNI manunggal dan PKK KB kesehatan	Terlaksananya kegiatan Pelayanan tim KB keliling TNI manunggal dan PKK KB
589	Penguatan IMP institusi masyarakat perkotaan	1300 kader IMP
590	Promosi generasi berencana (genre di sekolah, kampus dan kampung keluarga berencana)	Terselenggaranya Promosi generasi berencana (genre di sekolah, kampus dan kampung keluarga berencana)
591	Pertemuan Teknis PPLKB	Terlaksananya Pertemuan PLKB
592	Bimbingan, pembinaan dan pengawasan PLKB dan kader	Terlaksananya Bintek dan monitoring Terhadap PKB dan Kader KB
593	pemilihan duta GENRE Tk. Kota Bkl	Terlaksananya pemilihan Duta Genre Tk. Kota Bengkulu
594	Pembinaan pengembangan UPPKS	Meningkatnya Kemampuan Pengelola dan Kader dalam pendampingan
595	Pembinaan Kelompok Ketahann Bina Keluarga Balita holistik integratif (BKB, posyandu, paud)	Meningkatnya Kemampuan Pengelola dan Kader dalam pendampingan Kelompok BKB
596	pertemuan pembinaan pengembangan bina keluarga remaja (BKR)	terlaksananya pertemuan pembinaan pengembangan bina keluarga remaja (BKR)
597	pertemuan pembinaan pengembangan bina keluarga lansia (BKL)	Terlaksananya pertemuan pembinaan pengembangan bina keluarga lansia (BKL)
598	Gelar teknologi tepat guna nasional	Terlaksananya Gelar teknologi tepat guna nasional
599	Pembuatan buku profil kelurahan tingkat kota bengkulu	Terlaksananya Pembuatan buku profil kelurahan tingkat kota bengkulu



No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
600	Lomba kelurahan Tingkat Kota Bkl	Terlaksananya Lomba kelurahan Tingkat Kota Bengkulu
601	Lomba kelurahan Tingkat Propinsi Bengkulu	Terlaksananya Lomba kelurahan Tingkat Propinsi Bengkulu
602	Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)
603	pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Terlaksananya pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
604	Penilaian gerakan sayang ibu (GSI) Tk. Kota Bengkulu	Terpilainya kecamatan terbaik melaksanakan GSI
605	pembinaan dan koordinasi GSI Tk. Kota dan Tk. Kecamatan	Terbina dan koordinasi GSI Tk. Kota dan Tk. Kecamatan
606	pengembangan PATBM Tk. Kelurahan	Terlaksananya pengembangan PATBM Tk. Kelurahan
607	Pelatihan pembinaan informasi dan evaluasi pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)	Terlaksananya Pelatihan pembinaan informasi dan evaluasi pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)
608	Pengembangan Forum Data Anak dan Data Penyelia Layanan Ramah Anak	Tersedianya data Forum anak dan data lembaga Penyelia layanan ramah anak Kota Bengkulu
609	Pendampingan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di P2TP2A	Jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak yang didampingi P2TP2A
610	Koordinasi Forum Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (FP3A) Kota Bengkulu	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak
611	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Terwujudnya Kota Bengkulu yang responsif gender
612	Advokasi dan konseling KDRT di P2TP2A	Terdampingnya korban TKTPA dalam penstabilan kondisinya
613	Operasional UPTD P2TP2A	Tersedianya dana operasional UPTD P2TP2A
614	Penyusunan Profil PUG	Meningkatnya pengetahuan perempuan terhadap tindak kekerasan
615	Pemberdayaan tim Penanggulangan Tindak kekerasan, Perlindungan Perempuan dan Anak target kota, kelurahan dan kecamatan	Menurunnya jumlah kekerasan terhadap perempuan khususnya di rumah tangga
616	pelibatan masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak melalui satgas PPA	Tersedianya online pengaduan masyarakat dan bersinerginya seluruh stake holder yang terkait dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak melalui satgas sebagai ujung tombak



No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
617	Pendampingan kelembaga layanan, layanan shelter, penguatan psikologis korban dan mediasi	Tersedianya layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
618	Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah anak yang mengikuti pertemuan jambore perlindungan anak tingkat kota
619	Peringatan hari Anak Nasional	Terlaksananya Hari Anak Nasional
620	Peningkatan kelembagaan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	Jumlah lembaga yang menaungi (P2TP2A)
621	Fasilitasi tim penggerak PKK	Terpenuhinya fasilitasi TP.PKK Kota Bkl
622	Jambore kader PKK	Meningkatnya pengetahuan kader PKK se Kota Bkl
623	Supervisi PKK Tk Kota Bkl	Terlaksananya supervisi PKK Tk Kota Bkl
624	Pelaksanaan hari kesatuan gerak PKK	Terpenuhinya hari kesatuan gerak PKK
625	Pembinaan tertib administrasi PKK	Meningkatnya SDM kader tentang tertib administrasi
626	Pelayanan pengobatan gratis	Terlaksananya pengobatan gratis DWP Kota Bengkulu guna membantu masyarakat kurang mampu
627	Administrasi kegiatan sekretariat dharma wanita Kota Bengkulu	Terlaksananya administrasi kegiatan sekretariat dharma wanita kota Bengkulu
628	Nikah balai	terselenggaranya kegiatan nikah balai di Kota Bengkulu
629	Fasilitasi GOW kota Bengkulu	fasilitasi GOW kota Bengkulu
630	Pelatihan tenaga perawatan lansia	Terlaksananya pelatihan tenaga perawatan lansia
631	Hari Kartini dan Hari Ibu	Terlaksananya hari kartini dan hari ibu
632	Pelatihan membatik UMKM	Terlaksananya Pelatihan membatik
634	Peringatan hari-hari besar DWP	Terselenggaranya peringatan hari-hari besar DWP
635	Raker rencana program kerja DWP	Terselenggaranya raker rencana program kerja DWP
636	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan
637	Pembinaan Dan Pengelolaan Arsip Sesuai Aturan	Jumlah Urusan PD penyusunan retensi arsip;
		Jumlah PD yang di Bina;
		Jumlah Pengelolaan Arsip
638	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan Arsip	Jenis Sarana dan Prasarana Arsip
639	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Jumlah arsip/dokumen yang terdigitalisasi
640	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah sarana dan prasarana terkelola



No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
641	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Jumlah arsip
642	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Jumlah sumber arsip
643	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Jumlah peserta Lomba
		Jumlah sosialisasi
		Jumlah pojok baca di Kecamatan
644	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yang direhab/perbaikan (Unit)
645	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu (stel)
646	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD (Dokumen/Laporan)
647	Analisis penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Data skor PPH Kota Bengkulu(79,60) (dokumen)
648	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap kebutuhan pangan	Data Neraca Bahan Makanan (NBM) (dokumen)
649	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	Data situasi pangan dan gizi (SKPG) (dokumen)
650	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Jumlah lahan pekarangan yang dimanfaatkan untuk pengembangan pangan
651	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar dan olahan yang aman
652	Pengembangan pola konsumsi B2SA	Jumlah lomba B2SA yang dilaksanakan/diikuti
653	Rapat koordinasi perumusan kebijakan Dewan Ketahanan Pangan	Rumusan kebijakan Dewan Ketahanan Pangan Kota Bengkulu (Dokumen)
654	Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	Jumlah unit pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang dikembangkan (unit)
655	Peningkatan promosi atas hasil produksi pertanian/perkenbunan unggulan daerah	Jumlah kegiatan promosi atas hasil produksi pertanian/perkenbunan unggulan daerah yang diikuti (kali)
656	Pengembangan intensifikasi tanaman Padi dan palawija	Luas pengembangan intensifikasi jagung (hektar)
657	Pengembangan diversifikasi tanaman	Luas pengembangan diversifikasi tanaman pangan, hortiluktura dan perkebunan
658	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian/perkebunan	Jumlah luas tambah panen padi (hektar)
659	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Jumlah prasarana dan sarana produksi pertanian (unit/paket)
660	Pengadaan Bibit unggul pertanian/perkebunan	Jumlah bibit unggul buah-buahan (Batang)
661	Perlindungan lahan pertanian di Kota	Jumlah luas lahan pertanian tanaman



No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
	Bengkulu	pangan, hortikultura dan perkebunan yang dilindungi (hektar)
662	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah SDM penyuluh dan petani yang Mengikuti magang, pelatihan dan bimtek (orang)
663	Peningkatan kelembagaan penyuluh dan petani	Jumlah Balai Penyuluhan/kelompok tani yang difasilitasi (BPP/Poktan)
664	Penyuluhan dan pendampingan bagi penyuluh pertanian dan perkebunan	Jumlah petani/kelompok tani yang mendapat penyuluhan dan pendampingan
665	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Jumlah PHMS yang dicegah dan dikendalikan serta obat, bahan peralatan kesehatan hewan (paket)
666	Peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang difasilitasi (unit)
667	Pembibitan dan perawatan ternak	jumlah ternak pada kandang percontohan (ekor)
668	Pengembangan agribisnis peternakan	Jumlah peningkatan populasi ternak di Kota Bengkulu
669	Peningkatan sarana dan prasarana RPH	Jumlah unit sarana dan prasarana RPH (unit)
670	Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil peternakan yang dikembangkan (unit)
671	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	Terdapatnya peluang pasar promosi dan pemasaran
672	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
673	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Jumlah mitra jaringan kerjasama promosi pariwisata
674	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri	Banyaknya promosi pariwisata
675	Pengembangan statistik wisata terpadu	Meningkatnya statistik wisata terpadu
676	Pelatihan pemandu wisata terpadu	Meningkatnya kualitas pemandu wisata
677	Peningkatan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata	Meningkatnya SDM kepariwisataan
678	Festival Batik Nusantara	Promosi Batik khas daerah
679	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata
680	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Berkembangnya jenis dan paket wisata unggulan
681	Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha	Terlaksanannya koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha
682	Penertiban dan pemeliharaan kawasan wisata	Tertib dan terpeliharanya kawasan wisata



No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
683	Pendidikan dan pelatihan teknis bidang kepariwisataan	Tersedianya SDM yang berkualitas di bidang kepariwisataan
684	Monitoring dan Evaluasi program pengembangan destinasi pariwisata	Terlaksananya Monev program pengembangan destinasi pariwisata
685	Monitoring dan Evaluasi TDUP berdasarkan Perda No 6 Tahun 2016	Terlaksananya Monev TDUP
686	Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata	Adanya Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata
687	Pengembangan SDM dibidang kebudayaan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lain	Peningkatan kualitas SDM dibidang kebudayaan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lain
688	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	Terbentuknya forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
689	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	dilaksananya koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
690	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan	Capaian pelaksanaan program peningkatan kemitraan
691	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Partisipasi aktif masyarakat dalam kemitraan pariwisata
692	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah RIPPDA	Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah RIPPDA
693	Pembinaan lingkungan pariwisata sehat	Terlaksananya Sosialisasi lingkungan pariwisata sehat
694	Penyediaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana penyuluhan kelautan dan perikanan	Disediakannya sarana dan prasarana penyuluhan kelautan dan perikanan
695	Penyusunan data base kelautan dan perikanan	Ketersediaan data base kelautan dan perikanan
696	Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor	Pembangunan/rehab gedung kantor, rehab PPI, pembangunan pagar kantor, tempat parkir, lapangan olah raga dan lain lain
697	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan	Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pembangunan Kelautan dan Perikanan
698	Pengadaan pakaian dinas dan atributnya	Disediakannya pakaian dinas dan atributnya
699	Peningkatan kapasitas pelaku usaha bidang budidaya ikan	Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan (2 kegiatan)
700	Penyusunan data potensi dan produksi perikanan budidaya	Akurasi data potensi dan produksi bidang perikanan budidaya
701	Penilaian Cara Budidaya Ikan yang	Jumlah peserta penilaian CBIB



No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
	Baik (CBIB)	
702	Pengembangan UPR (Unit Perbenihan Rakyat)	Jumlah induk ikan yang berkualitas, pakan UK dan kolam terpal yang disediakan
703	Penyediaan/pengembangan sarana prasarana pendukung Balai Benih Ikan (BBI)	Disediakannya sarana prasarana pendukung BBI (Pagar, drainase, kolam. Pakan, alat-alat perbenihan, serta sarana prasarana lainnya)
704	Pembinaan kelompok pembudidaya ikan	Dilaksanakannya kegiatan pembinaan pembudidaya ikan (2 kegiatan)
705	Pengadaan sarana/ prasarana perikanan tangkap	Jumlah kapal 30 GT serta kelengkapan, Jumlah bubu/perangkap ikan dan jumlah blek (bagan tancap) yang disediakan
706	Pembinaan Nelayan	Jumlah nelayan yang dibina (2 kegiatan)
707	Pembayaran premi asuransi nelayan	Jumlah nelayan yang dibayarkan asuransi
708	Revitalisasi daratan pulau tikus	dilaksanakannya kegiatan revitalisasi kawasan pulau tikus
709	Pembangunan Jetty Pondok Besi	Dilaksanakannya pembangunan Jetty Pondok Besi
710	Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat kelautan dan perikanan (Nelayan)	Jumlah perahu/ kapal bagan mini beserta perlengkapannya untuk nelayan
711	Peningkatan sarana prasarana pasca panen hasil perikanan	Jumlah sarana pengolahan dan pemasaran produk perikanan yang disediakan dan Penambahan fasilitas cold storage
712	Sosialisasi sistem rantai dingin produk perikanan	Dilaksanakannya kegiatan sosialisasi sistem rantai dingin produk perikanan
713	Pembinaan Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dilaksanakannya pembinaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (3 kegiatan)
714	Lomba Masakan Serba Ikan Tingkat Kota dan Provinsi Bengkulu	Dilaksanakannya lomba masak ikan tingkat Kota dan Provinsi Bengkulu
715	Pengadaan sarana dan prasarana sentra kuliner	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan untuk sentra kuliner
716	Pendataan konsumsi ikan	Dilaksanakannya kegiatan pendataan konsumsi ikan
717	Pelatihan penguatan kapasitas usaha pasca panen hasil perikanan	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan (3 pelatihan)
718	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD, belanja modal pengadaan website	Jumlah dokumen Renstra, renja, rka, laporan keuangan, lkjip, spip dan SIPD dibuat dan jumlah situs web yang disediakan
719	Bazar/pasar murah pada hari besar	Jumlah lokasi bazar pada hari-hari besar yang dilaksanakan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
720	Pengawasan Peredaran minuman beralkohol	Jumlah lokasi yang menjual Minuman beralkohol yang diawasi
721	Operasi Pasar Keliling	Jumlah OP yang dilaksanakan
722	Sinkronisasi media setor tagihan retribusi dan kartu kontrol tagihan retribusi sewa kios	Jumlah Pembinaan Pengawasan dan Optimalisasi Pasar yang dilaksanakan
723	E-Retribusi	Jumlah aplikasi dan pemeliharaannya
724	Pembinaan dan Pengawasan Mutu Depot Air Minum	Jumlah depo isi ulang air minum yang diawasi
725	pengawasan pemakaian dan tera ulang ukuran, takaran, timbang dan perlengkapannya	Jumlah lokasi yang diawasi
726	Pengujian/Standarisasi Peralatan Metrologi	Jumlah peralatan UTTP yang dikalibrasi
727	Penataan tempat usaha bagi pedagang	Jumlah pasar yang ditertibkan melalui penataan tempat usaha
728	Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Jumlah pedagang yang mendapat pembinaan dan diberdayakan
729	Sosialisasi pembinaan pedagang pasar	Jumlah sosialisasi kepada pedagang yang dilaksanakan
730	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Jumlah kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta yang difasilitasi
731	Pembinaan dan Penyuluhan Kelompok Usaha Bersama (KUB) IKM	Jumlah KUB yang dibina
732	Pameran Dalam rangka Festival Tabot	Jumlah partisipasi dalam event Tabot
734	Pameran Expo Investasi	Jumlah partisipasi dalam Expo Investasi
735	Partisipasi Pameran Dagang	Jumlah partisipasi pameran dagang yang diikuti
736	Pembangunan sentra industri kecil dan menengah (IKM)	Jumlah sentra IKM yang dibangun

Sumber : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu, 2023

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Jenis SPM terdiri atas SPM Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta sosial.

Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Bengkulu telah mulai menerapkan standar pelayanan minimal berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
10. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Bengkulu Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 25);



Dalam pelaksanaan penerapan SPM dimaksud belum sepenuhnya maksimal diterapkan. Hal ini disebabkan antara lain masih terbatasnya pemahaman akan arti dan fungsi SPM, ditambah lagi untuk tahun 2023 banyak program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Penyajian hasil kinerja makro hasil pembangunan dapat dijadikan bahan dalam evaluasi kinerja makro pembangunan dan dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan apakah kebijakan-kebijakan publik yang dijalankan, capaian indikator makro Kota Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro Kota Bengkulu

No	Indikator Kinerja Makro	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	82,93	83,38	0,54
2	Angka Kemiskinan	15,73	14,71	-6,48
3	Angka Pengangguran	6,15	5,04	-18,05
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,69	5,53	-2,812
5	Pendapatan Per kapita atas Harga Konstan 2010 (miliar rupiah)	16.733,94	17.658,93	5,528
6	Pendapatan Per kapita atas Harga Berlaku (Ribu rupiah)	72.992	78.780	-
7	Ketimpangan Pendapatan	0,37	0,38	2,70

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, 2024

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci Keluaran dan Indikator kinerja kunci hasil dapat dilihat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

2.3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi yang dilaporkan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2023 merupakan Laporan Realisasi Perjanjian Kinerja Wali Kota Bengkulu Tahun 2023 atau tahun ke-5 (lima) dari 5 (lima) tahun periode RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 yang berpedoman kepada dokumen perencanaan jangka menengah daerah.

Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bengkulu dapat dilihat dari pencapaian Target Indikator Kinerja dari setiap Sasaran Organisasi yang diatur dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2023 dengan rumus sebagai berikut:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan Pencapaian Kinerja yang semakin baik, menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah Pencapaian Kinerja, menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
MISI 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik					
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	BB	B	-
		Indeks Reformasi Birokrasi	BB	Belum Rilis	-
		Peringkat Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	50	Belum Rilis	-
2	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	0,42	1,059	39,6
		Opini BPK	WTP	Belum Rilis	-
3	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Indeks Persepsi Korupsi (Survei Penilaian Integritas)	67,13	Belum Rilis	
		Indeks Persepsi Korupsi	-	-	-
MISI 2 : Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan					
4	Meningkatnya Akses dan Kualitas Jaringan Jalan	Persentase Jalan Mantap	90	0	0
5	Meningkatnya akses pemukiman layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	0	8,05	47,75
6	Meningkatnya akses komujikasi dan informasi	Peringkat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,9	2,61	135,2
7	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70	57,04	81,4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
MISI 3 : Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mulia					
8	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	79,57	83,38	104,6
9	Meningkatnya kesejahteraan sosial	Angka kemiskinan	16,68	14,71	2,97
MISI 4 : Membangkitkan Ekonomi Kreatif dan Iklim Usaha yang Kondusif					
10	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	7	3,96	56,6
		Laju Inflasi	2,02	3,09	+1,07
11	Meningkatnya realisasi nilai penanaman modal	Nilai Investasi (T)	2	1,990	99

Sumber : Kementerian PANRB, Mendagri dan Perangkat Daerah Pengampu

2.3.2 Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran dan analisis capaian kinerja adalah untuk dapat melihat sejauh mana hasil yang diharapkan, yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Pengukuran kinerja Pemerintah Kota Bengkulu dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2023 dan realisasinya pada akhir tahun.

Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2023 ini berisi tentang program dan langkah-langkah strategis secara umum dalam mencapai target indikator kinerja. Telah tertuang dalam LKjIP Perangkat Daerah masing-masing yang membidangi.

Pencapaian kinerja, pelaksanaan program, dan kegiatan selama tahun 2023 telah sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2023. Secara umum,

target indikator berhasil tercapai dengan baik, namun ada beberapa indikator yang masih perlu ditingkatkan kinerjanya agar target yang ditetapkan bisa tercapai, dijelaskan sebagai berikut:

Misi I
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Sasaran 1:
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Tabel 2.3
Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Capaian
		2023	2022	2023	%
1	Nilai SAKIP	BB	B	B	
2	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	CC	CC	
3	Peringkat Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	50	Belum Rilis	Belum Rilis	

Sumber : Kementerian PANRB dan Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan Tabel di atas, Sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja** Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2023 diukur dengan 3 (tiga) indikator sebagai berikut:

1. Nilai SAKIP.



Piagam penghargaan SAKIP AWARD 2021 oleh Menpan RB Bapak Tjahjo Kumolo kepada Pemerintah Kota Bengkulu

Nilai SAKIP merupakan hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian dari unsur evaluasi untuk SAKIP tahun 2022 nilai sebesar 61,67. Sedangkan untuk tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi sebesar 62,32 berdasarkan dari surat Kementerian PAN RB nomor B/257/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai hasil ini. Diawali dengan membangun komitmen bersama semua Perangkat Daerah yang diimplementasikan dengan membentuk Tim SAKIP Pemerintah Kota Bengkulu. Tim SAKIP ini sudah bekerja efektif 2 (dua) tahun memperbaiki dan meningkatkan kinerja dari semua komponen dalam AKIP (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan capaian Kinerja), serta menindaklanjuti semua persoalan dan rekomendasi Kementerian PAN dan RB seperti Memperbaiki rumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang berorientasi hasil serta memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik atau ‘SMART’ (khususnya aspek spesifik, terukur dan relevan) pada Perangkat Daerah.

Termasuk bagian dalam Tim SAKIP, Sekretariat Daerah Menjalankan program Peningkatan dan pengawasan akuntabilitas kinerja, Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja dan keuangan, dan Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Program ini efektif telah berjalan setiap tahun dan berhasil meningkatkan Nilai Pelaporan Kinerja 8,75 ditahun 2022 menjadi 8,77 di tahun 2023.

Inspektorat Kota Bengkulu secara khusus memasukkan Nilai Komponen Evaluasi Kinerja pada SAKIP Daerah dalam Indikator Kinerja Sasaran Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2022 menjadi 6 , dengan cara Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Kebijakan KDH, Koordinasi Fasilitasi, dan Asistensi LPPD. Selain itu,

juga masih dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat menargetkan 90% Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu memiliki nilai LKjIP 'Baik' melalui upaya Pengawasan Internal secara berkala, Koordinasi Fasilitasi, dan Asistensi SAKIP.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Membuat dan melaksanakan 'Program Perencanaan Pembangunan Daerah' dan terbukti berhasil meningkatkan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP dari 21,34 di tahun 2022 menjadi 21,46 tahun 2023, Meningkatkan nilai Komponen Pengukuran Kinerja dari 17,21 menjadi 17,34, dan Meningkatkan nilai komponen Capaian Kinerja dari 10,64 menjadi 10,71. Namun Pemerintah Kota Bengkulu menyadari apa yang dilakukan setiap tahun dalam menaikkan nilai Kinerja masih jauh dari kata memuaskan untuk itu pemerintah kota Bengkulu melalui Tim SAKIP akan terus berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil lebih baik ditahun-tahun mendatang.

2. Indeks Reformasi Birokrasi

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 adalah CC. Kota Bengkulu selalu berupaya meningkatkan indeks RB ditahun-tahun mendatang, yang dilakukan Pemerintah Kota Bengkulu sebagai berikut:

- a. Menyempurnakan rumusan kinerja strategis dan penjabaran kinerja hingga level individu, meskipun kualitasnya belum merata;
- b. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan public meskipun belum menyeluruh dan dimonitor secara berkala; dan
- c. Melakukan inovasi pelayanan, seperti: antar jemput akta kelahiran, *one day one service* dan perekaman keliling oleh Dinas Dukcapil.

Secara khusus, beberapa hal pembenahan sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun 2023, Pemerintah Kota Bengkulu melakukan:

- a. Memperkuat Tim RB dan asesor dan melakukan evaluasi setiap kinerja per triwulan;
- b. Menyusun Rencana Kerja RB Tahun 2023, diselaraskan dengan Sasaran RB Nasional;
- c. Asesor sudah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Bengkulu;

- d. Membangun Agen Perubahan di tingkat unit (RSHD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan), yang terbaik dari unit akan dijadikan Agen Perubahan Tingkat Kota Bengkulu;
- e. Melakukan perubahan pola kerja Tim RB. Asesor turun langsung ke Perangkat Daerah yang menjadi Sampel (10 Perangkat Daerah) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- f. Melakukan asistensi Pelaksanaan RB di setiap Perangkat Daerah yang menjadi sampel;
- g. Melakukan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah;
- h. Melakukan Evaluasi terhadap produk hukum daerah;
- i. Membuat Usulan Penyederhanaan Birokrasi Jabatan Administrasi dan Pengawas, dan telah diserahkan ke Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- j. Pemenuhan bahan evaluasi kelembagaan yang diserahkan ke Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- k. Pemerintah Kota Bengkulu telah menyusun Peta Proses Bisnis;
- l. Melakukan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan SOP semua Perangkat Daerah;
- m. Semua Perangkat Daerah telah Menerapkan SOP;
- n. Melaksanakan *assesment* pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan membuat rencana assesment jabatan administrasi (administrator, pengawas, dan pelaksana);
- o. Penetapan kinerja individu tahun 2023 seluruh jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana;
- p. Menerbitkan Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 24 tahun 2020 tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;
- q. Melakukan sosialisasi ke seluruh Perangkat Daerah dan membagikan *banner* “Tolak Gratifikasi dan anti Korupsi”;
- r. Melakukan penilaian dan evaluasi dengan Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada Dinas PM-PTSP Kota Bengkulu;

- s. Pemerintah Kota Bengkulu melalui Tim RB sudah mulai menyusun Rencana Kerja Reformasi Birokrasi yang berpedoman kepada hasil evaluasi RB Tahun 2020 dan Permenpan RB No. 25 Tahun 2020 tentang *Road MAP* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- t. Pemerintah Kota Bengkulu juga telah menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2024 dan telah di Perwalkan Nomor 27 Tahun 2021,
- u. Pemerintah Kota Bengkulu telah Membentuk Agen Perubahan di beberapa Perangkat Daerah (unit) yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan RSUD Kota Bengkulu.

3. Peringkat Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Se Indonesia

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021 secara Nasional Tahun 2021 Kota Bengkulu memperoleh peringkat 81 (delapan puluh satu) dengan skor nilai 2,09.

Dalam usaha meningkatkan Capaian Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Bengkulu Tahun 2023, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu telah melakukan langkah-langkah yaitu:

- a. Melaksanakan sosialisasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember tahun 2023 yang melibatkan seluruh perangkat daerah dengan narasumber Biro Pemerintahan Pemerintah Provinsi Bengkulu
- b. Membuat program dan kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang melibatkan seluruh perangkat daerah terkait dengan menunjuk petugas penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dari perangkat daerah.

- c. Melaksanakan koordinasi dan asistensi dengan Inspektorat Kota Bengkulu Perihal verifikasi data dari perangkat daerah sebelum disampaikan ke Bagian Pemerintahan untuk diinput dan disusun.

Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah.

Tabel 2.4
Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Capaian
		2023	2022	2023	%
1	Indeks Kapasitas Fiskal	0,4	0,921	1,059	39,6
2	Opini BPK	WTP	WTP	Belum Rilis	

Sumber : Permenkeu Nomor 84 Tahun 2023 dan Inspektorat

Berdasarkan tabel di atas bahwa sasaran ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah*** diukur dengan 2 (dua) indikator sebagai berikut:

1. Indeks Kapasitas Fiskal.

Indeks Kapasitas Fiskal merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Bengkulu sebagai ukuran tercapainya Sasaran Strategis 'Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah'. Berdasarkan perbandingan realisasi realisasi 1.059 dengan target 0.4 di Tahun 2023 Pemerintah Kota Bengkulu berhasil:

- Merealisasikan target kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
- meningkatkan Indeks Kapasitas Fiskal dari tahun 2022 sebesar 0,921 naik menjadi 1,059 di Tahun 2023 dengan realisasi capaian sebesar 2,25%.
- Berhasil melampaui target Pembangunan Jangka Menengah Tahun ketiga yaitu 0,4.
- Capaian Indeks Kapasitas Fiskal Kota Bengkulu Tahun 2022 bahkan telah melampaui target akhir Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2023 yaitu 0,42.
- Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Peta Kapasitas Daerah. Kota Bengkulu berada di Kategori FKD Rendah dengan Indeks 1,059 pada Tahun 2023 atau

di bawah Indeks FKD Provinsi Bengkulu 1,173 dengan Kategori Sangat Rendah.

Strategi yang dilakukan sebagai upaya mencapai target kinerja ini adalah:

- a. Meningkatkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
- b. Meningkatkan ketaatan dan kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak.

Dengan melaksanakan program:

- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- b. Peningkatan Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dan
- d. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan.

Sehingga berdasarkan jumlah penerimaan umum APBD, masih cukup besar jika dikurangi dengan pembiayaan-pembiayaan yang telah ditentukan penggunaannya ditambah biaya belanja yang ada.

2. Opini BPK

Opini Pemeriksaan atas Laporan Keuangan merupakan pernyataan profesional Badan Pemeriksaan Keuangan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Kota Bengkulu yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pada Tahun 2023 capaian indikator sasaran opini BPK dengan analisis sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini

Pada Tahun 2023 Target dari capaian indikator sasaran opini BPK WTP sedangkan realisasinya belum rilis dari BPK. Biasanya rilis pada bulan April-Mei 2023.

2. Membandingkan capaian kinerja tahun ini dan tahun lalu

Pada Tahun 2022 Target Kinerja Opini BPK adalah WTP realisasinya WTP atau mencapai target, sedangkan untuk Tahun 2023 Targetnya WTP, sedangkan realisasinya belum rilis dari BPK.

3. Membandingkan realisasi tahun ini dengan target di RPJMD
Pada Target di Dokumen RPJMD adalah WTP pada Tahun 2023, sedangkan di Laporan Kinerja pada Tahun 2023 juga WTP tetapi realisasinya belum rilis dari BPK biasanya akan rilis antara bulan April-Mei 2023.
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang dilakukan

Untuk capaian kinerja Opini BPK ini Kota Bengkulu dalam 3 (tiga) Tahun terakhir ini selalu mencapai Target yaitu WTP adapun untuk mempertahankan capaian target ini banyak yang dilakukan antara lain :

- Monev asistensi rekomendasi LHP BPK
 - Asistensi LK PD dan LKPD TA 2023
 - Mengupayakan kepada pihak ketiga dalam melaksanakan pekerjaan barang jasa maupun modal harus sesuai kontraknya
 - Lebih selektif dalam penetapan dan penunjukan pihak ketiga
5. Faktor Penyebab Kegagalan
Indikator Kinerja Opini BPK sudah sesuai Target yang ditetapkan, hanya saja nilainya belum keluar untuk Tahun 2023
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Sumber daya Manusia di Inspektoran Daerah Kota Bengkulu masih perlu ditingkatkan baik dari segi kuantitatif dan kualitatif
 7. Program/kegiatan yang menunjang tercapaianya sasaran kinerja
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan asistensi

Sasaran 3:

Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Tabel 2.5
Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Capaian
		2023	2022	2023	%
1	Indeks Persepsi Korupsi (Survei Penilaian Integritas)	67,13	71	Belum Rilis	
	Indeks Persepsi Korupsi	-	-	-	-

Sumber : Inspektorat Kota Bengkulu, 2023

Indeks Persepsi Korupsi menjadi indikator dalam mencapai sasaran Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Indikator ini adalah salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Bengkulu. Strategi yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi pencegahan korupsi, Membentuk Satgas Saber Pungli, membentuk satgas wilayah bebas korupsi, Surat Edaran Larangan gratifikasi, Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK melalui fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam pengukuran kinerja ini ada sedikit kendala sbb:

1. Belum ada nilai dan transparansi internasional Indonesia merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK).
2. IPK dikeluarkan oleh MTI dan itupun biasanya tidak ada IPK per Provinsi, apalagi per kab/ kota. Sehingga jika indikator kinerja itu dipertahankan, Pemerintah Kota Bengkulu tidak akan dapat mengukurnya. Pemerintah Kota Bengkulu melalui Inspektorat menyarankan Indikator Kinerja ini diganti dengan nilai SPI yang dikeluarkan oleh KPK.
3. Capaian Indikator Kinerja Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dikeluarkan KPK untuk Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :
 - a. Indikator Kinerja Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar 67,13% untuk hasilnya belum realise. Nilai SPI Masih belum sesuai dengan target karena dari beberapa komponen penilaian masih belum optimal kontribusi Inspektorat sesuai dengan surat KPK untuk pendampingan SPI pada responden sampel menyampaikan data responden internal, ekseternal dan expert.

- b. Indikator kinerja Nilai SPI KPK tidak terdapat di Dokumen RPJMD Kota Bengkulu jadi tidak bisa dibandingkan.
- c. Penyebab kegagalan Nilai SPI Kota Bengkulu karena dari beberapa unsur penilaian masih belum optimal.
- d. Analisis sumber daya di Inspektorat Kota Bengkulu masih perlu ditingkatkan lagi baik dari segi kuantatif dan kualitatif.
- e. Program/kegiatan yang mendukung tercapainya nilai SPI adalah Pemantauan pelayanan yang bebas pungutan liar.

Misi II

Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

Sasaran 4:

Meningkatnya Akses dan Kualitas Jaringan Jalan

Tabel 2.6
Analisis Capaian Kinerja Sasaran 4

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Capaian
		2023	2022	2023	%
1	Persentase Jalan Mantap	90	98,57	0	0

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu, 2023

Dari tabel diatas, bahwa sasaran *Meningkatnya Akses dan Kualitas Jaringan Jalan* diukur dengan indikator Persentase Jalan Mantap dapat dijelaskan sebagai berikut :

Realisasi untuk sasaran Meningkatkan akses dan kualitas jaringan jalan dengan indikator Presentase Jalan Mantap dengan target 90% untuk capaian Tahun 2023 tidak dapat diukur dikarenakan tidak tersedianya anggaran survey kondisi jalan untuk.

Tetapi pada tahun anggaran 2024 telah dialokasikan anggaran untuk pembuatan/penyusunan data base jalan kota bengkulu dimana data tersebut menyajikan indikator kinerja persentase jalan mantap.

Sasaran 5:**Meningkatnya Akses Pemukiman Layak Huni**

Tabel 2.7
Analisis Capaian Kinerja Sasaran 5

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Capaian
		2023	2022	2023	%
1	Rasio Rumah Layak Huni	0	5	8,05	47,75

Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2023

Berdasarkan tabel di atas, bahwa sasaran **Meningkatnya Akses Permukiman Layak Huni** diukur dengan indikator “Rasio Rumah Layak Huni” dijelaskan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2023 Target Rasio Rumah Layak Huni yang terdapat didokumen RPJMD adalah 0 sedangkan dari hasil perhitungan Dinas Perkim pada tahun 2023 masih terdapat di beberapa kecamatan rumah tidak layak huni sebesar 8,05%.
2. Kalau dibandingkan dengan Tahun sebelumnya mengalami peningkatan dikarenakan jumlah rumah yang mendapat bantuan perbaikan RTLH juga bertambah dan anggarannya pun tersedia.
3. Adapun Program yang menunjang pemberian RTLH tersebut melalui program Perumahan dan Kawasan Permukiman kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kab/kota.

Sasaran 6:**Meningkatnya akses komunikasi dan informasi**

Tabel 2.8
Analisis Capaian Kinerja Sasaran 6

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Capaian
		2023	2022	2023	%
1	Peringkat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,9	2,19	2,61	135

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Persandian, 2023

Dari tabel di atas capaian sasaran **Meningkatnya akses komunikasi dan informasi** diukur dengan indikator “Peringkat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)” dijelaskan sebagai berikut:

Untuk realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 capaian peringkat SPBE Pemerintah Kota

Bengkulu dapat disampaikan mengalami kenaikan pada tahun 2023, di tahun 2022 Peringkat SPBE 2,19 (cukup) naik menjadi 2,61 (cukup) di Tahun 2023 atau melebihi target yang ditetapkan di dokumen RPJMD Kota Bengkulu yaitu 1,9.

Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Kominfo akan selalu berupaya untuk dapat menaikkan Peringkat SPBE di tahun- tahun mendatang, adapun langkah-langkah yang akan dilakukan yaitu:

- a. Memiliki dokumen perencanaan SPBE sebagai salah satu unsur yang menjadi penilaian sesuai jumlah kriteria yang ditetapkan . Pada tahun 2022 ini baru ada dua dokumen yang telah disusun. Oleh karena itu selaku OPD terkait telah melakukan pembenahan untuk mengikuti penilaian peringkat Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemen PAN) di tahun 2023 dengan menyusun dokumen yang dibutuhkan.
- b. Pada tahun 2023 Kominfo sudah membuat Perwal no 15 tentang penyelenggaraan SPBE dilingkungan Kota Bengkulu.
- c. Sudah membuat 2 dokumen SPBE yaitu Dokumen Arsitektur SPBE dan Dokumen Peta Rencana SPBE.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE, baik itu untuk menunjang kinerja birokrasi maupun layanan publik kepada masyarakat. Sementara itu Sumber daya SPBE adalah semua komponen yang mendukung penyelenggaraan SPBE yang meliputi kelembagaan, proses bisnis, teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, dan biaya. Pada tahun 2022 pelaksanaan SPBE dengan segala keterbatasan yang dimiliki namun telah berhasil memaksimalkan penggunaan semua komponen pendukung dalam meraih hasil evaluasi SPBE yang memadai walaupun pada hasil akhir yang diraih hanya 2,19 (cukup) tetapi naik dari tahun sebelumnya. Kekurangan ini disebabkan pada saat penilaian dokumen perencanaan belum tersusun, setelah itu pada anggaran perubahan tahun 2022 berhasil menyusun dua dokumen perencanaan yaitu Arsitektur dan Roadmap SPBE.

- d. Meskipun tidak tercapai dalam penilaian SPBE tersebut namun dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Bengkulu telah melakukan penyusunan kelengkapan dokumen perencanaan SPBE dan telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan adanya aplikasi Merah Putih serta telah menerapkannya antara lain : 1. Menerapkan Layanan Publik On Line seperti di Dinas Dukcapil dengan Aplikasi SLAWE, Perizinan On Line di DPTSP, LPSE dalam pengadaan barang dan jasa 2. Di beberapa OPD Pemerintah Kota Bengkulu juga telah menerapkan Aplikasi ASTABA (Inventaris Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota), *E – SAKIP* , *E-Planning*, *E- Bugdeting*, *E- Kinerja*, *E- Absen*, SIMPEG (Sistem Pelayanan Administrasi Kepegawaian Kota).

Sasaran 7:

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Tabel 2.9
Analisis Capaian Kinerja Sasaran 7

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Capaian
		2023	2022	2023	%
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH)	70	58,04	57,04	81,4

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Berdasarkan tabel di atas capaian sasaran ***Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*** diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH) dengan Analisis capaian pada Tahun 2023 sebagai berikut :

Perhitungan IKLH dilakukan jika semua komponen indeks (IKA, IKU, IKL dan IKAL) telah dihitung dan diketahui nilainya. Selanjutnya setelah semua komponen indeks telah dihitung dan diketahui nilainya, maka perhitungan IKLH dapat dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan IKLH. Hasil perhitungan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.10
Analisis Capaian Kinerja Sasaran 7

Kota	IKA	IKU	IKL	IKLH	Kategori
Bengkulu	37.78	90.65	27.93	57.04	Sedang

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berdasarkan data perhitungan IKA, IKU dan IKL maka didapat hasil nilai IKLH sebesar **57.04** yang dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup termasuk kedalam **Kategori Sedang**.

Misi III
Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mulia

Sasaran 8:

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

Tabel 2.11
Analisis Capaian Kinerja Sasaran 8

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Capaian
		2023	2022	2023	%
1	Indeks Pembangunan Manusia	79,57	80,54	83,38	10,12

Sumber: BPS Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, bahwa sasaran ***Meningkatnya Kualitas sumber daya manusia*** diukur dengan indikator “Indeks Pembangunan Manusia” dijelaskan sebagai berikut:

Kota Bengkulu masuk dalam kategori daerah dengan IPM tinggi hal ini terlihat dari capaian IPM dari Tahun ke tahun yang terus konsisten meningkat. Berikut analisis kenaikan IPM Kota Bengkulu :

1. IPM Kota Bengkulu pada Tahun 2023 83,38 dari target yang ditetapkan sebesar 79,57 dengan capaian 104,6%
2. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 IPM kota Bengkulu naik menjadi 83,38 di Tahun 2023
3. Jika dibandingkan dengan Target yang terdapat pada Dokumen RPJMD Kota Bengkulu IPM Kota Bengkulu melebihi Target yang ditetapkan yaitu sebesar 79,57. Sedangkan pada Tahun 2023 IPM Kota Bengkulu Sebesar 83,38 atau melebihi dari Target yang ditetapkan di RPJMD. Dengan realisasi melebihi 100%
4. Dibandingkan dengan Propinsi Bengkulu 74,30 maka IPM Kota Bengkulu sudah lebih tinggi IPM Kota Bengkulu pada Tahun 2023 adalah 83,38.

5. Naiknya indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Bengkulu tidak lepas dari Program-program yang disinkronkan dari pusat dan daerah.
6. Efisiensi Anggaran yang tepat dibidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi juga menjadi faktor naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Bengkulu.
7. Program-program yang tepat sasaran dibidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi juga dapat menaikkan IPM di Kota Bengkulu.

Sasaran 9:

Meningkatnya Kesejahteraan Sosial

Tabel 2.12

Analisis Capaian Kinerja Sasaran 9

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Capaian
		2023	2022	2023	%
1	Angka kemiskinan	16,68	17,89	14,71	2,97

Sumber : BAPPEDA, 2023

Dari tabel di atas Sasaran ***Meningkatnya Kesejahteraan Sosial*** diukur dengan indikator Angka Kemiskinan dengan capaian kinerja Tahun 2023 adalah 14,71% atau dapat dikatakan angka kemiskinan di kota Bengkulu pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2,97% dari target yang ditetapkan di dokumen Rpjmd sebesar 16,68%.

Menurunnya angka kemiskinan di Kota Bengkulu disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- Banyaknya Program dan Kegiatan yang menasar penanggulangan kemiskinan baik dari pusat maupun dari daerah (pemerintah, filantropi, pelatihan, bansos, bantuan modal dan lain-lain)
- Pengendalian inflasi rutin dilaksanakan

Misi IV

Membangkitkan Ekonomi Kreatif dan Iklim Usaha yang Kondusif

Sasaran 10:

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 2.13
Analisis Capaian Kinerja Sasaran 10

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Capaian
		2023	2022	2023	%
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	7	4,37	3,96	56,6
2	Laju Inflasi	2,02	5,92	3,09	+1,07

Sumber : Bagian Perekonomian, 2023

Dari tabel di atas, sasaran ***Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi*** diukur dengan 2 (dua) indikator sebagai berikut:

Dari tabel di atas, sasaran ***Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi*** diukur dengan 2 (dua) indikator sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).
 - a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Jika dibandingkan dengan target tahun ini yaitu 7% maka capaian realisasi indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2023 tidak mencapai target, karena laju pertumbuhan ekonomi kota Bengkulu tahun 2023 adalah 3,96% atau sebesar 56,6%.
 - b. Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dan tahun lalu
Jika dibandingkan dengan capaian Tahun lalu, laju pertumbuhan ekonomi di kota Bengkulu mengalami penurunan di Tahun 2022 Laju pertumbuhan ekonomi 4,37% turun menjadi 3,96% di Tahun 2023 tetapi ini baru sampai Triwulan ke tiga.
 - c. Membandingkan capaian kinerja Tahun ini dengan Target yang terdapat di Dokumen RPJMD
Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 4,96% sedangkan Target yang terdapat di Dokumen RPJMD sebesar 7%, capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bengkulu Tahun 2023 masih dibawah Target yang ditetapkan di Dokumen RPJMD.
 - d. Membandingkan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Target Provinsi
Jika dibandingkan dengan Target Propinsi Bengkulu yaitu 4,60%, maka capaian kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bengkulu belum mencapai Target Propinsi Bengkulu dan target nasional
 - e. Analisis Penyebab terjadinya kegagalan dan/atau keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.

Penyebab tidak tercapainya sasaran sasaran kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah dari usaha-usaha mengalami penurunan yaitu jasa keuangan dan asuransi, pertambangan dan penggalian dan industri pengolahan dan dari segi pengeluaran menurunnya komponen import barang dan jasa.

Adapun alternatif solusi yang dilakukan Pemerintah Kota Bengkulu untuk menaikkan Laju Pertumbuhan Ekonomi yaitu :

- Menggalakkan kegiatan UMKM
- Pembangunan Infrastruktur pendukung
- Mempelancar arus distribusi penunjang
- Koordinasi dengan pihak terkait

2. Laju Inflasi

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Jika dibandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini laju Inflasi di Kota Bengkulu naik melebihi target, Tahun 2023 target laju inflasi di Kota Bengkulu adalah 2,02% naik menjadi 3,09%.

b. Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dan tahun lalu

Jika dibandingkan Tahun lalu laju Inflasi di Kota Bengkulu mengalami penurunan laju inflasi Kota Bengkulu tahun 2022 sebesar 5,92% sedangkan di tahun 2023 turun menjadi 3,09%.

c. Membandingkan capaian kinerja Tahun ini dengan Target yang terdapat di Dokumen RPJMD

Jika dibandingkan dengan target di dokumen RPJMD, capaian laju Inflasi di Kota Bengkulu mengalami kenaikan Target yang ditetapkan di dokumen RPJMD, di RPJMD ditetapkan pada Tahun 2023 Laju Inflasi Kota Bengkulu sebesar 2,02% sedangkan capaian Kinerja untuk laju Inflasi Kota Bengkulu Tahun 2023 sebesar 3,09% atau Naik sebesar +1,07%

d. Analisis Penyebab terjadinya kegagalan dan/atau keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Penyebab lajun inflasi di Kota Bengkulu belum mencapai target yang ditetapkan adalah:

- Naiknya indeks harga 3 tertinggi kelompok pengeluaran yaitu beras, rokok kretek, cabai merah
- Pengaruh cuaca ekstrim El Nino yang mengganggu produksi tanaman karena curah hujan bekurang
- Negara pengimpor mengurangi bahkan menghentikan sementara impor beras ke indonesia dikarenakan faktor cuaca El Nino.

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu dalam menurunkan Inflasi sebagai berikut :

- Meningkatkan Kerjasama antar daerah
- Operasi Pasar
- Pengawasan Distribusi
- Pemanfaatan Perkarangan/lahan kosong

Sasaran 11:

Meningkatnya realisasi nilai penanaman modal

Tabel 2.14
Analisis Capaian Kinerja Sasaran 11

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Capaian
		2023	2022	2023	%
1	Nilai Investasi (T)	2	1,530	1,990	99

Sumber : DPMPSTP Kota Bengkulu, 2023

Dari tabel di atas, sasaran ***Meningkatnya realisasi nilai penanaman modal*** diukur dengan indikator “Nilai Investasi” dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Investasi Kota Bengkulu Tahun 2023 dari target yang ditetapkan 2 Triliun hanya tercapai 1,990 T atau sebesar 99%
2. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 dengan 1,530 T maka pada tahun 2023 ini nilai Inventasi kota bengkulu mengalami kenaikan nilai investasi tahun 2023 naik menjadi 1,990 T
3. Jika dibandingkan dengan target RPJMD 2 T maka pada tahun 2023 nilai Investasi dikota bengkulu tidak mencapai target karena hanya tercapai sebesar 1,990 T
4. Strategi yang akan dilakukan untuk dapat meningkatkan nilai investasi di Kota Bengkulu pada Tahun mendatang adalah dengan cara terus

melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan agar tertib dalam menyampaikan laporan.

5. Adapun Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam menaikan nilai Investasi di Kota Bengkulu adalah Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal

2.3.3 Realisasi Anggaran

Jumlah anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2023 sebesar **Rp. 1.271.679.023.193,00**

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Bengkulu Tahun 2023, Anggaran tersebut didistribusikan ke dalam 102 Program. Dengan realisasi keuangan sasaran program adalah **Rp. 1.147.521.055.622,08** atau sebesar **(90,24%)** dari APBD Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2023. Realisasi anggaran masing-masing sasaran program pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15
Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	PROGRAM	Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp 68.690.000,00	Rp 45.242.368,00	Rp 23.447.632,00	65,86
2	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Rp 1.525.349.763,00	Rp 1.386.593.076,00	Rp 138.756.687,00	90,90
3	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp 18.473.350.219,00	Rp 14.136.732.137,00	Rp 4.336.618.082,00	76,53
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp 59.999.988,00	Rp 53.350.000,00	Rp 6.649.988,00	88,92
5	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 2.392.342.601,00	Rp 2.314.333.507,00	Rp 78.009.094,00	96,74
6	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 71.039.500,00	Rp 33.284.246,00	Rp 37.755.254,00	46,85
7	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 1.817.443.158,00	Rp 1.356.699.525,00	Rp 460.743.633,00	74,65



No	PROGRAM	Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)
8	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 770.000.500,00	Rp 643.558.889,00	Rp 126.441.611,00	83,58
9	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp 151.649.328,00	Rp 151.068.500,00	Rp 580.828,00	99,62
10	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp 116.709.920,00	Rp 30.970.000,00	Rp 85.739.920,00	26,54
11	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp 408.167.044,00	Rp 383.098.749,00	Rp 25.068.295,00	93,86
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp 69.527.000,00	Rp 14.080.000,00	Rp55.447.000,00	20,25
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp 1.645.200.000,00	Rp 1.637.700.000,00	Rp 7.500.000,00	99,54
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp 275.850.000,00	Rp 250.319.549,00	Rp 25.530.451,00	90,74
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp 541.512.892,00	Rp 264.930.892,00	Rp 276.582.000,00	48,92
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp 4.045.663.763,00	Rp 1.743.158.487,00	Rp 2.302.505.276,00	43,09
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 24.872.915.588,00	Rp 21.660.532.342,28	Rp 3.212.383.245,72	87,08
18	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp 89.660.000,00	Rp 45.560.000,00	Rp 44.100.000,00	50,81
19	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp 660.309.700,00	Rp 654.667.000,00	Rp 5.642.700,00	99,15



No	PROGRAM	Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)
20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rp 33.251.900,00	Rp 32.949.500,00	Rp 302.400,00	99,09
21	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp 261.982.800,00	Rp 133.554.000,00	Rp 128.428.800,00	50,98
22	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp 5.097.722.820,00	Rp 4.070.176.720,00	Rp 1.027.546.100,00	79,84
23	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rp 2.100.189.248,00	Rp 1.316.153.209,00	Rp 784.036.039,00	62,67
24	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp 75.000.000,00	Rp 43.385.713,00	Rp 31.614.287,00	57,85
25	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 66.277.653.324,00	Rp 54.270.842.876,25	Rp 2.006.810.447,75	81,88
26	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp 4.031.906.900,00	Rp 2.352.703.776,00	Rp 1.679.203.124,00	58,35
27	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp 163.040.000,00	Rp 131.765.000,00	Rp 31.275.000,00	80,82
28	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 11.624.200,00	Rp 1.009.200,00	Rp 10.615.000,00	8,68
29	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp 4.822.116.400,00	Rp 4.380.222.285,00	Rp 441.894.115,00	97,02
30	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp 194.258.800,00	Rp 81.980.600,00	Rp 112.278.200,00	42,20
31	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rp 1.196.318.400,00	Rp 1.180.070.500,00	Rp 16.247.900,00	98,64



No	PROGRAM	Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)
32	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp 1.420.765.700,00	Rp 1.072.541.851,00	Rp 348.223.849,00	75,49
33	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp 2.388.471.010,00	Rp 2.101.256.797,00	Rp 287.214.213,00	87,97
34	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 700.000.000,00	Rp 697.712.079,00	Rp 2.287.921,00	99,67
35	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp 107.979.000,00	Rp 7.979.000,00	Rp 100.000.000,00	7,39
36	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp 13.804.400,00	Rp 379.909.617,00	Rp 133.894.783,00	73,94
37	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp 41.360.000,00	Rp 41.210.000,00	Rp 150.000,00	99,64
38	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp 14.519.800,00	Rp -	Rp 14.519.800,00	0,00
39	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Rp 507.698.691,00	Rp 430.814.846,00	Rp 76.883.845,00	84,86
40	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp 1.397.428.331,00	Rp 1.158.389.378,00	Rp 239.038.953,00	82,89
41	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp 175.000.000,00	Rp 174.358.000,00	Rp 642.000,00	99,63
42	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp 8.244.925.700,00	Rp 7.971.181.700,00	Rp 273.744.000,00	96,68
43	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp 961.322.020,00	Rp 848.523.000,00	Rp 112.799.020,00	88,27
44	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp 256.206.900,00	Rp 236.182.200,00	Rp 20.024.700,00	92,18
45	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp 2.184.049.700,00	Rp 1.740.389.036,00	Rp 443.660.664,00	79,69
46	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp 8.666.078.949,00	Rp 6.522.738.997,00	Rp 2.143.339.952,00	75,27



No	PROGRAM	Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)
47	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rp 70.000.000,00	Rp 49.924.074,00	Rp 20.075.926,00	71,32
48	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 5.218.164.409,00	Rp 4.108.795.255,00	Rp 1.109.369.154,00	78,74
49	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp 86.151.035.804,00	Rp 84.878.457.969,06	Rp 1.272.577.834,94	98,52
50	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp 210.000.000,00	Rp 209.030.000,00	Rp 970.000,00	99,54
51	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp 201.608.900,00	Rp 201.189.054,00	Rp 419.846,00	99,79
52	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp 5.178.433.568,00	Rp 4.387.870.450,00	Rp 790.563.118,00	84,73
53	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp 1.403.917.000,00	Rp 1.382.475.500,00	Rp 21.441.500,00	98,47
54	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Rp 359.393.000,00	Rp 315.251.440,00	Rp 44.141.560,00	87,72
55	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Rp 55.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Rp 15.000.000,00	72,73
56	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp 18.500.000,00	Rp 18.000.000,00	Rp 500.000,00	97,30
57	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp 91.222.300,00	Rp 91.221.500,00	Rp 800,00	100,00
58	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp 120.153.400,00	Rp -	Rp 120.153.400,00	0,00
59	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp 2.609.827.705,00	Rp 2.118.860.545,00	Rp 490.967.160,00	81,19
60	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp 1.953.576.535,00	Rp 958.007.399,00	Rp 995.569.136,00	49,04



No	PROGRAM	Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)
61	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Rp 580.483.101,00	Rp 478.727.740,00	Rp 101.755.361,00	82,47
62	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Rp 200.000.000,00	Rp 199.100.800,00	Rp 899.200,00	99,55
63	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Rp 27.279.677.000,00	Rp 21.128.612.300,00	Rp 6.151.064.700,00	77,45
64	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp 341.833.426,00	Rp 305.440.357,00	Rp 36.393.069,00	89,35
65	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 39.118.400,00	Rp 39.045.000,00	Rp 73.400,00	99,81
66	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp 127.976.000,00	Rp 96.283.190,00	Rp 31.692.810,00	75,24
67	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp 536.223.000,00	Rp 536.025.049,00	Rp 197.951,00	99,96
68	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Rp 40.423.000,00	Rp -	Rp 40.423.000,00	0,00
69	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp 41.775.362,00	Rp -	Rp 41.775.362,00	0,00
70	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp 365.200.000,00	Rp 284.739.900,00	Rp 80.460.100,00	77,97
71	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 1.506.560.027,00	Rp 851.797.080,00	Rp 654.762.947,00	56,54
72	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp 138.105.000,00	Rp 103.434.470,00	Rp 34.670.530,00	74,90
73	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI	Rp 98.900.300,00	Rp -	Rp 98.900.300,00	0,00



No	PROGRAM	Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)
	PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
74	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp 814.949.100,00	Rp 40.000.000,00	Rp 774.949.100,00	4,91
75	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp 67.997.250,00	Rp -	Rp 67.997.250,00	0,00
76	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 3.839.775.457,00	Rp 3.309.274.100,00	Rp 530.501.357,00	86,18
77	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 104.209.300,00	Rp 98.443.343,00	Rp 5.765.957,00	94,47
78	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp 540.075.400,00	Rp 368.689.006,00	Rp 171.386.394,00	68,27
79	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp 346.886.500,00	Rp 303.371.000,00	Rp 43.515.500,00	87,46
80	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp 16.118.861.500,00	Rp 6.111.070.056,00	Rp 7.791.444,00	99,95
81	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp 40.279.000,00	Rp 40.029.000,00	Rp 250.000,00	99,38



No	PROGRAM	Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)
82	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 232.113.220,00	Rp 229.103.220,00	Rp 3.010.000,00	98,70
83	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 817.192.107.602,00	Rp 753.770.613.955,49	Rp 3.421.493.646,51	92,24
84	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp 103.979.410,00	Rp -	Rp 103.979.410,00	0,00
85	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp 90.344.630.735,00	Rp 80.658.602.900,00	Rp 9.686.027.835,00	89,28
86	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp 5.482.298.600,00	Rp 5.337.216.134,00	Rp 145.082.466,00	97,35
87	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 8.430.585.463,00	Rp 6.174.429.260,00	Rp 2.256.156.203,00	73,24
88	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp 1.821.963.800,00	Rp 1.616.101.500,00	Rp 205.862.300,00	88,70
89	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp 867.230.000,00	Rp 664.205.000,00	Rp 203.025.000,00	76,59
90	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp 88.443.300,00	Rp 88.337.000,00	Rp 106.300,00	99,88
91	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 2.264.814.795,00	Rp 2.241.220.413,00	Rp 23.594.382,00	98,96
92	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp 325.705.500,00	Rp 309.812.200,00	Rp 15.893.300,00	95,12
93	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp 1.838.400.520,00	Rp 1.274.699.999,00	Rp 563.700.521,00	69,34
94	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp 31.243.000,00	Rp 31.243.000,00	Rp -	100,00
95	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 1.737.573.300,00	Rp 1.324.464.916,00	Rp 413.108.384,00	76,22



No	PROGRAM	Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)
96	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 200.000.000,00	Rp 199.700.000,00	Rp 300.000,00	99,85
97	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp 598.000.000,00	Rp 45.500.000,00	Rp 552.500.000,00	7,61
98	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp 2.165.047.320,00	Rp 1.317.208.420,00	Rp 847.838.900,00	60,84
99	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp 365.899.402,00	Rp 361.320.000,00	Rp 4.579.402,00	98,75
100	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp 255.000.000,00	Rp 218.425.000,00	Rp 36.575.000,00	85,66
101	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp 557.026.925,00	Rp 355.057.980,00	Rp 201.968.945,00	63,74
102	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp 66.763.600,00	Rp 66.750.000,00	Rp 13.600,00	99,98
Jumlah		Rp 1.271.679.023.193,00	Rp 1.147.521.055.622,08	Rp 124.157.967.570,92	90,24

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Tahun 2023 Pemerintah Kota Bengkulu tidak mendapatkan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Bengkulu.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu.

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, jenis pelayanan dasar urusan pendidikan yaitu

- a. Pendidikan anak usia dini
- b. Pendidikan dasar; dan
- c. Pendidikan kesetaraan.

4.1.2 Target, Realisasi dan Alokasi Anggaran Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target dan realisasi serta alokasi dan realisasi anggaran pencapaian standar pelayanan minimal Bidang Pendidikan Tahun 2023 diuraikan secara rinci pada tabel di bawah ini:



Tabel 4.1
Target, Realisasi dan Alokasi Anggaran Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

NO	URUSAN PEMERINTAH	PEMANGKAT DAERAH PELAKSANA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET KEMERJA	REALISASI KEMERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana	22 sekolah	22 sekolah	86.151.035.804	82.623.388.802
					Rahabilitasi sedang/berat			37.045.309.564	36.797.557.453
					Pengadaan Mebel Sekolah			6.300.299.300	6.225.582.699
					Penyediaan Biaya Personil Peserta				0
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga	72 sekolah	72 sekolah	1.515.000.000	1.441.964.490
					Penyelenggaraan Proses Belajar dan				0
					Penyiapan dan Tindak Lanjut	81 sekolah Satuan	81 sekolah Satuan	100.000.000	0
					Pembinaan Minat, Bakat dan				0
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah	196 sekolah Satuan	196 sekolah Satuan	29.130.010.264	29.130.010.264
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, prasarana,	1 sekolah	1 sekolah	36.715.586.240	33.542.907.649
					Rahabilitasi sedang/berat gedung			11.807.911.000	11.558.204.835
					rehabilitasi sedang/berat ruang kelas				0
					rehabilitasi sedang/berat				0
					rehabilitasi sedang/berat				0
					Pengadaan Mebel Sekolah	10 sekolah	10 sekolah	225.000.000	0
					Penyediaan Biaya Personil Peserta	3448 Peserta	3448 Peserta	224.000.000	140.000.000
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga	4 sekolah	4 sekolah	324.982.740	245.090.000
					Penyelenggaraan Proses Belajar dan				0
					Penyiapan dan Tindak Lanjut	25 sekolah Satuan	25 sekolah Satuan	100.000.000	79.550.194
					Pembinaan Minat, Bakat dan				0
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah	25 sekolah Satuan	25 sekolah Satuan	24.033.692.500	21.520.062.620
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung Ruang Kelas	1 sekolah	1 sekolah	7.581.740.000	7.176.823.700
					Pembangunan Sarana, Prasarana	2 sekolah	2 sekolah	151.663.500	151.353.400
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga	10 sekolah	10 sekolah	785.076.500	783.580.300
					Pengembangan Karir Pendidik dan			260.000.000	259.370.000
					Tenaga Kependidikan pada Satuan				0
					Pembinaan Ketenagagaan dan	267 sekolah Satuan	267 sekolah Satuan	100.000.000	76.300.000
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP PAUD	413 sekolah Satuan	413 sekolah Satuan	6.285.000.000	5.906.220.000
								4.808.400.000	5.106.100.000
					Pemeliharaan Rutin Sarana,				0
					Prasarana dan Utilitas Sekolah				0
					NonformalKesetaraan				0
					Penyelenggaraan Proses Belajar				0
					NonformalKesetaraan				0
					Pengelolaan Dana BOP Sekolah	256 sekolah Satuan	256 sekolah Satuan	4.808.400.000	5.106.100.000
				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					0
					Penetapan Kurikulum				0
					Muatan Lokal Pendidikan Dasar				0
					Penetapan Kurikulum Muatan Lokal				0
					Pendidikan Anak Usia Dini dan				0
					Pendidikan Nonformal				0
					Penyusunan Kompetensi Dasar				0
					Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia				0
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				2.388.471.010	2.114.756.797
					Pemerataan kuantitas dan				0
					kuualitas Pendidik dan				0
					Tenaga Kependidikan bagi				0
					Satuan Pendidikan Dasar,				0
					PAUD, dan Pendidikan				0
					NonformalKesetaraan				0
					Perhitungan dan Pemetaan Pendidik				0
					dan Tenaga Kependidikan Satuan				0
					Pendidikan Dasar, PAUD, dan				0
					Pendidikan NonformalKesetaraan				0
					Penataan Pendistribusian Pendidik dan	500 guru	500 guru	2.388.471.010	2.114.756.797
					Tenaga Kependidikan bagi Satuan	Daumen	Daumen		0
					Pendidikan Dasar, PAUD, dan				0
					Pendidikan NonformalKesetaraan				0

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

4.1.3 Dukungan Personil

Jumlah personil yang melaksanakan penerapan dan pencapaian SPM sebanyak 100 (seratus) orang dari Bidang PAUDNI dan Bidang Pendidikan Dasar dengan rincian berdasarkan kualifikasi pendidikan dan jabatan sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Jumlah Personil Pendukung Penerapan SPM Bidang Pendidikan
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata 2 (S2)	32
2	Strata 1 (S1)	62
3	Diploma III (D-III)	5
4	Diploma II (D-II)	-
5	SLTA	1
6	SLTP	-
	JUMLAH	100

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

Tabel 4.3
Jumlah Personil Pendukung Penerapan SPM Bidang Pendidikan
Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Eselon II	5
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	7
4	Fungsional Umum dan Fungsional tertentu	83
	JUMLAH	100

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

4.1.4 Permasalahan dan Solusi

Dalam pemenuhan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2023 sejauh ini tidak mengalami hambatan yang berarti.

4.2 Bidang Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan kepada masyarakat.

Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraanya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya diatur teknis penerapannya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Berdasarkan kedua peraturan tersebut kemudian dijabarkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 14 Tahun 2020 dimana jenis pelayanan dasar bidang kesehatan tersebut meliputi:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Anak Balita
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolusis
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah

Target penerapan Standar Pelayanan Minimal diatur dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Bengkulu. Dalam

peraturan tersebut target penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Target Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
4	Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Setiap tahun
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	100%	Setiap tahun



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
		(Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan		

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, 2023

4.2.3 Realisasi

Realisasi capaian kinerja penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kota Bengkulu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Realisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET CAPAIAN (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	87,6
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	88,4
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	98,7
4.	Pelayanan Kesehatan Anak Balita	100	70,6
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100	32,3
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100	15,8
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100	59,5
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	20,1
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	100	41,9
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100	58,7
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100	100
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100	83,8

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, 2023

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung penerapan standar pelayanan minimal bidang kesehatan tahun 2023 di Kota Bengkulu adalah sebesar Rp1.517.458.710,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp173.358.000,00 atau 11,42%. Selengkapnya rincian anggaran per jenis pelayanan disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 4.6
Alokasi Anggaran dan Realisasi Penerapan
SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.309.411.210	94.608.000	7,23
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	0	0
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	0	0
4	Pelayanan Kesehatan Anak Balita	0	0	0
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	0	0	0
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	18.000.000	18.000.000	100
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	0	0	0
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	12.000.000	12.000.000	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	12.000.000	12.000.000	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	41.520.000	12.000.000	28,90
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolusis	24.750.000	24.750.000	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	99.777.500	0	0
	Jumlah	1.517.458.710	173.358.000	11,42

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, 2023

4.2.5 Dukungan Personil

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kota Bengkulu didukung oleh personil sebanyak 710 orang dengan rincian berdasarkan tingkat pendidikan, golongan dan jabatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Jumlah Personil Pendukung Penerapan SPM Bidang Kesehatan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata 2 (S2)	27
2	Strata 1 (S1)/D-IV	418
3	Diploma III (D-III)	244
4	Diploma II (D-II)/D-I	4
5	SLTA	16
6	SLTP	1
7	SD	0
	Jumlah	710

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, 2023

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan Kota Bengkulu dalam melaksanakan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

- SDM kesehatan tertentu masih kurang dan masih ada tenaga kesehatan yang kurang terlatih.
- Kurangnya kerja sama lintas sektor dan lintas program.
- Peran serta masyarakat yang masih kurang di dalam pencegahan terhadap sesuatu penyakit.
- Estimasi sasaran yang ditetapkan terlalu tinggi.
- Ketersediaan dana yang kurang mendukung.

2. Solusi

Terhadap permasalahan tersebut Dinas Kesehatan Kota Bengkulu telah mengambil langkah sebagai solusi sebagai berikut:

- Kondisi tenaga petugas kesehatan di unit pelayanan yang kurang, dapat ditanggulangi dengan mengusulkan untuk pengangkatan tenaga honorer dan mengadakan peningkatan SDM yang ada melalui pelatihan.

- b. Pelaksanaan kerjasama lintas sektor dengan melibatkan OPD atau unit terkait dalam menanggulangi permasalahan yang terjadi di masyarakat serta koordinasi lintas program baik pusat maupun daerah secara optimal.
- c. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan bidang kesehatan melalui kegiatan di Posyandu, Posbindu, Posyandu Usila ataupun kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal.
- d. Koordinasi dengan program yang ada di propinsi dalam menghitung estimasi sasaran yang ada.
- e. Memperbaiki pola perencanaan penganggaran sehingga seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penerapan SPM dapat dilaksanakan dengan waktu dan anggaran yang cukup.
- f. Anggaran untuk pelaksanaan SPM bidang kesehatan tidak dilakukan Refocusing.
- g. Memperbaiki pola perencanaan penganggaran sehingga seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penerapan SPM dapat dilaksanakan dengan waktu dan anggaran yang cukup.

4.3 Bidang Pekerjaan Umum

Standar Pelayanan Minimal urusan pekerjaan umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu.

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Dasar hukum pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik tahun Anggaran 2022.
- b. Peraturan Menteri Keuangan No. 198/PMK/07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK).

- c. Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022.
- d. Permen PUPR No. 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum.

Berdasarkan peraturan tersebut terdapat 2 jenis pelayanan dasar untuk urusan Perkerjaan umum sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2. Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target dari pelayanan dasar urusan pekerjaan umum sesuai dengan peraturan menteri sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.8
Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	1000 SR
2.	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase rumah yang mendapatkan akses pelayanan air limbah domestik	350 SR

Sumber: Rencana Kerja Dinas PUPR Kota Bengkulu Tahun 2023

1. Persentase Akses Air Minum Aman

Persentase akses air minum aman melalui sistem perpipaan berdasarkan target renja tahun 2023 adalah sebesar 100 %, atau 1.000 SR (Sambungan Rumah) pafa 9 Kecamatan, adapun tata cara prosedur pelaksanaan kegiatan meliputi :

- a. Proposal dari kelurahan/warga disampaikan ke PDAM Kota Bengkulu. PDAM Kota Bengkulu merekap dan mengusulkan



proposal dari Kleurahan/warga ke Kementerian Pekerjaan Umum.

- b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui petugas surveyor dan PDAM bersama-sama melakukan survey untuk meninjau lokasi
- c. Hasil dari laporan survey tersebut untuk dihasilkan volume jumlah Sambungan Rumah (SR), rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar rencana yang dibutuhkan untuk diusulkan dan diinput kedalam aplikasi dan kemudian diverifikasi oleh Kementerian PUPR.

Untuk pekerjaan penerima pengelolaan Air Minum (SPAM) Tahun 2023 adalah sebanyak 583 Sambungan Rumah (SR) yang tersebar di 9 (sembilan) Kecamatan yaitu Muara Bangkahulu, Kecamatan Sungai Serut, Kecamatan Selebar, Kecamatan Kampung Melayu, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Singaran Pati dan Kecamatan Tekuk Segara.

2. Persentase Akses Sanitasi Layak

Persentase Akses Sanitasi Layak melalui sistem perpipaan berdasarkan target renja tahun 2023 adalah sebesar 100%, atau sebanyak 350 Rumah Tangga, dengan kriteria SPALD T terpusat khusus untuk penduduk atau rumah tangga. SPALD S untuk rumah tangga, masjid dan bangunan lainnya.

Tata cara prosedur pelaksanaan kegiatan :

- a. Masyarakat mengajukan proposal ke Bidang Cipta Karya
- b. Proposal usulan dari masyarakat direkap oleh Bidang Cipta Karya melalui Kasi PLP
- c. Tim Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu melaksanakan survey ke titik lokasi
- d. Hasil laporan survey lapangan menentukan target, Panjang SR, RAB dan rincian dana yang dibutuhkan pelaksanaan kegiatan

4.3.3 Realisasi

Pencapaian pemenuhan SPM Tahun 2023 dirincikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.9
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi Capaian	Persentase capaian (%)
1.	Penyediaan Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	1.000	583	58,3 %
2.	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase rumah yang mendapatkan akses pelayanan air limbah domestik	350	8	2,3

Sumber : Dinas PUPR Kota Bengkulu

1. Persentase Akses Air Minum Aman

Persentase Akses Air Minum Aman dengan Sistem Perpipaan
Tahun 2023 = 58,3% atau sebanyak 583 SR

Tabel 4.10
Penerima Pengelolaan Air Minum (SPAM)

No	Kecamatan	Jumlah Sambungan Rumah	Ket.
1	Selebar	286 SR	
2	Muara Bangkahulu	135 SR	
3	Kampung Melayu	67 SR	
4.	Gading Cempaka	1 SR	
5.	Sungai Serut	96 SR	
6.	Teluk Segara	2 SR	
7.	Ainggaran Pati	2 SR	
8.	Ratu Agung	1 SR	
9.	Ratu Samban	0 SE	
JUMLAH		590 SR	7 SR dilakukan pemasangan secara mandiri

Sumber : Dinas PUPR Kota Bengkulu

2. Persentase Akses Sanitasi Layak

Tabel 4.11

Rumah Penerima Pengelolaan Air Limbah

No	Uraian	Jumlah Rumah	Keterangan
1	SPALD S	8 RT	
JUMLAH		8 RT	

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dan realisasi pemenuhan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023 pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.12

Alokasi dan Realisasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sumber Dana
1.	Program Pembangunan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	961.322.020,00	848.523.000,00	88,27	Dana Hibah Kementerian PUPR
2.	Program Pembangunan dan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah	175.000.000,00	174.358.000,00	99,63	DAK

Sumber : Dinas PUPR Kota Bengkulu

4.3.5 Dukungan Personil

Jumlah seluruh personil yang ikut terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM sebanyak 5 (lima) orang dari Bidang Cipta Karya melalui seleksi Penyehatan Lingkungan Permukiman, adapun rincian personil berdasarkan kualifikasi pendidikan dan jabatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13
Jumlah Personil Pendukung Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata 2 (S2)	-
2	Strata 1 (S1)	4
3	Diploma III (D-III)	-
4	Diploma II (D-II)	-
5	SLTA	1
6	SLTP	-
	JUMLAH	5

Sumber : DPUPR

Tabel 4.14
Jumlah Personil Pendukung Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Eselon II	-
2	Eselon III	1
3	Eselon IV	-
4	Fungsional Umum dan Fungsional tertentu	1
5	Staf Cipta Karya	1
6	PTT	3
	JUMLAH	5

Sumber : DPUPR

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Tidak tercapainya target capaian kinerja pada tahun 2023 dikarenakan tidak tersedianya anggaran program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, adapun anggaran yang tersedia merupakan dana hibah dan silpa dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Untuk mengejar ketertinggalan capaian kinerja tahun 2023 dan pencapaian target tahun anggaran 2024 telah disusun anggaran program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dengan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari kementerian PUPR sebesar Rp. 15.529.974.000,- , Dana Alokasi Umum (DAU)

Rp. 20.267.026.000,- dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 1.500.000.000,-

4.4 Bidang Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Minimal urusan perumahan rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kota Bengkulu.

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari:

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana.
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana.

Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota target renja tahun 2023 adalah Belum dilaksanakan dimana output masih dalam bentuk dokumen, adapun tata cara prosedur pelaksanaan kegiatan meliputi :

- a. Pendataan
- b. Verifikasi Penerima Layanan SPM
- c. Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
- d. Pelaporan Pelaksanaan SPM

SPM ini dilakukan dengan melaksanakan Program Pengembangan Perumahan yang meliputi kegiatan:



- a. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau terkena Relokasi Program Kota 8 Perumahan 518 Unit Rumah di Kecamatan Muara Bangkahulu dan Kecamatan Selebar
 - b. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana 1 Lahan di Kecamatan Selebar Kel. Pekan Sabtu
- Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana adalah 3 Perumahan 571 unit Rumah di Kecamatan Muara Bangkahulu.

2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah

Tata cara dan prosedur pelaksanaan kegiatan meliputi :

- a) Pendataan atau Pengumpulan data
- b) Verifikasi Penerima Layanan/ Penghitungan kebutuhan
- c) Penyusunan Rencana Pemenuhan SPM
- d) Pelaksanaan Pemenuhan SPM

Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota berdasarkan target renja tahun 2023 = 30 unit

SPM ini dilakukan dengan melaksanakan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh: dengan kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan permukiman Kumuh pada Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

4.4.3 Realisasi

1. Realisasi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota = 0 (nol) rumah



2. Realisasi Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota = 61 unit Rumah atau 203% dari target 30 unit rumah.

4.4.4 Alokasi Anggaran

1. Program Pengembangan Perumahan sebesar Rp.69.648.047,00 dengan realisasi sebesar Rp. 57.595.818,00 atau 82.70 %
2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh: dengan sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar di kawasan permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 Ha Rp.1.412.498.900,- dengan realisasi Rp.1.412.498.900,00 atau 100 % yang berasal dari Dana Aspirasi Dewan yaitu sebesar Rp.1.412.000.000,00 dan dana sebelum perubahan anggaran sebesar Rp.498.900,-.

4.4.5 Dukungan Personil

Jumlah pegawai yang melaksanakan penerapan dan pencapaian SPM sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dengan rincian pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.15
Jumlah Personil Pendukung Penerapan SPM Bidang Perumahan
Rakyat Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata 2 (S2)	4
2	Strata 1 (S1)	13
3	Diploma III (D-III)	2
4	Diploma II (D-II)	-
5	SLTA	5
6	SLTP	-
	JUMLAH	24

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota = 0 (nol) di karenakan kegiatan masih ditahap:
 - a) Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau terkena Reloksi Program Pemerintah
 - b) Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
 - c) Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana.
2. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota tahun 2023 belum masuk dalam Dokumen rencana kerja Dinas Perkimtan Kota Bengkulu.

4.5 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada hakekatnya adalah syarat yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang baik agar pembangunan dan kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik. Demi menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) maka urusan ini oleh pemerintah ditetapkan menjadi urusan wajib. Pelaksanaan SPM Trantibumlinmas Pemerintah Kota Bengkulu dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu.

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM Bidang Trantibumlinmas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan terdiri dari 5 pelayanan sebagai berikut:

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
-

2. Pelayanan informasi rawan bencana
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian standar pelayanan minimal Bidang Trantibumlinmas sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 25 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16
Target, Indikator dan OPD Pelaksana SPM Bidang Trantibumlinmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Opd Pelaksana
1	2	3	4	5
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sumber : BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP

4.5.3 Realisasi

Realisasi penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2023 di Kota Bengkulu disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.17
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100	100
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100	100

Sumber : BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas sebesar 100%. Uraian per jenis pelayanan dasar, sebagai berikut:

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum

Realisasi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban terealisasi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu sebesar 100%. Hal ini terlihat seluruh warga negara telah memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada.

2. Pelayanan informasi rawan bencana

Realisasi Pelayanan Informasi Bencana yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu terealisasi

sebesar 100, yaitu seluruh warga negara telah memperoleh layanan informasi rawan bencana telah terlayani.

3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Realisasi Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu terealisasi sebesar 100%, yaitu seluruh Warga Negara telah memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Realisasi Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu terealisasi sebesar 100%, yaitu seluruh Warga Negara telah memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Realisasi Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu sebesar 100%. Hal ini terlihat pada jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di Kota Bengkulu dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu ditambah jumlah layanan pemadaman di Kota Bengkulu dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu sebanyak 186 dibandingkan dengan jumlah kejadian kebakaran di Kota Bengkulu sebanyak 186.

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang digunakan untuk penerapan SPM Bidang Trantimbumlinmas sebesar Rp2.173.964.700,00 dengan realisasi



anggaran sebesar Rp2.040.324.159,00 atau 93,85% yang selengkapnya dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.18
Alokasi dan Realisasi Anggaran SPM Bidang Trantibumlinmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian (%)
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	104.209.300	98.443.343	94,47
		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	104.209.300	98.443.343	94,47
		Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah	84.227.600	83.488.643	99,12
		Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Pencegahan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massal	12.302.200	7.390.200	60,07
		Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.679.500	7.564.500	98,50
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	44.721.000	12.664.000	28,32
		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	44.721.000	12.664.000	28,32
		Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	44.721.000	12.664.000	28,32
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Program Penanggulangan Bencana	111.382.500	111.382.500	100,00
		Kegiatan Pelayanan	111.382.500	111.382.500	100,00



No	Jenis Pelayanan Dasar	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian (%)
	terhadap bencana	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
		Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten	111.382.500	111.382.500	100,00
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana	Program Penanggulangan Bencana	617.333.500	537.574.200	87,08
		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	617.333.500	537.574.200	87,08
		Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	617.333.500	537.574.200	87,08
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	250.000.000	249.378.216	99,75
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	250.000.000	249.378.216	99,75
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	250.000.000	249.378.216	99,75
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.046.318.400	1.030.881.900	98,53
		Kegiatan Pencegahan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.046.318.400	1.030.881.900	98,53
		Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	55.574.400	55.574.400	100,00
		Sub Kegiatan Pemadaman dan pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	49.994.000	49.802.500	99,62
		Sub Kegiatan Pengadaan	940.750.000	925.505.000	98,38!



No	Jenis Pelayanan Dasar	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian (%)
		Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung diri			
Jumlah			2.173.964.700	2.040.324.159	93,85

Sumber : BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP

4.5.5 Dukungan Personil

Jumlah personal pendukung penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas terbagi dalam tiga OPD Pelaksana pelayanan ini sesuai jenis pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.

1. Jenis Pelayanan Dasar yang Dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja

Untuk jenis pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja didukung dengan jumlah personal sebanyak 272 orang yang terdiri atas 35 ASN dan 237 Pegawai Tidak Tetap. Rincian selengkapnya dukungan personil untuk jenis pelayanan dasar ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.19
Personil Pendukung Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah ASN (orang)	Jumlah PTT (orang)
1	Strata 2 (S2)	6	1
2	Strata 1 (S1)	15	52
3	Diploma III (D-III)	0	2
4	Diploma II (D-II)	0	0
5	Diploma I (D-I)	0	1
6	SLTA	14	181
7	SLTP	0	0
JUMLAH		39	35

Sumber : Satpol PP

2. Jenis Pelayanan Dasar yang Dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Untuk jenis pelayanan dasar Bidang Trantibumlinmas yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah didukung oleh personal berjumlah 53 orang terdiri atas 29 ASN dan 24 Pegawai Tidak Tetap. Rincian selengkapnya dukungan personil untuk jenis pelayanan dasar ini disajikan dalam tabel berikut, sebagai berikut:

Tabel 4.20
Personil Pendukung Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah ASN (orang)	Jumlah PTT (orang)
1	Strata 2 (S2)	6	1
2	Strata 1 (S1)	15	52
3	Diploma III (D-III)	0	2
4	Diploma II (D-II)	0	0
5	Diploma I (D-I)	0	1
6	SLTA	14	181
7	SLTP	0	0
JUMLAH		39	35

Sumber : BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP

3. Jenis Pelayanan Dasar yang Dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Untuk jenis pelayanan dasar Bidang Trantibumlinmas yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan didukung oleh personal berjumlah 30 orang ASN dengan rincian berdasarkan kualifikasi pendidikan sebagai berikut:

Tabel 4.21
Personil Pendukung Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas
pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata 2 (S2)	3
2	Strata 1 (S1)	13
3	Diploma III (D-III)	1
4	Diploma II (D-II)	0
5	SLTA	13
6	SLTP	0
JUMLAH		30

Sumber : BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP

Disamping itu, personil pendukung lainnya juga melibatkan sebanyak 189 orang personil Pos Jaga yang terbagi dalam 9 Pos Jaga, 1 Pos Rescue dan 1 Pos Provost, serta terdapat 90 relawan pemadam kebakaran yang tersebar di 67 kelurahan se-Kota Bengkulu.

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi yang ditemui dalam penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas sesuai OPD yang melaksanakan jenis pelayanan dasarnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja

Permasalahan yang ditemui dalam penerapan jenis pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

a. Belum memadainya sarana dan prasarana, yaitu:

- 1) Belum memiliki gedung sendiri, saat ini Satpol PP Kota Bengkulu berkantor di Pasar Barukoto I, milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu dengan kondisi yang kurang layak.
- 2) Belum adanya gudang untuk menyimpan barang sitaan.
- 3) Belum adanya ruangan khusus untuk penyidik.



- b. Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan aparatur, yaitu:
 - 1) Masih ada aparatur yang belum memahami tentang tugas pokok dan fungsinya sehingga akan menghambat pelaksanaan tugas. Sejak diwajibkannya pembuatan laporan kinerja sudah mulai menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur tentang tugas pokok dan fungsinya;
 - 2) Tingkat kedisiplinan aparatur masih kurang baik dari segi disiplin waktu maupun disiplin pekerjaan. Walaupun sudah ada peningkatan disiplin terutama sejak adanya absen mobile dan pelaporan kinerja; dan
 - 3) Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan aparatur dalam pemanfaatan teknologi sehingga dalam menjalankan tugas dan pelayanan masih belum optimal.
- c. Masih kurangnya tenaga PPNS

Atas permasalahan yang ditemui tersebut langkah solusi yang telah dan akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Berupaya untuk melengkapi sarana dan prasarana kantor dengan cara memasukkannya dalam usulan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2024.
- b. Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah Kota Bengkulu untuk menambah sarana bagi Satpol PP Kota Bengkulu berupa ruang penyidik dan gudang.
- c. Menjaga kebersihan dan keindahan kantor sebagai upaya untuk menciptakan suasana yang nyaman.
- d. Mengikuti pelatihan/bimtek/sosialisasi untuk aparatur agar bisa meningkatkan pengetahuannya.
- e. Mengadakan rapat staf untuk mengevaluasi kinerja pegawai dan memberikan motivasi kepada pegawai agar lebih giat lagi dalam bekerja.
- f. Meningkatkan disiplin pegawai, dengan cara meningkatkan disiplin apel pagi, pengawasan lewat laporan kinerja.
- g. Memaksimalkan kinerja PPNS yang ada

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak ada tugas pembantuan baik pusat maupun daerah.

Atas permasalahan tersebut diambil langkah sebagai solusi, yaitu memaksimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Bengkulu.

3. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Permasalahan yang ditemui dalam penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, yaitu:

- a. Kurangnya anggaran dalam melaksanakan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- b. Masih terbatasnya Tenaga Ahli dalam pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Atas permasalahan tersebut diambil solusi sebagai berikut:

- a. Pengajuan anggaran melalui Renja Tahun 2024.
- b. Mengirim SDM untuk mengikuti diklat kompetensi

4.6 Bidang Sosial

Standar Pelayanan Minimal urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu.

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, jenis SPM terdiri dari 5 (Lima) terdiri dari :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar diluar Panti Sosial;
 2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial
 3. Rehabilitai Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti Sosial
-



4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial;
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target dari pelayanan dasar urusan sosial sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 4.22
Target Pencapaian SPM Bidang Sosial

No.	Uraian	Target (orang)
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar diluar Panti Sosial	1.200
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial	1.200
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti Sosial	1.200
4.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial	100
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	1.000

Sumber : Aplikasi E-SPM Dirjen Bangda

4.6.3 Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Tahun 2023 bidang sosial dirincikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.23
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial

No.	Uraian	Realisasi (orang)
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar diluar Panti Sosial	1.200
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial	3.000
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti Sosial	2.400
4.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial	1.000
5.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial	6.000

Sumber : Aplikasi E-SPM Dirjen Bangda

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penerapan standar pelayanan minimal bidang sosial tahun 2023 dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.24
Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan SPM Bidang Sosial

Nama Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
-	-	-	-
-	-	-	-

Sumber : Dinas Sosial

4.6.5 Dukungan Personil

Jumlah seluruh Pegawai yang ikut terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM sebanyak 24 orang Bidang Rehabilitasi Sosial dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan rincian pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.25
Jumlah Personil Pendukung Penerapan SPM Bidang Sosial Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata 3 (S3)	1
2	Strata 2 (S2)	6
3	Strata 1 (S1)	15
4	Diploma III (D-III)	-
5	D.IV	-
6	Diploma II (D-II)	-
7	SLTA	2
8	SLTP	-
	JUMLAH	24

Sumber : Dinas Sosial



Tabel 4.26
Jumlah Personil Pendukung Penerapan SPM Bidang Sosial
Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	8
4	Fungsional Umum dan Fungsional tertentu	10
	JUMLAH	24

Sumber : Dinas Sosial

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pemenuhan SPM Urusan Sosial Tahun 2023 sejauh ini tidak mengalami hambatan yang berarti.

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berupaya menggambarkan implementasi pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, sampai pada capaian output, hasil dari penggunaan anggaran dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan. Demikian juga halnya dengan Pemerintah Kota Bengkulu. Urusan-urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bengkulu mempunyai tujuan supaya dapat memberikan adanya kesejahteraan yang lebih baik kepada segenap masyarakat Kota Bengkulu baik melalui pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersentuhan dengan pembangunan kejiwaan dan atau mental.

Namun, tidak dapat dipungkiri dengan keterbatasan sumber daya yang ada di Pemerintah Kota Bengkulu, harapan, tuntutan dan kebutuhan masyarakat belum dapat diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bengkulu bersama-sama dengan segenap komponen Pembangunan Kota terus bekerjasama dan bersama-sama bekerja, untuk mewujudkan harapan-harapan kebutuhan yang lebih besar tersebut pada masa yang akan datang.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2023 ini disusun dan disampaikan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bengkulu.

PELAPORAN IKK 2023 KOTA BENGKULU

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA Capaian	File Bukti	Status	APIP Keterangan
1.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan 4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD 5. Jumlah pendidik pada PAUD 6. Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini 7. Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 8697. Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 14547	59,78552	Ada	OK	Rumusan dan dokumen sudah sesuai
1.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan 5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan 6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar 7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar 9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 11. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 12. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 13. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat 19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 33012. Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 43385	76,09081	Ada	OK	Rumusan dan dokumen sudah sesuai
1.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan 5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan 6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar 7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar 9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 11. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 12. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 13. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat 19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 14798. Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 21352	69,30498	Ada	OK	Rumusan dan dokumen sudah sesuai

1.a.4	Urusan Pendidikan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi 2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan 4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan 5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan 6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) 7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan = 80654	1,954026	Ada	OK	Rumusan dan dokumen sudah sesuai
1.b.1	Urusan Kesehatan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 761. Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = 385512	1,973998	Ada	OK	Rumusan dan dokumen sudah sesuai
1.b.2	Urusan Kesehatan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 761. Jumlah RS di kabupaten/kota = 385512	0,1974	Ada	IDAK O	Yang diminta dalam rumusan adalah jumlah RS rujukan bukan jumlah daya tampung, jadi seharusnya $7 / 7 \times 100\% = 100\%$
1.b.3	Urusan Kesehatan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 6016. Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota = 6870	87,56914	Ada	OK	Rumusan dan dokumen sudah sesuai
1.b.4	Urusan Kesehatan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 5797. Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = 6556	88,42282	Ada	OK	Rumusan dan dokumen sudah sesuai
1.b.5	Urusan Kesehatan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 5720. Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota = 5796	98,68875	Ada	OK	Rumusan dan dokumen sudah sesuai
1.b.6	Urusan Kesehatan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 21153. Jumlah balita di kabupaten/kota = 29946	70,63715	Ada	OK	Rumusan dan dokumen sudah sesuai
1.b.7	Urusan Kesehatan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 20395. Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = 63183	32,27925	Ada	OK	Rumusan dan dokumen sudah sesuai

1.b.8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 35705. Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = 13,43728	13,43728	Ada	OK	Rumusan dan dokumen sudah sesuai
1.b.9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 21315. Jumlah orang warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota = 59,46436	59,46436	Ada	OK	Rumusan dan dokumen sudah sesuai
1.b.10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 10213. Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota = 50898	20,06562	Ada	OK	Rumusan dan dokumen sudah sesuai
1.b.11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 1573. Jumlah penderita DM di kabupaten/kota = 3746	41,99146	Ada	OK	Rumusan dan dokumen sudah sesuai
1.b.12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 314. Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota = 535	58,69159	Ada	OK	Rumusan dan dokumen sudah sesuai
1.b.13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 845. Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota = 845	100	Ada	OK	Rumusan dan dokumen sudah sesuai
1.b.14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 52. Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota = 62	83,87097	Ada	OK	Rumusan dan dokumen sudah sesuai
1.c.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) 2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m) 3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA) 4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha) 5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota 6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota 7. Data prasarana dan sarana pengamanan pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 5584727. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 206668	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 5584727. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 206668	2702,27	Ada	OK	seharusnya 1 berbanding 0,027022698 = 0.02702 apakah penginputan tidak mengakoodir perbandingan, agar menjadi perhatian dalam penginputan

1.c.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) 2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m) 3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA) 4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha) 5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota 6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota 7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) = 73.99. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) = 73.99	100	Ada	OK	Rumusan dan Dokumen sudah sesuai
1.c.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik 2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik 3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 398.86. luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota = 398.86	100	Ada	OK	Rumusan dan Dokumen sudah sesuai
1.c.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak) 2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak) 3. Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak) 4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM 5. Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota. = 38463. Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut. = 119290	32,24327	Ada	OK	Rumusan dan Dokumen sudah sesuai
1.c.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S 2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T 3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T 4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja 5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja 6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik 7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar 8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman 9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman 10. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat 11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja 12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja 13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD 14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 266. Jumlah rumah di Kabupaten A = 119290	0,222986	Ada	OK	Rumusan dan Dokumen sudah sesuai

1.c.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi 2. Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting 3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak) 4. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak) 5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan 6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kab/kota 7. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota 8. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya = 1705. Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku = 1705	100	Ada	OK	Rumusan dan Dokumen sudah sesuai
1.c.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota 2. Panjang jalan yang dibangun 3. Panjang jembatan yang dibangun 4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi) 5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan 6. Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi 7. Panjang jembatan yang direhabilitasi 8. Panjang jalan yang dipelihara 9. Panjang jembatan yang dipelihara	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 0. Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota = 942567	0	Ada	IDAK O	tidak melakukan kegiatan, sehingga tidak ada capaian
1.c.8.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota 2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota 3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota 4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data terakhir 5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota 6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN 7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya 8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala 9. Tersedianya data dan profil PD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota 10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknis/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya 11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis 12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota 13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota 14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui 15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya 16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya 17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya 18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota 19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota 20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota 21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota 22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui 23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya 24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis = 50. Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota = 210	23,80952	Ada	OK	Rumusan dan Dokumen sudah sesuai
1.c.8.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota 2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota 3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota 4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data terakhir 5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota 6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN 7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya 8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala 9. Tersedianya data dan profil PD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota 10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknis/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya 11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis 12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota 13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota 14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui 15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya 16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya 17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya 18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota 19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota 20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota 21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota 22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui 23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya 24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 22. Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 210	10,47619	Ada	OK	Rumusan dan Dokumen sudah sesuai

1.d.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya 2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam 3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam 4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi 5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi 6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi 7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana 8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi 9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = 0. Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 0	0	Ada	OK	Rumusan dan Dokumen sudah sesuai
1.d.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM 2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM 3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM 4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM 5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM 6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 0. Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 0	0	Ada	OK	Rumusan dan Dokumen sudah sesuai
1.d.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha 2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH 3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 9.79. Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = 44.06	22,2197	Ada	OK	Rumusan dan Dokumen sudah sesuai, hanya pada dokumen terjadi pengenaan menjadi 23%
1.d.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1. Jumlah rumah di kab/kota 2. Jumlah unit PK RTLH 3. Jumlah rumah tidak layak huni 4. Jumlah rumah yang tidak dihuni 5. Rasio rumah dan KK 6. Jumlah rumah pembangunan baru	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni = 1100. Jumlah total unit rumah kabupaten/kota = 117004	0,940139	Ada	OK	Rumusan dan Dokumen sudah sesuai. namun hasilnya 0,094 padahal seharusnya 0,94%
1.d.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU 2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum 3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan 4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site) 5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH 6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU 7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi 8. Jumlah pengembang yang terregistrasi 9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 1112. Jumlah unit rumah kab/kota = 117004	0,950395	Ada	OK	Hasil capaian di dokumen 0,095 seharusnya 0,95%
1.e.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani 2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan 3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan 4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS 5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum 6. Tersedianya sarana prasarana minimal	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani = 6. Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 6	100	Ada	OK	
1.e.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan = 13. Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 13	100	Ada	OK	

1.e.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal 2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 8880. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan = 8880	100	Ada	OK
1.e.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal 2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal 3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan 4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan 5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana 6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 8880. Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 8880	100	Ada	OK
1.e.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB 2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana 3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana 4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 956. Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana = 956	100	Ada	OK
1.e.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota 2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan 3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan 4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa 5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi 6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran 7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran 8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat = 186. Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota = 186	100	Ada	OK
1.e.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	4,81	Ada	OK

1.f.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki 2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM 3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk 4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau 5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki 6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi 7. Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar 8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang 9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu 10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter 11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia 12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan 13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah 14. Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan 15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial 16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat 17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan 18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar 19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga 20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga 21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dimiliki	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = 251	100	Ada	OK	
1.f.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan 2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang 3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki 4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan 5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial 6. Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 7777. Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota = 7777	100	Ada	OK	
2.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota. 2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja. 3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = 0. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota = 4	0	Ada	OK	Rumusan dan Dokumen sudah sesuai
2.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster 2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi 3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan 4. Persentase LPK yang terakreditasi 5. Persentase LPK yang memiliki perizinan 6. Jumlah penganggur yang dilatih 7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan 8. Persentase penyerapan lulusan 9. Lulusan bersertifikat kompetensi 10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan 11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 4. Jumlah tenaga kerja keseluruhan = 38414	0,010413	Ada	OK	Rumusan dan Dokumen sudah sesuai
2.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas 2. Data tingkat produktivitas total	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = 124455055300000. Jumlah tenaga kerja = 38414	3,24E+10	Ada	OK	sesuai dengan dokumen

2.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) 2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan 4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah. 5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih 7. Jumlah mogok kerja 8. Jumlah penutupan perusahaan 9. Jumlah perselisihan kepentingan 10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan 11. Jumlah perselisihan PHK 12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK 13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite 14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan 15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = 807. Jumlah Perusahaan = 2019	39,97028	Ada	OK	Dokumen dan rumusan sudah sesuai
2.a.5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota 2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota 3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota 4. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota 5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja 6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota 7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota. 8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER) 9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi 10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata 11. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan 12. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja 13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya 14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah pencari kerja (pencari kerja) yang ditempatkan = 269. Jumlah pencari kerja yang terdaftar = 497	54,12475	Ada	OK	Dokumendan Rumusan sudah sesuai
2.g.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG 2. Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD = 96224157641. Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD = 1271679023193	7,566702	Ada	IDAK O	dokumen yang di input salah (Surat keterangan)
2.g.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak 2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal 3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani 4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan 5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi = 44. Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = 44	100	Ada	OK	dokumen telah sesuai
2.g.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan 2. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih 3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan 4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota 5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi 6. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi 7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 13. Jumlah penduduk perempuan = 191816	6,777328	Ada	OK	dokumen telah sesuai

2.h.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	1. Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan 2. Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya 3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal 4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang 5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan 6. Tertanganinya kerawanan pangan 7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan 8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota = 0. Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan = 12.97	0	Ada	OK
2.i.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek 3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee. 4. Dokumen Izin membuka tanah 5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 0. seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 0	0	Ada	
2.i.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek 3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee. 4. Dokumen Izin membuka tanah 5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 4. Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 4	100	Ada	
2.i.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek 3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee. 4. Dokumen Izin membuka tanah 5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 0. Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan = 0	0	Ada	
2.i.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek 3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee. 4. Dokumen Izin membuka tanah 5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha;. Jumlah penerima tanah obyek landreform	0	Tidak Ada	
2.i.5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek 3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee. 4. Dokumen Izin membuka tanah 5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah = 0. Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan = 0	0	Ada	
2.i.6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek 3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee. 4. Dokumen Izin membuka tanah 5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani = 2. Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan = 2	100	Ada	

2.j.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	1. Hasil perhitungan kab/kota terhadap: a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	57,04	Ada	OK	Rumusan dan Dokumen telah sesuai	
2.j.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani = 63670.6. Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan kabupaten/kota = 100293.29	63,48441	Ada	OK	Rumusan dan Dokumen sudah sesuai
2.j.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota 2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kab/kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota 3. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota 4. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat 5. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota = 22. usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 35	62,85714	Ada	OK	Rumusan dan Dokumen sudah sesuai	
2.k.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Penerbitan akta perkawinan 2. Penerbitan akta perceraian 3. Penerbitan akta kematian 4. Penyajian data kependudukan	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP = 269630. Jumlah penduduk 17 tahun ke atas = 278343	96,86969	Ada	OK	Rumusan dan Dokumen sudah sesuai
2.k.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Penerbitan akta perkawinan 2. Penerbitan akta perceraian 3. Penerbitan akta kematian 4. Penyajian data kependudukan	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA = 55649. Jumlah anak usia 0-17 tahun = 114304	48,68509	Ada	OK	Rumusan dan Dokumen sudah sesuai
2.k.1.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Penerbitan akta perkawinan 2. Penerbitan akta perceraian 3. Penerbitan akta kematian 4. Penyajian data kependudukan	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir = 7886. Jumlah anak usia 0-18 tahun = 7886	100	Ada	OK	Namun kurang data dukung data jumlah kelahiran
2.k.1.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Penerbitan akta perkawinan 2. Penerbitan akta perceraian 3. Penerbitan akta kematian 4. Penyajian data kependudukan	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama = 10. Jumlah PD = 31	32,25806	Ada	OK	pada narasi 0,3% seharusnya 30.258%
2.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa 2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya 3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan 4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 0. Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) = 0	0	Ada	OK	

2.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa 2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya 3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan 4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 0. Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = 0	0	Ada	OK	
2.m.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan 2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun 3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) 4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) 5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	TFR (Angka Kelahiran Total)		2,15	Ada	OK	dokumen telah sesuai
2.m.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP 2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 3. Pemerintah Daerah kab/kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif 4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern = 32649. Jumlah Pasangan Usia Subur = 54477	59,93171	Ada	OK	dokumen telah sesuai
2.m.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah 2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 4858. Jumlah Pasangan Usia Subur = 54477	8,917525	Ada	OK	dokumen telah sesuai
2.n.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C 2. Terlaksananya pelayanan uji berkala 3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi 4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Rasio konektivitas kabupaten/kota		56	Ada	OK	Dokumen dan rumusan sudah sesuai
2.n.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C 2. Terlaksananya pelayanan uji berkala 3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi 4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota		0,15	Ada	OK	Dokumen dan rumusan sudah sesuai
2.o.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo 2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo 3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 1. Jumlah PD = 39	2,564103	Ada	OK	Rumusan dan dokumen sudah sesuai

2.o.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015 2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar 3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik 5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik 6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah 8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah 9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah 10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo) 11. Persentase data yang dapat berbagi pakai 12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city 13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo 14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 5. Jumlah Layanan Publik = 7	71,42857	Ada	OK	Rumusan dan dokumen sudah sesuai
2.o.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota = 47000. Jumlah penduduk = 385512	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota = 47000. Jumlah penduduk = 385512	12,19158	Ada	OK	Rumusan dan dokumen sudah sesuai
2.p.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantutan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 6. Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan 9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset = 200. Jumlah seluruh koperasi aktif = 981	20,38736	Ada	IDAK O	Dokumen pendukung untuk IKK Outcome : 2.p.1 Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset / jumlah seluruh koperasi aktif yang dilampirkan tidak jelas.
2.p.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro 2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) 3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra 4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha 5. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran 6. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan 7. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha = 5846. Jumlah usaha mikro keseluruhan = 43370	13,47936	Ada	IDAK O	Dokumen pendukung untuk IKK Outcome 2.p.2 Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha yang diupload tidak jelas

2.q	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota 2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal 3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal 4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting 5. Kegiatan pameran penanaman modal 6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal 7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal 8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal 9. Laporan realisasi penanaman modal 10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota 11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN 12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah investasi tahun n-jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota = 459991952069. Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota = 1530443047931	30,05613	Ada	OK	Rumusan dan Dokumen sudah sesuai
2.r.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan 2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota = 300. Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = 127300	0,235664	Ada	IDAK O	Data Pemuda yang berwirausaha tidak dilengkapi dengan jenis usahanya.
2.r.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	1. Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda 2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota = 4938. jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = 127300	3,879026	Ada	OK	kesalahan penulisan dalam narasi jumlah pemuda yang menjadi anggota aktif oraganisasi kepemudaan sebanyak 725 seharusnya 4.938.
2.r.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan 2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Peningkatan prestasi olahraga		30	Ada	OK	sudah sesuai
2.s.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	1. Tersedianya buku profil daerah 2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan 3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan 4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS 5. Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS 6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik 7. Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 6. jumlah PD = 39	15,38462	Ada	IDAK O	Salah upload dokumen. Seharusnya 2.s.1 bukan 2.t
2.s.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	1. Tersedianya buku profil daerah 2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan 3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan 4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS 5. Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS 6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik 7. Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 0. jumlah PD = 39	0	Ada	OK	Rumusan dan dokumen sudah sesuai
2.t	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan 2. Persentase system elektronik yang telahmenerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah 3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah 4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi = 319. Jumlah area penilaian = 645	49,45736	Ada	OK	Rumusan dan dokumen sudah sesuai

2.u	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi) 2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman) 3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat) 4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola) 5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) 6. Perlindungan cagar budaya kab/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran) 7. Layanan perijzinan membawa cagar budaya kab/kota ke luar kab/kota dengan dukungan data 8. Pengembangan cagar budaya kab/kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi) 9. Pemanfaatan cagar budaya kab/kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata) 10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum 11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan 12. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota 13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya 14. Pembentukan tim ahli cagar budaya kab/kota 15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya 16. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman 17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota 18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman 19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan = 15. Jumlah cagar budaya yang terdata = 48	31,25	Ada	OK	Rumusan dan dokumen sudah sesuai
2.v.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk 2. Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat 3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk 4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan 5. Jumlah pemasyarakatangemar membaca di masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		43,61	Ada	OK	sudah sesuai
2.v.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya 2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa 3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		9,08	Ada	OK	tabel belum dilengkapi dengan narasi
2.w.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	1. persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 2. persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik 4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)		100	Ada	IDAK O	dokumen yang di upload 2.v.1 sedagnkn IKK nya 2.w.1. Tidak sesuai.
2.w.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK 2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK 3. Penyelamatan arsip perangkat daerah kab/kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di kab/kota 4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kab/kota yang sesuai NSPK 5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kab/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK 6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kab/kota yang sesuai NSPK	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		0	Ada	IDAK O	Dokumen pendukung salah upload

3.a	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP) 2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional 3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan 4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) 5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota = 47631.7. Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan = 47718.09	99,81896	Ada	IDAK O	Belum ada dokumen pendukung Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan
3.b.1	Urusan Pilihan	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = -16. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 130	-12,30769	Ada	OK	
3.b.2	Urusan Pilihan	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = 174422. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 202976	85,93233	Ada	OK	
3.b.3	Urusan Pilihan	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual = 105067. Jumlah kamar yang tersedia = 348940	30,11033	Ada	OK	
3.b.4	Urusan Pilihan	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB = 49.84. Total PDRB Berlaku = 50.17	99,34224	Ada	OK	
3.b.5	Urusan Pilihan	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total realiasi PAD dari sektor pariwisata = 37646264954.22. Total realisasi PAD = 184981086165.23	20,35141	Ada	OK	

3.c.1	Urusan Pilihan	Pertanian	1. Sarana pertanian yang diberikan 2. Prasarana pertanian yang digunakan 3. Penerbitan izin usaha pertanian 4. Persentase prasarana yang digunakan 5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota n	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 5826,47. luas panen = 1063.9	547,652	Ada	OK	
3.c.2	Urusan Pilihan	Pertanian	1. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/kota	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = -25. Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 29	-86,2069	Ada	OK	
3.d	Urusan Pilihan	Kehutanan	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura 2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga 3. Pemulihan ekosistem pada Tahura 4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA			0	Tidak Ada		
3.e	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin. Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	0	Tidak Ada		
3.f.1	Urusan Pilihan	Perdagangan	1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan 2. Persentase penerbitan TDG 3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG 4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : 5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota 6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu 7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya 8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan = 2365. Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota = 5846	40,45501	Ada	OK	Rumusan dan Dokumen sudah sesuai
3.f.2	Urusan Pilihan	Perdagangan	1. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi = 3513.15. RDKK = 1788.1	196,4739	Ada	OK	Rumusan dan Dokumen sudah sesuai
3.f.3	Urusan Pilihan	Perdagangan	1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan 2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Persentase alat & alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan = 958. jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota = 2237	42,82521	Ada	OK	Rumusan dan Dokumen sudah sesuai
3.g.1	Urusan Pilihan	Perindustrian	1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n– Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) = 92. Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 = 1488	6,182796	Ada	OK	Rumusan dan Dokumen sudah sesuai

3.g.2	Urusan Pilihan	Perindustrian	1. Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		0	Ada	OK	Rumusan dan Dokumen sudah sesuai
3.g.3	Urusan Pilihan	Perindustrian	1. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan 2. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 308. Jumlah izin yang dikeluarkan = 308	100	Ada	OK	Rumusan dan Dokumen sudah sesuai
3.g.4	Urusan Pilihan	Perindustrian		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkan = 0	0	Ada	OK	Rumusan dan Dokumen sudah sesuai
3.g.5	Urusan Pilihan	Perindustrian		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkan = 0	0	Ada	OK	Rumusan dan Dokumen sudah sesuai
3.g.6	Urusan Pilihan	Perindustrian	1. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di kab/kota	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		125	Ada	OK	Rumusan dan Dokumen sudah sesuai

3.h	Urusan Pilihan	Transmigrasi	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya 2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya 3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina			0	Tidak Ada		
4.a.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan		Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan = 500809873885. Jumlah APBD = 1271679023193	39,38178	Ada	OK	
4.a.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan		Rasio PAD	Jumlah PAD = 18492885439.13. Jumlah Pendapatan pada APBD = 1151788192664.1	1,60558	Ada	OK	
4.a.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		3	Ada	OK	Rumusan dan dokumen sudah sesuai
4.a.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		3	Ada	OK	Rumusan dan dokumen sudah sesuai
4.a.5	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures = 851927567701.43. jumlah belanja APBD = 1121971934734.5	75,93127	Ada	OK	
4.a.6	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan		Opini Laporan Keuangan		5	Ada	OK	Rumusan dan dokumen sudah sesuai
4.b.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan		Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n = 0. jumlah kontrak keseluruhan tahun n = 35	0	Ada	OK	Rumusan dan Dokumen sudah sesuai
4.b.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif = 39. Jumlah seluruh pengadaan = 1371	2,844639	Ada	OK	Screenshoot aplikasi kualiras kurang mantap
4.b.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan = 450501481454.47. total belanja operasi dan modal = 1270429023193	35,46058	Ada	OK	Rumusan dan Dokumen sudah sesuai

4.b.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 72981072134.8. Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 99386619810.28	73,43149	Ada	OK	Screenshot aplikasi kualitas kurang mantap
4.c.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas = 1686. Jumlah seluruh pegawai = 1997	84,42664	Ada	OK	Sesuai
4.c.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) = 1269. seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 1997	63,54532	Ada	IDAK O	Dokumen pendukung seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) belum ada
4.c.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi = 74. seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 355	20,84507	Ada	OK	Dokumen pendukung seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) menjadi lampiran pada IKK Outcome <u>Kepegawaian 4.c.2</u>
4.d.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Realisasi Belanja = 1121971934734.5. Total Belanja APBD = 1271679023193	11,7724	Ada	OK	
4.d.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Total PAD dalam realisasi = 184168634686.73. Total PAD dalam APBD = 290198819118	36,53708	Ada	OK	
4.d.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Manajemen Aset		4	Ada	OK	

4.d.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA = 34967763569.74, total belanja anggaran tahun sebelumnya = 1214226013919	2,87984	Ada	OK
4.e.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 0. Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 0	0	Ada	OK
4.e.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda = 0, total jumlah dokumen yang telah dirinci = 0	0	Ada	OK

PELAPORAN IKK OUTPUT 2023

KOTA BENGKULU

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA
					Nilai
1	Urusan Pemerintahan Wajib	Pendidikan	1.a.1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	343
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	11060
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	289
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	1274
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah pendidik pada PAUD	1274
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	1088
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pem	240
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	81
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	35879
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	17744
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	33012
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	14798
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	106
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	48
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	2228

9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1268
10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1994
11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	1387
12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	257
13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	233
14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2006
15	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1216
16	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	117
17	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	117
18	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	130
19	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	56
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.4	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	42
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.4	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	6304
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.4	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	3242
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	231
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.4	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	231
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.4	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	231

7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.4	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	39
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.4	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	39
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	7
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	7
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.3	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	160
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.3	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	482
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.4	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	400
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.4	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	484
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.5	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	400
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.5	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	480
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.6	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	200
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.6	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	480
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.7	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	60
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.7	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	236
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.8	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	220
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.8	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	446
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.9	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	80
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.9	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	446

1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.10	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	60
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.10	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	446
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.11	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	120
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.11	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	446
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.12	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.12	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	236
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.13	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	27000
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.13	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	508
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.14	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	31618
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.14	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	508
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1,1.c.2	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	206,668
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1,1.c.2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	23700
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1,1.c.2	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	73,99
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1,1.c.2	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	9740,7
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1,1.c.2	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/loa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	0
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1,1.c.2	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0

7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1,1.c.2	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	8
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.3	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	32,77
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.3	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	57,19
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	21,69
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	0
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	0
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	0
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	1
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	1
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	8
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	0
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	8

4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	266
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	266
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	8
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	0
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	3,32
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	0
10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	100
11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	71,43
12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	66,7
13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	0
14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	3,32
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0,4

2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	1705
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	0
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	0
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	2126
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	2126
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	942567
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jalan yang dibangun	17000
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jembatan yang dibangun	58,4
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	15146
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	7

6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	2300
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	12
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jalan yang dipelihara	19
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jembatan yang dipelihara	8328
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	1
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	50
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	50
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	1
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	1
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	1
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	1
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	1

9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	2
10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang memb	1
11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	1
12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	1
13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	1
14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0
15	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	1
16	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	1
17	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	1
18	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0
19	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0
20	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	210

21	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	0
22	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0
23	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0
24	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0
25	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	210
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	2242
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	2242
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	4845
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0

6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0

6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.3	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	44,06
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.3	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	61
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah rumah di kab/kota	117004
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah unit PK RTLH	61
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah rumah tidak layak huni	1100
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	0
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Rasio rumah dan KK	1

6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah rumah pembangunan baru	1112
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	30
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	2121
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	2121
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	2121
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	2121
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	2121
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	135
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah pengembang yang terregistrasi	135

9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	135
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	6
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	737
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	13
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	2
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	19
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Tersedianya sarana prasarana minimal	97

1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.3	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	0
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.3	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	50
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	5,67
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	4,81
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100

6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.5	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.5	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.5	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.5	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	358
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	11

3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	202
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	10
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	442
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	202
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	253
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	70
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	15
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	251
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	0
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	161

5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	5
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	66
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	0
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	85
10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	1
11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	0
12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0
13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	1
14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	97
15	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	76
16	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	76
17	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	0
18	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	24
19	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	0
20	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	0
21	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	24
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	7777

2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	0
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah paket permakanaan khusus bagi kelompok rentan	0
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	97
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	0
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.1	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	0
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.1	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	0
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	100
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	100
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	13,33
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase LPK yang terakreditasi	46,15
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase LPK yang memiliki perizinan	100
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Jumlah penganggur yang dilatih	15
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase penyerapan lulusan	100
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Lulusan bersertifikat kompetensi	0
10	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0
11	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0

1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.3	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	100
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.3	Data tingkat produktivitas total	0
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	0,059
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	0
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	15
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	0
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	74,14
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0,64
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah mogok kerja	1
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah penutupan perusahaan	0
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah perselisihan kepentingan	3
10	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0
11	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah perselisihan PHK	6
12	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	6
13	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	1
14	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	0
15	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	75
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	0

2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	497
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	11
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	7
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	3
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	0
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	136
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	0
10	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	100
11	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0
12	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0
13	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0
14	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	0
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.1	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	14
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.2	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	4

2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	4
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.2	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.2	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	0
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.2	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	0
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	1
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	123
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	0
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	3
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	0

6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	2
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	44
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	0
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	0
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	2
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	1
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Tertanganinya kerawanan pangan	5485
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	0
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	1
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	0
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	0
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6	Dokumen Izin membuka tanah	0
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	0
1a	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	37,78
1b	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,65

1c	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	27,93
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.2	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	72,91
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.3	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	100
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.3	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	8,57
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota	0
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.3	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.3	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani.Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkung	100
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.k.1,2.k.2	Penerbitan akta perkawinan	107
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.k.1,2.k.2	Penerbitan akta perceraian	12
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.k.1,2.k.2	Penerbitan akta kematian	2256
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.k.1,2.k.2	Penyajian data kependudukan	0
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	2.l.1,2.l.2	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0

2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	2.1.1,2.1.2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	2.1.1,2.1.2	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	2.1.1,2.1.2	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	0
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.1	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	23,1
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.1	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	10,2
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.1	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	88,05
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.1	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	12
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.2	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	15,78

3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.2	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	67
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.2	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	59,86
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.3	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	54,53
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.3	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	51,84
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	2.n.1,2.n.2	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	39
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	2.n.1,2.n.2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	68
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	2.n.1,2.n.2	Penetapan tariffangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	100
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	2.n.1,2.n.2	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	71
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.1	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	2,56
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.1	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	1
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	100
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	82

3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	21,73
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	13
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100
10	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	82,05
11	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase data yang dapat berbagi pakai	80
12	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100
13	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	25
14	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	1
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.3	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	42,26
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.3	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	85,7
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,84
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0

3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	34,05
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	73,8
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	5,91
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,17
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,41
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	24,46
10	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	26,7
11	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,41
12	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	35,68
13	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,41
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	62

2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	100
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0,67
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,44
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	1,76
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	1,85
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	0
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	0
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Kegiatan pameran penanaman modal	0
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	2725
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	7728
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Laporan realisasi penanaman modal	1,99E+12
10	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	15

11	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	14
12	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	3
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	300
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.1	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	6
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.2	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	1625
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	1625
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.3	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	36
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.3	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	7
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.s.1,2.s.2	Tersedianya buku profil daerah	1
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.s.1,2.s.2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	4
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.s.1,2.s.2	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	6
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.s.1,2.s.2	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	5
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.s.1,2.s.2	Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	6
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.s.1,2.s.2	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	90,91
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.s.1,2.s.2	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	0
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	2.t.1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumah kegiatan strategis yang harus diamankan	10,71
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	2.t.1	Persentase system elektronik yang telahmenerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	21,73
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	2.t.1	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	26

4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	2.t.1	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	0
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	5
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	5
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	5
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	7
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	48
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	15
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	0
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	0
10	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	6263
11	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	6469
12	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	0
13	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	5
14	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	7
15	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budya	7
16	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	14
17	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	5

18	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0
19	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	24
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	0,03
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.1	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	0,439
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.1	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,0000051
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.1	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0,2
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.1	Jumlah pemasyarakatangemar membaca di masyarakat	5
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.2	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	150
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	8
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.2	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	39
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.1	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.1	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.1	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.1	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0,012
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.2	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.2	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	0
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.2	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	7
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.2	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	1

6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.2	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	1
1	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	1847
2	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0
3	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	0
4	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	1417
5	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	9067653
1	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	8
2	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	68
3	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	1242
4	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	114
5	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	0
6	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0
7	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	0
8	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	0,0161254
9	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	0,0368239
10	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	8
1	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.1	Sarana pertanian yang diberikan	2
2	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.1	Prasarana pertanian yang digunakan	3
3	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.1	Penerbitan izin usaha pertanian	4
4	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.1	Persentase prasarana yang digunakan	100
5	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.1	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	100

1	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.2	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100
1	Urusan Pilihan	Kehutanan	3.d.1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0
2	Urusan Pilihan	Kehutanan	3.d.1	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0
3	Urusan Pilihan	Kehutanan	3.d.1	Pemulihan ekosistem pada Tahura	0
4	Urusan Pilihan	Kehutanan	3.d.1	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0
1	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.e.1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0
1a	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan	0
1b	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan	100
2	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase penerbitan TDG	100
3	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	15,31
4	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	100
5	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	0
1	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0
2	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100
3	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	0,9
1	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.2	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	3161,77
1	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	42,82
2	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.3	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	100
1	Urusan Pilihan	Perindustrian	3.g.1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0
1	Urusan Pilihan	Perindustrian	3.g.2	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	50
1	Urusan Pilihan	Perindustrian	3.g.3	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	87,5
2	Urusan Pilihan	Perindustrian	3.g.3	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0
1	Urusan Pilihan	Perindustrian	3.g.6	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	4,11
1	Urusan Pilihan	Transmigrasi	2.h.1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0
2	Urusan Pilihan	Transmigrasi	2.h.1	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0
3	Urusan Pilihan	Transmigrasi	2.h.1	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0